

Tanggal Efektif	14 Juni 2001
Masa Penawaran	20 Juni 2001 s/d 22 Juni 2001
Tanggal Penjualan	27 Juni 2001
Tanggal Pengembalian Uang Pemisahan	29 Juni 2001
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	2 Juli 2001
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya	4 Juli 2001

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk dan PT DANAREKSA SEKURITAS SELAKU PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



KIMIA FARMA

PT. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk.

Bidang Usaha:

Industri dan distribusi farmasi, kimia, biologi, kesehatan, makanan/minuman dan apotek.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Budi Utomo No.1, Jakarta 10710

Telepon: (62 21) 3849251, Faksimili: (62 21) 3441416

Website: www.kimiafarma.co.id

e-mail: webmaster@kimiafarma.co.id

Unit Produksi
6 Unit Produksi

Pedagang Besar Farmasi
40 Cabang Pedagang Besar Farmasi

Apotek
218 Apotek

PENAWARAN UMUM

Sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Seri B Baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, dengan harga penawaran Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemisahan Pembelian Saham.

PENAWARAN KEPADA KARYAWAN DAN MANAJEMEN

Sejumlah 54.000.000 (lima puluh empat juta) Saham Seri B Baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada karyawan dan manajemen, dengan harga penawaran Rp 180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemisahan Pembelian Saham. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII keterangan tentang Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan Manajemen.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK : PT DANAREKSA SEKURITAS (terafiliasi) PARA PENJAMIN EMISI EFEK :

PT Agung Securities Indonesia • PT Andalan Artha Advindo Sekuritas • PT Bai Securities (terafiliasi) • PT Bapindo Bumi Sekuritas (terafiliasi) • PT Batavia Arlatama Securindo • PT BNI Securities (terafiliasi) • PT Ciptadana Sekuritas • PT Danatama Makmur Securities • PT Dangas Sekuritas • PT Dinamika Usaha Jaya • PT Dongshu Kolindo Securities • PT Gajah Nusantara Sekuritas • PT Gandasurya Sekuritas • PT General Capital Indonesia • PT Global Inter Capital • PT Ichiyoshi Securities Indonesia • PT Inter-Pacific Securities (terafiliasi) • PT Infikasa Securindo • PT Kapita Sekurindo • PT Kencana Invesartha Sekuritas • PT Kresna Graha Sekurindo • PT Ludlow Securities • PT Madani Securities • PT Makinta Securities • PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi) • PT Mashili Jaya Securities • PT Millenium Atlantik Securities • PT Mitra Investdana Sekurindo • PT Niaga Sekuritas (terafiliasi) • PT Parin Sekuritas • PT Pratama Penegantara • PT Pridana Futura Centra Investama (POPCI) • PT Samuel Sekuritas Indonesia • PT Sarjaya Pemana Sekuritas • PT Sentra Investindo • PT Sinarmas Sekuritas • PT Securinvest Central Gani • PT Suprasurya Danawan Sekuritas • PT Surabaya Arhaselaras • PT Topas Multi Securities • PT Transpacific Securindo • PT Trimegah Securities • PT Usaha Bersama Sekuritas • PT Victoria Kapitalindo Internasional • PT Wernag Securindo • PT Yulia Sekurindo

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH DEPRESIASI NILAI RUPIAH TERHADAP VALUTA ASING, BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BAHAN BAKU

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)

Efek ini akan dicatatkan seluruhnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2001

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISTILAH	ii
RINGKASAN	v
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	6
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	10
V. RISIKO USAHA	20
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	22
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	23
1. Riwayat Singkat Perseroan	23
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	24
3. Struktur Organisasi	29
4. Pengurusan dan Pengawasan	29
5. Sumber Daya Manusia	33
6. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Asosiasi	36
7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	44
8. Keterangan Tentang Transaksi yang Dilakukan Oleh Perseroan dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	44
9. Transaksi Material Yang Mungkin Mempengaruhi Kegiatan Perseroan	47
10. Perkara Pengadilan Yang Sedang Dihadapi	48
VIII. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN DAN MANAJEMEN	49
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	50
1. Umum	50
2. Kegiatan Usaha	50
3. Prospek Usaha	72
4. Strategi Usaha	74
5. Kompetisi	75
6. Asuransi	76
7. Lain-lain	76
X. IKHTISAR INDUSTRI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PERSEROAN	77
XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	80
XII. EKUITAS	82
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	86
XIV. PERPAJAKAN	87
XV. PENJAMINAN EMISI EFEK	88
XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	92
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	95
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	107
XIX. LAPORAN PENILAI	157
X. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	193
XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	222
XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	227

DAFTAR ISTILAH

Badan POM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Bapepam	: Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal
Bursa Efek	: Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya
CPOB	: Cara Pembuatan Obat yang Baik, ketentuan yang menyangkut seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk obat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang dalam emisi saham berlugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham pada Penitipan Kolektif
Negara	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Obat Ethical	: Sediaan farmasi yang dapat dibeli hanya dengan resep dokter melalui apotek
Obat Generik	: Sediaan farmasi yang tidak diberi nama dagang dan dipasarkan dengan nama generik atau International Non-proprietary Name (INN)
Obat OTC (Over The Counter)	: Sediaan farmasi yang dapat dibeli tanpa resep dokter
PBF	: Pedagang Besar Farmasi
Pemerintah	: Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Penawaran Umum	: Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah memiliki rekening efek sesuai dengan ketentuan KSEI
Perseroan	: PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Perusahaan Asosiasi	: Suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki secara langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 50% yaitu Riasima, SIL dan Kifa

- Prinsipal** : Para pemilik merek sediaan farmasi dan produk lainnya dimana Perseroan bertindak sebagai produsen atas dasar lisensi dan/atau kontrak produksi, distributor dan/atau agen
- Prospektus** : Dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pasar Modal
- Saham Seri A Dwiwarna** : Saham yang dikeluarkan untuk dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun. Saham ini memberikan hak istimewa kepada pemiliknya
- Saham Seri B** : Saham Biasa Atas Nama
- SBU (Strategic Business Unit)** : Kelompok bidang usaha Perseroan
- Undang-Undang Pasar Modal** : Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

- Riasima** : PT Riasima Abadi Farma
- SIL** : PT Sinkona Indonesia Lestari
- Kifa** : PT Kifa Gema Sarana Husada

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kegiatan Usaha

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1969 tanggal 23 Januari 1969 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma disingkat PN Farmasi Kimia Farma. PN Farmasi Kimia Farma merupakan peleburan dari 5 Perusahaan Negara Farmasi.

Pada tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1971 tanggal 19 Maret 1971 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 1971 dilakukan pengalihan bentuk dari PN Farmasi Kimia Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir sehubungan dengan kegiatan Penawaran Umum Perdana, seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan diubah sebagaimana dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 22, tanggal 14 September 2000 yang dibuat dihadapan Wahjono Harjo, SH, pada waktu itu pengganti Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. C-20934/HT.01.04-TH.2000 tanggal 19 September 2000 dan Data Perubahan Anggaran Dasar sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang - Undangan Republik Indonesia dimaksud diatas serta telah didaftarkan tanggal 4 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 2000 Tambahan No. 7759, juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 27 April 2001 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C 00458/HT.01.04,TH2001 tanggal 1 Mei 2001.

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha bidang kesehatan yang meliputi kegiatan produksi bahan baku dan obat jadi, kegiatan distribusi serta kegiatan pelayanan farmasi yang terutama meliputi pengoperasian jaringan apotek, kacamata (optik), laboratorium klinik, perdagangan alat-alat kesehatan serta industri makanan/minuman.

Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Jalan Budi Utomo No. 1 Jakarta Pusat merupakan harta milik sendiri Perseroan dengan status Hak Guna Bangunan dan memiliki luas tanah sebesar 3.710 m². Perseroan juga memiliki 6 unit produksi (pabrik), yang keterangan lengkapnya terdapat pada Bab IX, 40 PBF dan 218 apotek (per 31 Maret 2001), yang tersebar di seluruh Indonesia.

Strategi Usaha

Perseroan berusaha untuk menjadi perusahaan farmasi terintegrasi yang terbaik dan terhormat di Indonesia, dengan dukungan unit produksi yang kuat dan jaringan distribusi serta penjualan yang menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan menerapkan strategi Perseroan sebagai berikut:

1. Dalam upaya menghasilkan produk bahan baku dan obat jadi unggulan, Perseroan akan meningkatkan kapasitas produksi, sarana dan prasarana penunjang
2. Meningkatkan penjualan Perseroan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi jaringan penjualan serta produk yang ada
3. Meningkatkan kontribusi produk yang diproduksi Perseroan terhadap total Penjualan Perseroan
4. Memperkuat posisi distribusi dengan menjalin kerjasama dengan industri farmasi (Prinsipal baru non Perseroan) dan industri lainnya baik dari dalam maupun luar negeri
5. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia
6. Melaksanakan efisiensi biaya dengan meningkatkan sistem informasi melalui teknologi informasi yang terintegrasi
7. Memperkuat posisi jaringan pelayanan di bidang kesehatan

Risiko Usaha

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Menurut manajemen, risiko-risiko usaha yang mungkin dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Depresiasi Nilai Rupiah Terhadap Valuta Asing. Hal ini sehubungan dengan sebagian besar bahan baku obat Perseroan diimpor, sedangkan pendapatan Perseroan saat ini sebagian besar dalam mata uang Rupiah
2. Risiko Pasokan Bahan Baku. Hal ini dikarenakan bahan baku Perseroan terutama berasal dari pihak ketiga baik lokal maupun impor, sehingga Keterlambatan dalam pengiriman, kesulitan melakukan pembelian bahan baku dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan
3. Risiko Perekonomian. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti menurunnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan
4. Risiko Persaingan Usaha. Munculnya pesaing baru akan mengakibatkan pangsa pasar Perseroan berkurang dan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan
5. Risiko Perubahan Peraturan. Kegiatan usaha di bidang farmasi merupakan bidang kegiatan usaha yang diatur secara ketat oleh Pemerintah. Perubahan peraturan baik dari Pemerintah maupun instansi terkait dapat mempengaruhi penjualan dan keuntungan Perseroan.
6. Risiko Kegagalan Pengembangan Usaha (Investasi). Kegagalan yang terjadi dalam pemasaran produk baru Perseroan dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif terhadap pendapatan Perseroan.
7. Risiko Pemalsuan Obat. Saat ini banyak beredar produk farmasi yang dipalsukan di Indonesia. Apabila pemalsuan ini dilakukan terhadap produk-produk Perseroan maka akan berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.
8. Risiko Produk Rusak. Produk rusak yang dapat disebabkan oleh distribusi yang kurang baik atau sebab-sebab lain diluar kemampuan Perseroan ini dapat menimbulkan klaim dari konsumen.
9. Risiko Pemogokan Karyawan. Pemogokan massal karyawan masih mungkin terjadi yang dapat menghambat kegiatan usaha Perseroan.
10. Risiko Dampak Lingkungan. Perseroan telah melakukan pengelolaan limbah produksi dengan baik tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri tersebut sehingga dapat memberikan risiko tuntutan hukum bagi Perseroan.

Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998 dan 1997 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan

Mustofa (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi terhadap kegiatan usaha Perseroan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, yang angkanya berasal dari dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2000	1999	1998	1997	1996 ¹⁾
Neraca					
Jumlah Aktiva Lancar	630.063	589.086	581.782	180.812	196.527
Jumlah Aktiva	964.462	704.124	692.955	280.466	292.793
Jumlah Kewajiban	424.485	454.174	487.842	173.336	185.196
Jumlah Ekuitas	539.977	249.950	175.113	107.130	107.597
Laporan Laba Rugi					
Penjualan Bersih	1.517.153	1.069.115	783.685	585.172	525.423
Laba Kotor	553.751	353.239	259.199	169.447	166.963
Laba Usaha	249.922	102.845	90.522	29.718	10.877
Laba Bersih	169.819	98.246	73.873	857	4.049
Rasio-rasio Penting					
Laba kotor / penjualan bersih	36,50%	33,36%	33,07%	28,86%	29,87%
Laba usaha / penjualan bersih	16,47%	9,71%	11,55%	5,08%	2,03 %
Laba bersih / penjualan bersih	11,19%	9,27%	9,04%	0,15%	0,77 %
Laba bersih / jumlah ekuitas	31,45%	39,31%	40,47%	0,81%	3,76 %
Laba bersih / jumlah aktiva	17,61%	13,96%	10,70%	0,31%	1,36 %

1. Dihitung untuk menyesuaikan PSAK 45 dan penyesuaian perbedaan secara akrual tentang, gratifikasi, biaya manajemen dan lain-lain berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya dibebankan ke saldo laba.

Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan dan Manajemen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 2 April 2001, sebagaimana tercantum dalam akta No. 2 tanggal 2 April 2001 dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui adanya program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen. Sesuai keputusan RUPSLB, Perseroan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 180.000.000 Saham Seri B Baru untuk karyawan dan manajemen Perseroan dalam program kepemilikan saham untuk karyawan dan manajemen Perseroan yang terbagi atas program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen dan program hak opsi.

Berdasarkan hasil laporan minat karyawan dan manajemen tanggal 24 April 2001 sehubungan dengan program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen di atas diketahui bahwa pernyataan minat karyawan dan manajemen atas saham Perseroan adalah sejumlah 54.000.000 saham yang pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat.

Bagi karyawan dan manajemen yang mengikuti program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen akan memperoleh hak opsi untuk membeli saham Perseroan. Jumlah saham yang dialokasikan untuk program hak opsi ini adalah sebanyak-banyaknya 180.000.000 saham dikurangi jumlah yang diambil dalam Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen. Saham Perseroan tersebut akan dialokasikan sesuai jenjang jabatan karyawan dan manajemen.

Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Seri B Baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, dengan harga penawaran sebesar Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Bersamaan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat, dilakukan pula Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen sejumlah 54.000.000 (lima puluh empat juta) Saham Seri B Baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini baik ke masyarakat maupun ke karyawan dan manajemen, maka susunan modal saham Perseroan sebelum, sesudah Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan opsi saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum			Setelah Pelaksanaan Hak Opsi Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar:									
- Seri A Dividendo	1	100		1	100		1	100	
- Seri B	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
B. Modal Clangsekan dan Opsi Saham:									
- Negara Republik Indonesia	1	100	0,01	1	100	0,01	1	100	0,01
- Seri A Dividendo	1	100	0,01	1	100	0,01	1	100	0,01
- Seri B	4.000.000.000	400.000.000.000	40,00	4.000.000.000	400.000.000.000	40,00	4.000.000.000	400.000.000.000	40,00
- Karyawan dan Manajemen	-	-	-	54.000.000	5.400.000.000	0,97	100.000.000	10.000.000.000	0,17
- Seri B Masyarakat	-	-	-	500.000.000	50.000.000.000	5,00	500.000.000	50.000.000.000	5,00
Jumlah Saham Eksemankan dan Opsi Saham	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00	5.554.000.000	555.400.000.000	100,00	5.600.000.000	560.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000		14.446.000.000	1.444.600.000.000		14.320.000.000	1.432.000.000.000	

Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut:

- Sekitar 80,2% (delapan puluh koma dua persen) untuk Investasi Perseroan, yang meliputi :
 - Peningkatan kapasitas produksi yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - SBU Industri Bahan Baku Farmasi/Kimia sebesar 18,7% (delapan belas koma tujuh persen) yang digunakan untuk :
 - Meningkatkan kapasitas fasilitas produksi di Unit Produksi Semarang dan Bandung
 - Mendirikan pabrik baru untuk Obat Asli Indonesia dan makanan kesehatan di Unit Produksi Bandung
 - Eksplorasi sumur Yodium
 - Divisi Formulasi sebesar 45,6% (empat puluh lima koma enam persen) yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari fasilitas pabrik di Unit Produksi Jakarta dan Bandung
 - SBU Apotek sebesar 15,9% (lima belas koma sembilan persen) yang digunakan untuk meningkatkan jumlah apotek dengan pendirian baru atau kerjasama patungan dengan Rumah Sakit atau pihak lain
- Sekitar 19,8% (sembilan belas koma delapan persen) untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku dan pembiayaan operasional lainnya dalam rangka menunjang peningkatan penjualan Perseroan

Kebijakan Dividen

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak atas dividen yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama. Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan dan aliran kas Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercantum pada daftar pemegang saham dengan jumlah setinggi-tingginya 30% dari sisa laba yang belum ditentukan penggunaannya (sisa laba setelah dikurangi cadangan umum dan cadangan lainnya (jika ada)) kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Seri B Baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, dengan harga penawaran sebesar Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Bersamaan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat, dilakukan pula Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen sejumlah 54.000.000 (lima puluh empat juta) Saham Seri B Baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



PT. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk.

Bidang Usaha:

Industri dan distribusi farmasi, kimia, biologi, kesehatan,
makanan/minuman, dan apotek

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Budi Utomo No.1, Jakarta 10710
Telepon: (62 21) 3849251, Faksimili.: (62 21) 3441418
Website : www.kimiafarma.co.id
e-mail : webmaster@kimiafarma.co.id

Unit Produksi
6 Unit Produksi

Pedagang Besar Farmasi
40 Pedagang Besar Farmasi

Apotek
218 Apotek

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH DEPRESIASI NILAI RUPIAH TERHADAP VALUTA ASING, BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BAHAN BAKU

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI

Perseroan berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1969 tanggal 23 Januari 1969 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma disingkat PN Farmasi Kimia Farma, suatu perusahaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.1 Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara yang termuat dalam Lembaran Negara No. 59 Tahun 1960. PN Farmasi Kimia Farma merupakan peleburan dari:

- a. Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 90 Tahun 1961
- b. Perusahaan Negara Farmasi Alat Kesehatan Radja Farma yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 102 Tahun 1961
- c. Perusahaan Negara Sari Husada yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1961
- d. Perusahaan Negara Farmasi Alat Kesehatan Nakula Farma yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 105 Tahun 1961
- e. Perusahaan Negara Farmasi Alat Kesehatan Bhinneka Kina Farma yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 106 Tahun 1961

Pada tahun 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1971 tanggal 19 Maret 1971 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 1971, ditetapkan untuk dilakukan pengalihan bentuk PN Farmasi Kimia Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2.3 Undang-Undang No. 9 tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang

Perseroan didirikan menjadi suatu Persero dengan nama PT Kimia Farma (Persero) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 16 Agustus 1971 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 18 tanggal 11 Oktober 1971, yang keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Ketetapan No. J.A.5/184/21 tanggal 14 Oktober 1971, dan didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2888 dan No. 2889 tanggal 20 Oktober 1971 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 9 Nopember 1971, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 508.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir sehubungan dengan kegiatan Penawaran Umum Perdana, seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan diubah sebagaimana dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 22, tanggal 14 September 2000 yang dibuat dihadapan Wahjono Hardjo, SH, pada waktu itu pengganti Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. C-20934/HT.01.04 - TH.2000 tanggal 19 September 2000 dan Data Perubahan Anggaran Dasar sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang - Undangan Republik Indonesia dimaksud diatas serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. 2122/RUB.09.05/X/2000 tanggal 4 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 2000 Tambahan No. 7759, juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 27 April 2001 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C 00458/HT.01.04.TH2001 tanggal 1 Mei 2001.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
 Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
 Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham

(dalam jutaan)

Uraian	Modal Dasar	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh
Jumlah Saham	20.000	5.000
- Seri A Dwiwarna	1	1
- Seri B	19.999	4.999
Jumlah Nilai Nominal (Rp)	2.000.000	500.000

Dengan surat Bapepam No S-1415/PM/2001 tanggal 14 Juni 2001, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan Penawaran Umum sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Seri B Baru kepada masyarakat dan sejumlah 54.000.000 (lima puluh empat juta) Saham Seri B Baru kepada karyawan dan manajemen, keduanya dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham telah menjadi efektif.

Saham Seri B Baru yang ditawarkan kepada masyarakat dan kepada karyawan dan manajemen adalah saham baru yang merupakan 9,97% (sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum dan memberikan kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 180.000.000 Saham Seri B Baru untuk karyawan dan manajemen Perseroan dalam program kepemilikan saham untuk karyawan dan manajemen Perseroan yang terbagi atas program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen dan program hak opsi.

Berdasarkan hasil laporan minat karyawan dan manajemen tanggal 24 April 2001 sehubungan dengan program Penawaran Umum kepada karyawan dan manajemen di atas diketahui bahwa pernyataan minat karyawan dan manajemen atas saham Perseroan. adalah sejumlah 54.000.000 saham yang pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat. Harga saham untuk jumlah tersebut ditentukan sebesar Rp 180 per saham.

Berdasarkan RUPSLB dan Surat Keputusan Direksi, saham yang dibeli oleh karyawan dan manajemen tersebut mempunyai syarat-syarat khusus antara lain hanya dapat dijual kembali setelah 8 bulan sejak tanggal pencatatan dan pembayaran telah dilunasi oleh karyawan dan manajemen.

Bagi karyawan dan manajemen yang mengikuti program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen akan memperoleh hak opsi untuk membeli saham Perseroan. Jumlah saham yang dialokasikan untuk program hak opsi ini adalah sebanyak-banyaknya 180.000.000 saham dikurangi jumlah yang diambil dalam Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen. Saham Perseroan tersebut akan dialokasikan sesuai jenjang jabatan karyawan dan manajemen. Harga saham untuk program hak opsi ditentukan sebesar 115% dari harga penawaran saham perdana kepada masyarakat atau Rp 230 per saham. Pembagian hak opsi tersebut akan dilaksanakan 3 bulan setelah tanggal pencatatan. Masa pelaksanaan hak opsi dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pencatatan, dan bila hak opsi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal dimulainya masa pelaksanaan hak opsi maka hak opsi tersebut dinyatakan gugur.

Jumlah 54.000.000 saham yang ditawarkan kepada karyawan dan manajemen ini terpisah dari Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat, dengan demikian maka alokasinya tidak mengacu kepada ketentuan Pasar Modal yang berlaku sebagaimana tercantum dalam peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 perihal Tanggung Jawab manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Bersamaan dengan sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Seri B Baru yang berasal dari Penawaran Umum kepada masyarakat dan sejumlah 54.000.000 (lima puluh empat juta) Saham Seri B Baru yang berasal dari Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen atau 9,97% (sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham akan mencatatkan 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek menjadi 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum (company listing).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Negara Republik Indonesia						
- Seri A Dwiwarna	1	100	0,01	1	100	0,01
- Seri B	4.999.999.999	499.999.999.900	99,99	4.999.999.999	499.999.999.900	99,99
Karyawan dan Manajemen						
- Seri B	-	-	-	54.000.000	5.400.000.000	0,97
Masyarakat						
- Seri B	-	-	-	500.000.000	50.000.000.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00	5.554.000.000	555.400.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portefolio	15.000.000.000	1.500.000.000.000		14.448.000.000	1.444.800.000.000	

Apabila program hak opsi yang telah diperoleh karyawan dan manajemen dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh akan menjadi 5.680.000.000 (lima miliar enam ratus delapan puluh juta) saham atau Rp 568 miliar, sehingga pemegang saham lama akan terdilusi maksimal 2,2%.

Jika Opsi Saham tersebut dilaksanakan secara penuh oleh karyawan dan manajemen Perseroan, maka komposisi Modal Saham Perseroan sebelum, sesudah Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan opsi saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum			Setelah Pelaksanaan Hak Opsi Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
A. Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
- Sah A Warga	1	100		1	100		1	100	
- Sah B	19.999.999.999	1.999.999.999.900		19.999.999.999	1.999.999.999.900		19.999.999.999	1.999.999.999.900	
B. Modal Diperoleh dari									
Dewan Perusahaan									
Negara Republik Indonesia									
- Sah A Warga	1	100	0,01	1	100	0,01	1	100	0,01
- Sah B	4.999.999.999	499.999.999.900	99,99	4.999.999.999	499.999.999.900	99,99	4.999.999.999	499.999.999.900	99,99
Karyawan dan Manajemen									
- Sah B	-	-	-	94.000.000	9.400.000.000	0,47	182.000.000	18.200.000.000	0,91
Masyarakat									
- Sah B	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	1,50	500.000.000	50.000.000.000	2,50
Jumlah Saham Ditransfer dan Dewan Perusahaan	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00	5.094.000.000	509.400.000.000	100,00	5.182.000.000	518.200.000.000	101,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000		14.906.000.000	1.490.600.000.000		14.818.000.000	1.481.800.000.000	

Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 April 2001, Pemegang saham menyetujui adanya penjualan saham dalam simpanan dan/atau penjualan saham milik Negara Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 49%, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Direksi dan Komisaris, kecuali untuk penetapan harga jual saham.

Pemerintah merencanakan untuk melakukan divestasi saham Negara Republik Indonesia pada semester II tahun 2001. Bersama dengan pelaksanaan divestasi tersebut, Perseroan juga merencanakan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 80,2% (delapan puluh koma dua persen) untuk Investasi Perseroan, yang meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas produksi yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - a.1. SBU Industri Bahan Baku Farmasi/Kimia sebesar 18,7% (delapan belas koma tujuh persen) yang digunakan untuk :
 - Meningkatkan kapasitas fasilitas produksi di Unit Produksi Semarang dan Bandung
 - Mendirikan pabrik baru untuk Obat Asli Indonesia dan makanan kesehatan di Unit Produksi Bandung
 - Eksploitasi sumur Yodium
 - a.2. Divisi Formulasi sebesar 45,6% (empat puluh lima koma enam persen) yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari fasilitas pabrik di Unit Produksi Jakarta dan Bandung
 - b. SBU Apotek sebesar 15,9% (lima belas koma sembilan persen) yang digunakan untuk meningkatkan jumlah apotek dengan pendirian baru atau kerjasama patungan dengan Rumah Sakit atau pihak lain
2. Sekitar 19,8% (sembilan belas koma delapan persen) untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku dan pembiayaan operasional lainnya dalam rangka menunjang peningkatan penjualan Perseroan

Berkaitan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan memenuhi semua ketentuan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan akan mengikuti Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2000 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi terhadap kegiatan usaha Perseroan, Perseroan mempunyai kewajiban lancar dan tidak lancar yang seluruhnya berjumlah Rp 424.485 juta.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
KEWAJIBAN		31 Desember 2000
Kewajiban Lancar		
Pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia		65.000
Hutang bank		5.101
Hutang usaha		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		82.159
Pihak ketiga		89.682
Hutang pajak		65.404
Uang muka penjualan		51.429
Biaya yang masih harus dibayar		42.918
Kewajiban lancar lain-lain		4.992
Jumlah Kewajiban Lancar		416.685
Kewajiban Tidak Lancar		
Pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia jangka panjang		7.800
Jumlah Kewajiban		424.485

KEWAJIBAN LANCAR

Pada tanggal 31 Desember 2000, Perseroan mempunyai kewajiban lancar sebesar Rp 416.685 juta, yang terdiri dari :

1. Pinjaman Dana Dari Pemerintah Republik Indonesia

Pada tanggal 28 Maret 2000, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dana untuk pengadaan Obat Generik tahap III dari Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Rekening Dana Investasi (RDI) No. 378/DP3/2000 sebesar Rp 65.000 juta dengan biaya administrasi 12% per tahun. Pinjaman ini dicairkan pada 3 Mei 2000 dan akan jatuh tempo satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 3 Mei 2001. Sehubungan Perseroan akan membiayai pengadaan bahan baku/kemasan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Generik Berlogo tahun anggaran 2001 dalam rangka mensukseskan Program Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 12 Februari 2001 Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penurunan biaya administrasi pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) No. 378/DP3/2000 sebesar Rp 65.000 juta kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada saat ini Perseroan sedang dalam tahap negosiasi dengan Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk perpanjangan jangka waktu dan penurunan biaya administrasi pinjaman RDI tersebut.

2. Hutang Bank

Pada tanggal 31 Desember 2000, Perseroan mempunyai hutang bank sebesar Rp 5.101 juta yang terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero), pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebesar Rp 1.088 juta Fasilitas kredit modal kerja yang dapat diperpanjang kembali (revolving) dari PT Bank Mandiri (Persero), pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan jumlah kredit maksimum sebesar Rp 35.000 juta, digunakan untuk produksi dan distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan. Fasilitas kredit ini dijamin dengan persediaan, piutang usaha dan sertifikat HGB No. 5 atas nama Perseroan seluas 35.000 m2 berikut bangunan pabrik di atasnya yang berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta. Perjanjian kredit ini berakhir pada tanggal 26 Nopember 2000, dan perpanjangan perjanjian kredit telah diperbaharui pada tanggal 11 Desember 2000 menjadi berakhir pada tanggal 26 Februari 2001, dalam perjanjian kredit yang diperbaharui, fasilitas kredit telah ditingkatkan menjadi terdiri dari fasilitas kredit modal kerja, bank garansi dan fasilitas Letter of Credit import masing-masing sebesar Rp 35.000 juta, Rp 61.000 juta dan US\$ 3.000.000. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang dan persediaan senilai 150% dari jumlah fasilitas kredit serta sertifikat HGB No. 5/Pulogadung dengan hak tanggungan senilai Rp 35.000 juta. Pada saat ini perpanjangan kembali perjanjian fasilitas kredit masih dalam proses pengurusan.

Selain itu Perseroan juga mempunyai fasilitas kredit pada PT Bank Bukopin yaitu fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas line bank garansi dari PT Bank Bukopin, dengan jumlah kredit maksimum masing-masing sebesar Rp 23.750 juta dan Rp 20.000 juta sampai dengan Rp 25.000 juta yang dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perseroan senilai Rp 25.000 juta. Jumlah fasilitas modal kerja yang telah digunakan pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 3.750 juta. Fasilitas line bank garansi dipergunakan untuk jaminan uang muka dan pelaksanaan kontrak yang di buat Perusahaan. Perjanjian kredit ini berakhir pada tanggal 26 September 2001.

Fasilitas pinjaman rekening koran yang dapat diperpanjang kembali (revolving) dari PT Bank Central Asia Tbk., dengan jumlah kredit maksimum sebesar Rp 4.000 juta yang dijamin dengan sertifikat HGB No. 907/Melawai atas nama Perseroan seluas 812 m2 berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Jumlah fasilitas pinjaman rekening koran yang telah digunakan pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 263 juta. Perjanjian kredit ini berakhir pada tanggal 12 Agustus 2000, dan perpanjangan perjanjian kredit telah diperbaharui pada tanggal 16 Oktober 2000 menjadi berakhir pada tanggal 12 Agustus 2001.

3. Hutang Usaha

Hutang usaha merupakan hutang yang timbul dari pembelian barang jadi, bahan baku dan bahan pembantu, yang terdiri dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 82.159 juta dan pihak ketiga sebesar Rp 99.682 juta. Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terutama kepada PT Indofarma Global Medika Rp 35.727 juta, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Rp 32.081 juta, PT Biofarma (Persero) Rp 8.058 juta, PT Indofarma (Persero) Rp 6.143 juta dan PT Pantja Niaga (Persero) Rp 150 juta dan hutang pihak ketiga berasal dari pembelian lokal sebesar Rp 92.306 juta dan pembelian impor yaitu sebesar Rp 7.376 juta.

4. Hutang Pajak

Hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 berjumlah Rp 65.404 juta yang terdiri dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 10.042 juta, pasal 23 sebesar Rp 128 juta serta pasal 25 dan 29 sebesar Rp 55.234 juta.

5. Uang Muka Penjualan

Uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2000 adalah Rp 51.429 juta yang terdiri dari uang muka penjualan yang dibayarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp 50.190 juta dan lainnya sebesar Rp 1.239 juta.

6. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 33.439 juta, bunga dan provisi bank Rp 2.330 juta, promosi dan pengiriman Rp2.147 juta, royalti dan lisensi Rp 1.148 juta dan lain-lain Rp 3.854 juta. Didalam gaji dan kesejahteraan karyawan termasuk latsiran biaya jasa produksi bagi karyawan dan lantem untuk pengurus Perseroan sebesar Rp 32.637 juta.

7. Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya terdiri dari :

- Hutang dividen sebesar Rp 140 juta per tanggal 31 Desember 2000 merupakan saldo Dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi tahun 2000 yang akan dialokasikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman dan diambil dari bagian dividen Pemerintah.
- Hutang pembelian aktiva tetap sebesar Rp 2.479 juta dan pendapatan penjualan rumah cicilan yang ditangguhkan sebesar Rp 1.122 juta, hutang pemeliharaan gedung sebesar Rp 1.213 juta dan lainnya sebesar Rp 37 juta.

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Pada tanggal 31 Desember 2000, Perseroan mempunyai kewajiban tidak lancar yang merupakan pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari RDI sebesar Rp 7.800 juta. Fasilitas ini terdiri dari modal kerja dan investasi masing-masing sebesar Rp 3.249 juta yang jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2003 dan Rp 47.481 juta yang jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2009 dan dikenakan biaya administrasi sebesar 16% dan biaya komitmen sebesar 0,25% per tahun. Pinjaman ini digunakan sebagai modal kerja dan investasi dalam rangka membiayai eksplorasi 12 (dua belas) sumur Yodium.

JAMINAN KEPADA PIHAK KETIGA DAN IKATAN

Pada tanggal 31 Desember 2000, Perseroan membuka bank garansi pada PT Bank Mandiri (Persero) Rp 1.453 juta dan US\$ 401.781 sebagai jaminan uang muka dan pelaksanaan kontrak penjualan yang dilakukan Perseroan dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya Perseroan juga mempunyai letter of credit impor yang masih terbuka sejumlah US\$ 119.242 pada tanggal 31 Desember 2000 pada bank yang sama.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, pada tanggal 31 Desember 2000 Perseroan tidak mempunyai kewajiban dan hutang lainnya yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif, pada tanggal 12 April 2001, Perseroan telah meningkatkan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk menjadi maksimum sebesar Rp 90.000 juta yang terdiri dari fasilitas rekening koran, lime loan revolving dan bank garansi masing-masing sebesar Rp 15.000 juta, Rp 35.000 juta dan Rp 40.000 juta. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan tambahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 275/Gambir dan No. 2341/Pasar Baru yang keduanya atas nama Perseroan dan seluas 10.665 m², berikut bangunan diatasnya dan atau yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

Dengan ini Perseroan menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Perseroan.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha di bidang farmasi dan kesehatan yang meliputi kegiatan produksi bahan baku dan obat jadi, kegiatan distribusi dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang meliputi pengoperasian jaringan apotek, optik dan laboratorium klinik.

Perseroan pada posisi 31 Desember 2000 memiliki 6 (enam) unit produksi, 40 (empat puluh) PBF dan 210 (dua ratus sepuluh) apotek, yang tersebar di wilayah Indonesia.

Kondisi Perseroan dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang tumbuh dan berkembang secara sehat, yaitu yang digambarkan dalam bentuk keberhasilan di berbagai bidang kegiatan usaha, seperti kegiatan produksi, pemasaran, perdagangan, keuangan dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan dengan telah mempunyai Perseroan melewati masa yang sulit di tahun 1998 dan 1999 dengan tetap menghasilkan laba yang cenderung meningkat yaitu dari Rp 70.870 juta di tahun 1998 menjadi Rp 98.246 juta di tahun 1999 dan di tahun 2000 menjadi Rp 169.819 juta. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya aktivitas pemasaran dan distribusi serta penambahan produk baru, meskipun dalam kondisi perekonomian Indonesia yang belum dapat dikatakan pulih, peluang bisnis menurun serta nilai tukar Rupiah masih belum stabil.

Di sisi lain, pasar farmasi Indonesia merupakan pasar yang padat dengan persaingan misalnya persaingan melalui kegiatan promosi, pemberian diskon dan bonus, dan lain-lain. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan tersebut. Sebagai upaya meningkatkan kinerja, Perseroan melakukan efisiensi dan meningkatkan produktifitas yang menuntut pula profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh karyawan.

2. KEUANGAN

2.1. Pertumbuhan Penjualan Bersih dan Laba

Pembahasan analisis keuangan berikut ini didasarkan pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu).

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2000	1999	1998
Penjualan bersih	1.517.153	1.059.115	763.865
Beban pokok penjualan	953.402	705.876	524.466
Beban usaha	303.829	250.384	168.677
Laba usaha	249.922	102.845	90.522
Laba bersih	169.819	98.246	70.870
Jumlah aktiva	964.462	704.124	682.955
Jumlah ekuitas	539.977	249.960	175.113

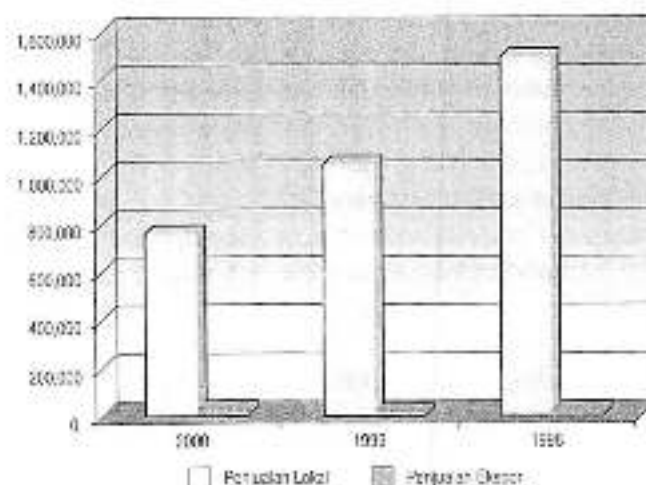
2.1.1. Pertumbuhan Penjualan Bersih

Penjualan Perseroan dikelompokkan menjadi penjualan lokal dan penjualan ekspor.

Rincian penjualan bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)			
Uraian	2000	1999	1998
Penjualan lokal	1.492.777	1.044.575	756.451
Penjualan ekspor	24.376	14.540	27.234
Jumlah Penjualan	1.517.153	1.059.115	783.685

Grafik Pertumbuhan Penjualan Bersih
Periode yang berakhir 31 Desember 1998, 1999 dan 2000



Tahun buku 2000 dibandingkan tahun buku 1999

Total penjualan bersih tahun 2000 adalah sebesar Rp 1.517.153 juta, meningkat sebesar Rp 458.038 juta dibandingkan dengan penjualan tahun 1999 atau terdapat kenaikan sebesar 43,25 %. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga dan terdapat kenaikan kuantitas berupa kenaikan penjualan pil KB, Obat Generik di PBF dari sektor Pemerintah, kenaikan penjualan Obat Generik di apotek dan sehubungan dengan penambahan 30 apotek pada tahun 2000.

Tahun buku 1999 dibandingkan tahun buku 1998

Total penjualan bersih tahun 1999 adalah sebesar Rp 1.059.115 juta meningkat sebesar Rp 275.430 juta dibandingkan dengan penjualan tahun 1998 atau terdapat kenaikan sebesar 35,15%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual untuk Obat Ethical berkisar 10%-15% dan Obat Generik berkisar 3%-5%. Selain itu, secara kuantitas terdapat peningkatan penjualan pada Obat Generik dan alat kesehatan di PBF dari sektor Pemerintah serta apotek.

2.1.2. Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan Perseroan terdiri dari

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2000	1999	1998
Beban Pokok Pertambangan	8.628	3.348	4.289
Beban Pokok Produksi dan Perdagangan	954.774	702.526	520.197
Jumlah Beban Pokok Penjualan	963.402	705.876	524.486

Tahun buku 2000 dibandingkan tahun buku 1999

Beban Pokok Penjualan tahun 2000 adalah sebesar Rp 963.402 juta atau 63,50% terhadap penjualan, dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan tahun 1999 sebesar Rp 705.876 juta atau 66,64% mengalami peningkatan sebesar Rp 257.526 juta atau 36,50%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Tahun buku 1999 dibandingkan tahun buku 1998

Beban Pokok Penjualan tahun 1999 adalah sebesar Rp 705.876 juta atau 66,65% terhadap penjualan, dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan tahun 1998 sebesar Rp 524.486 juta atau 66,93% mengalami peningkatan sebesar Rp 181.390 juta atau 34,58%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penjualan Perseroan.

2.1.3. Laba Kotor

Tahun buku 2000 dibandingkan tahun buku 1999

Laba kotor di tahun 2000 adalah sebesar Rp 553.751 juta dibandingkan dengan laba kotor tahun 1999 sebesar Rp 353.239 juta, terdapat kenaikan sebesar Rp 200.512 juta atau 56,76%. Rasio laba kotor terhadap penjualan Perseroan untuk tahun 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar 36,50% dan 33,36%. Peningkatan rasio laba kotor lebih dipengaruhi oleh tidak berlambahnya biaya-biaya tetap.

Tahun buku 1999 dibandingkan tahun buku 1998

Laba kotor tahun 1999 adalah sebesar Rp 353.239 juta dibandingkan dengan laba kotor tahun 1998 sebesar Rp 259.199 juta, terdapat kenaikan sebesar Rp 94.040 juta atau 36,28%. Rasio laba kotor terhadap penjualan Perseroan untuk tahun 1999 dan 1998 masing-masing adalah sebesar 33,36% dan 33,07%.

2.1.4. Beban Usaha

Beban usaha terdiri dari beban administrasi & umum dan beban penjualan.

Tahun buku 2000 dibandingkan tahun buku 1999

Beban usaha tahun 2000 adalah sebesar Rp 303.829 juta, meningkat sebesar Rp 53.435 juta atau 21,34% dibandingkan dengan tahun 1999 yaitu sebesar Rp 250.394 juta. Kenaikan tersebut terdiri dari :

- Kenaikan beban penjualan sebesar Rp 43.270 juta atau 30,55% yang disebabkan terutama oleh adanya peningkatan biaya promosi, propaganda dan pemasaran sebesar Rp 24.940 juta atau 39,73% dan peningkatan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 8.331 juta atau 15,52%.
- Kenaikan beban umum & administrasi sebesar Rp 10.165 juta atau 9,34% yang disebabkan terutama oleh adanya peningkatan beban penyusutan sebesar Rp 3.077 juta atau 66,68% yaitu akibat adanya penambahan aktiva tetap yang berasal dari selisih penilaian kembali aktiva tetap dan kenaikan biaya jasa profesional sebesar Rp 2.570 juta atau 884,83% yaitu sehubungan dengan proses Penawaran Umum Perseroan.

Tahun buku 1999 dibandingkan tahun buku 1998

Beban usaha tahun 1999 adalah sebesar Rp 250.394 juta, meningkat sebesar Rp 81.717 juta atau 48,45% dibandingkan dengan tahun 1998 yaitu sebesar Rp 168.677 juta. Kenaikan tersebut terdiri dari :

- Kenaikan beban penjualan sebesar Rp 41.648 juta atau 41,66% yang disebabkan antara lain oleh adanya peningkatan biaya promosi, propaganda dan pemasaran sebesar Rp 23.767 juta atau 60,85% dan peningkatan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 11.382 juta atau 26,32% disebabkan oleh adanya biaya untuk pegawai Program Pensiun Dini (PPD) dan Penghentian Kerja Sukarela (PKS) sekitar Rp 25 miliar dan kenaikan tantiem dan gratifikasi.
- Kenaikan beban umum & administrasi sebesar Rp 40.069 juta atau 58,32% yang disebabkan adanya peningkatan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 26.986 juta atau 77,87% sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf diatas.

2.1.5. Laba Usaha

Tahun buku 2000 dibandingkan tahun buku 1999

Laba usaha tahun 2000 adalah sebesar Rp 249.922 juta, meningkat Rp 147.077 juta atau 143,00% dibandingkan dengan tahun 1999 yaitu sebesar Rp 102.845 juta. Rasio laba usaha terhadap penjualan bersih Perseroan untuk tahun 2000 dan 1999 sebesar 16,47% dan 9,71%. Peningkatan laba usaha terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih.

Tahun buku 1999 dibandingkan tahun buku 1998

Laba usaha tahun 1999 adalah sebesar Rp 102.845 juta meningkat Rp 12.323 juta atau 13,61% dibandingkan dengan tahun 1998 sebesar Rp 90.522 juta. Rasio laba usaha terhadap penjualan bersih Perseroan untuk tahun 1999 dan 1998 sebesar 9,71% dan 11,55%. Peningkatan laba usaha terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih sedangkan penurunan rasio disebabkan adanya program PPD dan PKS sebagaimana disebut dalam paragraf penjelasan beban usaha.

2.1.6. Penghasilan (Beban) Lain-lain

Tahun buku 2000 dibandingkan tahun buku 1999

Penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun 2000 adalah sebesar Rp (8.251) juta mengalami penurunan sebesar Rp 42.471 juta dibandingkan dengan tahun 1999 yaitu sebesar Rp 34.220 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh:

- Penurunan hasil investasi sebesar Rp 36.705 juta atau 70,89%, yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga deposito berjangka sebesar Rp 33.669 juta atau 69,59% akibat penurunan penempatan deposito berjangka.
- Penurunan nilai aktiva tetap dan biaya eksplorasi dan pengembangan sebesar Rp 9.536 juta.

Tahun buku 1999 dibandingkan tahun buku 1998

Penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun 1999 adalah sebesar Rp 34.220 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 27.320 juta atau 395,94% dibandingkan dengan tahun 1998 sebesar Rp 6.900 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan hasil investasi sebesar Rp 14.293 juta atau 38,13% yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga deposito berjangka sebesar Rp 18.910 juta atau 64,16% akibat kenaikan penempatan deposito berjangka.
- Kenaikan dari keuntungan kurs mata uang asing sebesar Rp 5.783 juta atau 150,22%.
- Penurunan beban bunga dan provisi sebesar Rp 2.491 juta atau 7,86% sehubungan dengan pelunasan hutang bank.

2.1.7. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 241.671 juta, sedangkan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat. Laba sebelum pajak tahun 1999 adalah sebesar Rp 137.064 juta, sedangkan laba sebelum pajak pada tahun 1998 sebesar Rp 97.422 juta.

Laba sebelum pajak tahun 2000 meningkat sebesar Rp 104.607 juta atau 76,3% dibandingkan laba sebelum pajak tahun 1999. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai penjualan sebesar Rp 458.039 juta sedangkan peningkatan beban pokok penjualan dan beban usaha hanya meningkat sebesar Rp 257.526 juta dan Rp 53.435 juta. Penurunan pendapatan dan beban lain-lain sebesar Rp 42.470 juta atau 124,1%, dan penurunan ini disebabkan oleh penurunan hasil investasi sebesar 70,89% dan penurunan aktiva dan biaya eksplorasi dan pengembangan.

Laba sebelum pajak tahun 1999 meningkat Rp 39.642 juta atau 40,7% dibandingkan laba sebelum pajak tahun 1998. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai penjualan sebesar Rp 275.430 juta, sedangkan peningkatan beban pokok penjualan dan beban usaha sebesar Rp 181.390 juta dan Rp 81.717 juta. Dan kenaikan pendapatan dan beban lain-lain sebesar Rp 27.319 juta, kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan hasil investasi sebesar Rp 18.910 juta, keuntungan kurs sebesar Rp 5.783 juta dan penurunan beban bunga dan provisi sebesar Rp 2.491 juta.

2.1.8. Laba Bersih

Laba bersih merupakan laba sebelum pajak setelah dikurangi dengan beban pajak. Beban pajak untuk tahun 2000, 1999 dan 1998 masing-masing adalah sebesar Rp 71.852 juta, Rp 38.818 juta dan Rp 26.522 juta.

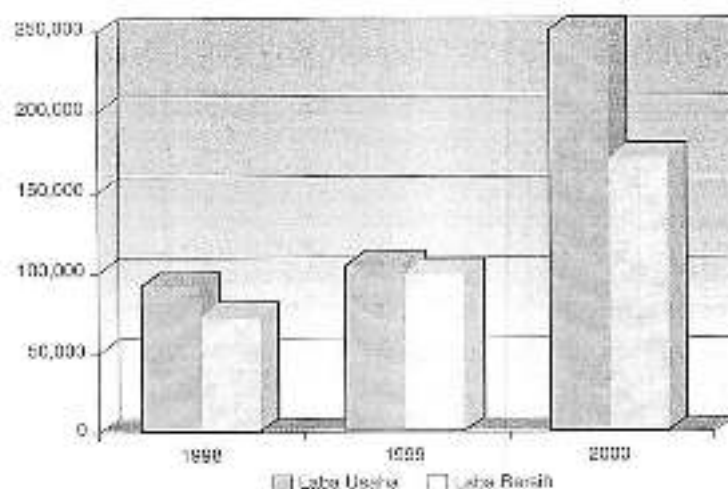
Tahun buku 2000 dibandingkan tahun buku 1999

Laba bersih tahun 2000 adalah sebesar Rp 169.819 juta, meningkat sebesar Rp 71.537 juta atau 72,85% dibandingkan dengan tahun 1999 yaitu sebesar Rp 98.246 juta. Terutama disebabkan peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp 104.607 juta atau 76,3% dikurangi peningkatan beban pajak sebesar Rp 33.304 juta.

Tahun buku 1999 dibandingkan tahun buku 1998

Laba bersih tahun 1999 adalah sebesar Rp 98.246 juta, meningkat sebesar Rp 27.376 juta atau 38,63% dibandingkan dengan tahun 1998 yaitu sebesar Rp 70.870 juta. Terutama disebabkan peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp 39.642 juta atau 40,6% dikurangi peningkatan beban pajak sebesar Rp 12.266 juta.

Grafik Pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih
Periode yang berakhir 31 Desember 1998, 1999 dan 2000



2.2. Pertumbuhan Jumlah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

Pertumbuhan jumlah aktiva, kewajiban dan ekuitas Perseroan adalah :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2000	1999	1998
Aktiva	964.462	704.124	662.955
Kewajiban	424.485	454.174	487.842
Ekuitas	539.977	249.950	175.113

31 Desember 2000 dibandingkan dengan 31 Desember 1999

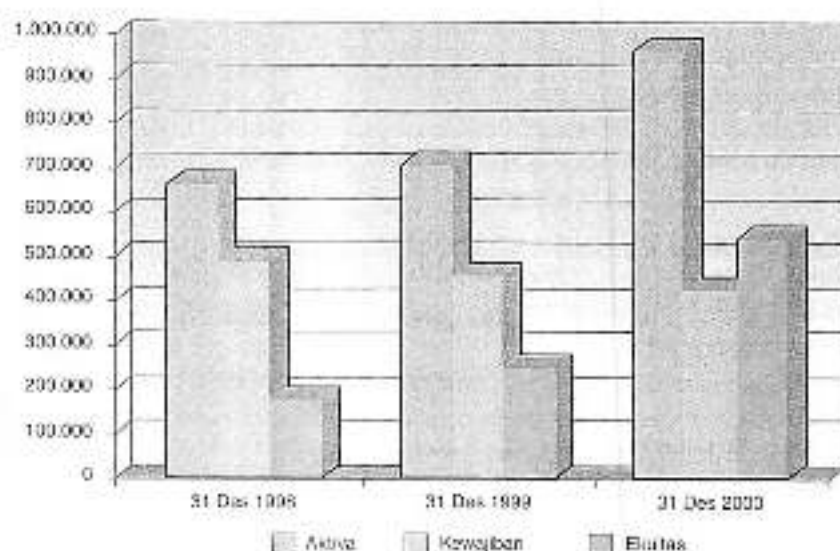
Posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2000 masing-masing adalah sebesar Rp 964.462 juta, Rp 424.485 juta dan Rp 539.977 juta. Bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 1999 maka terdapat kenaikan aktiva dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 260.339 juta dan Rp 290.027 juta serta penurunan kewajiban sebesar Rp 29.688 juta. Peningkatan aktiva terutama disebabkan oleh penambahan aktiva tetap yang berasal dari selisih

penilaian kembali aktiva tetap, peningkatan piutang usaha dengan pihak ketiga dan adanya kenaikan deposito berjangka. Kewajiban Perseroan menurun sebesar Rp 29.688 juta yang terutama disebabkan adanya pelunasan pinjaman dana Pemerintah pada tahun 2000. Sedangkan peningkatan ekuitas terutama disebabkan adanya selisih hasil penilaian kembali aktiva yang dikapitalisasi ke modal disetor dan peningkatan saldo laba.

31 Desember 1999 dibandingkan dengan 31 Desember 1998

Posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas Perseroan per 31 Desember 1999 masing-masing adalah sebesar Rp 704.124 juta, Rp 454.174 juta dan Rp 249.950 juta. Bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 1998 maka terdapat kenaikan aktiva dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 41.169 juta dan Rp 74.837 juta serta penurunan kewajiban sebesar Rp 33.668 juta. Peningkatan aktiva terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, nilai persediaan dan piutang lain-lain yang sebagian besar merupakan piutang dana subsidi. Kewajiban Perseroan menurun yang terutama disebabkan adanya penurunan hutang usaha. Sedangkan peningkatan ekuitas disebabkan adanya peningkatan saldo laba.

Grafik Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
Per 31 Desember 1998, 31 Desember 1999 dan 31 Desember 2000



2.3. Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas dan Sumber Dana

2.3.1. Likuiditas

Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar, yaitu perbandingan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 memiliki rasio lancar sebesar 1,53 kali, 1,32 kali dan 1,53 kali

2.3.2. Solvabilitas

Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah aktiva dengan jumlah hutang dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban jangka

pendek maupun jangka panjang pada saat jatuh tempo. Solvabilitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 adalah 2,27 kali, 1,55 kali dan 1,36 kali.

2.3.3. Rentabilitas

Rentabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin), Imbal Hasil Investasi (Return On Assets) dan Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu periode tertentu.

- Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan bersih Perseroan
- Imbal Hasil Investasi (Return On Assets) adalah rasio dari perputaran aktiva dalam menghasilkan laba
- Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas.

Uraian	2000	1999	1998
Net Profit Margin	11,19%	9,27%	9,04%
Return On Assets	17,61%	13,95%	10,70%
Return On Equity	31,45%	39,31%	40,47%

2.4. Sumber Dana

Arus kas dari hasil operasi Perseroan meningkat yaitu dari Rp (60.760) juta pada tahun 1999 menjadi Rp 138.844 juta pada tahun 2000. Arus kas ini merupakan sumber pendanaan yang penting bagi rencana pengembangan Perseroan. Berikut adalah ikhtisar dari arus kas Perseroan:

Arus Kas Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Arus Kas	31 Desember		
	2000	1999	1998
Operasi	138.844	(60.760)	144.699
Investasi	(62.906)	30.155	27.831
Pembiayaan	(85.891)	(45.495)	83.540

3. PROSPEK USAHA

Manajemen berpendapat bahwa peluang usaha untuk industri farmasi di Indonesia masih terbuka lebar, terutama bagi Perseroan. Manajemen memperkirakan bahwa tingkat konsumsi obat-obatan perkapita Indonesia yang pada 31 Desember 1999 mencapai US\$3,88 masih tergolong relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya, namun memiliki peluang untuk meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia. Di samping itu, jumlah penduduk Indonesia yang relatif besar yaitu sebesar 207 juta, akan tetap merupakan pasar yang sangat potensial untuk produk Perseroan di masa depan.

Manajemen berkeyakinan bahwa dengan ditunjang oleh strategi usaha yang tepat di bidang produksi, industri, perdagangan, distribusi dan pelayanan di bidang kesehatan, Perseroan akan mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada untuk memperbesar pangsa pasar dan mempertahankan

posisinya sebagai salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pertumbuhan yang intensif melalui:
 - Peningkatan kapasitas produksi, sarana dan prasarana
 - Peningkatan cakupan pasar Perseroan
 - Peningkatan diversifikasi produk
 - Memperkuat posisi distribusi dengan menambah Prinsipal baru
 - Peningkatan aktivitas pemasaran
2. Terus melaksanakan efisiensi biaya untuk membuat posisi Perseroan tetap kompetitif di lingkungan industri farmasi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan wawasan dan keterampilan serta penyempurnaan jenjang karir dan sistem imbal jasa
4. Meningkatkan sistem informasi melalui teknologi informasi yang terintegrasi

Dalam penjualan Obat Generik Perseroan tidak bergantung pada subsidi Pemerintah, karena subsidi impor bahan baku yang diberikan oleh Pemerintah merupakan konsekuensi kebijakan menetapkan harga jual Obat Generik berdasarkan kurs yang ditetapkan Pemerintah dibawah kurs pasar. Apabila Pemerintah tidak memberikan subsidi impor bahan baku Obat Generik, maka harga jual Obat Generik akan ditetapkan berdasarkan kurs pasar, sehingga Perseroan dapat mempertahankan margin keuntungannya.

4. DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR VALUTA ASING

Pada tanggal 31 Desember 2000, jumlah aktiva moneter bersih Perseroan dalam beberapa mata uang asing setara dengan Rp 5.810 juta yang hampir keseluruhan merupakan transaksi perdagangan. Untuk mengurangi kerugian akibat dampak perubahan nilai tukar mata uang asing, Perseroan telah melakukan upaya-upaya antara lain menyimpan hasil pendapatan ekspor dalam rekening US\$.

Bahan baku yang dipergunakan Perseroan diimpor/dibeli di pasar internasional dengan mempergunakan mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan.

5. PENYEDIAAN BAHAN BAKU

Penyediaan bahan baku merupakan salah satu kegiatan yang tidak kalah penting dengan kegiatan Perseroan lainnya. Untuk menjamin adanya kesinambungan penyediaan bahan baku, Manajemen telah menerapkan kebijakan untuk tidak bergantung pada satu pemasok. Dan sampai saat ini Perseroan belum pernah mengalami kesulitan pasokan bahan baku utama.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan bahan baku, Manajemen telah menerapkan sistem informasi, yang mampu memantau keperluan bahan baku.

6. PEMASARAN

Dalam industri farmasi yang sangat kompetitif ini, Manajemen menyadari bahwa penerapan strategi pemasaran yang tepat dan terarah akan mampu meningkatkan daya saing, serta memberikan dampak yang positif terhadap penjualan produk Perseroan. Manajemen telah menerapkan sistem

perencanaan pemasaran yang terkoordinasi dengan melibatkan seluruh unit usaha terkait seperti produksi, distribusi dan apotek melalui proses pengkajian yang mendalam..

Manajemen merencanakan untuk meningkatkan kegiatan promosi Obat OTC, melalui iklan di media cetak, audio visual dan menambah tenaga OTC Representative dalam upaya meningkatkan penjualan produk-produk unggulan yang dimiliki oleh Perseroan. Di samping itu, pemasaran Obat Ethical kepada para provider seperti dokter dan rumah sakit, akan ditingkatkan antara lain melalui penambahan tenaga Medical Representative.

7. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Manajemen juga menaruh perhatian yang besar terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dalam upaya menunjang program industri berwawasan lingkungan hidup. Perseroan secara konsisten telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh komisi Amdal dan Ditjen Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk unit produksi formulasi dan manufaktur sehubungan dengan sistem pengolahan limbah hasil produksi.

Selain itu unit produksi Perseroan telah memperoleh ISO 14001 dan Sahwali Award untuk kepedulian terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan pengelolaan limbah.

Dalam kegiatan produksinya Perseroan menghasilkan 4 3 macam limbah yaitu: limbah cair, limbah padat, dan limbah gas.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Berkaitan dengan hal ini, Perseroan berupaya meminimalkan risiko dengan melakukan pengamatan yang seksama terhadap risiko tersebut. Menurut manajemen, risiko-risiko usaha yang mungkin dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RISIKO PERUBAHAN MATA UANG DEPRESIASI NILAI RUPIAH TERHADAP VALUTA ASING

Sebagian besar bahan baku obat Perseroan diimpor, sedangkan pendapatan Perseroan saat ini sebagian besar dalam mata uang Rupiah. Terdapat kemungkinan bahwa nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing akan mengalami depresiasi sehingga akan meningkatkan harga pokok penjualan produk Perseroan dan hal ini akan mempengaruhi kinerja usaha Perseroan.

2. RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU

Bahan baku obat Perseroan terutama berasal dari pihak ketiga baik lokal maupun impor. Keterlambatan dalam pengiriman, kesulitan melakukan pembelian bahan baku serta kebijakan Pemerintah mengenai impor, dapat berpengaruh pada kelangsungan pasokan bahan baku dan produksi obat Perseroan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan.

3. RISIKO PEREKONOMIAN

Kondisi perusahaan farmasi sensitif terhadap perubahan perekonomian baik nasional maupun internasional. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti menurunnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

4. RISIKO PERSAINGAN USAHA

Di industri farmasi tidak terdapat perusahaan yang memiliki pangsa pasar dominan. Pesaing Perseroan berusaha meningkatkan pangsa pasar dengan mengeluarkan produk baru serta memperbaharui produk lama. Munculnya pesaing baru mungkin akan mengakibatkan pangsa pasar Perseroan berkurang dan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

5. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Kegiatan usaha di bidang farmasi merupakan bidang kegiatan usaha yang diatur secara ketat oleh Pemerintah. Perubahan peraturan baik dari Pemerintah maupun instansi terkait dapat mempengaruhi penjualan dan keuntungan Perseroan. Disamping itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Otonomi Daerah juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

6. RISIKO KEGAGALAN PENGEMBANGAN USAHA (INVESTASI)

Dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan penjualannya, Perseroan secara berkesinambungan memasarkan produk baru kepada masyarakat. Dalam hubungan ini kegagalan yang terjadi dalam pemasaran produk baru Perseroan dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif terhadap pendapatan Perseroan. Selain itu Perseroan merencanakan untuk menambah sumur Yodium

sehingga kegagalan dalam memperoleh sumur Yodium baru yang mampu memproduksi secara ekonomis akan membebani keuangan Perseroan.

7. RISIKO PEMALSUAN OBAT

Saat ini banyak beredar produk farmasi yang dipalsukan di Indonesia. Produk-produk palsu tersebut seringkali memiliki bentuk fisik yang sangat mirip dengan produk aslinya, tetapi memiliki komposisi yang berbeda dan kualitasnya jauh di bawah persyaratan. Semakin banyaknya obat palsu yang beredar di pasaran akan menyebabkan turunnya kepercayaan konsumen. Apabila pemalsuan ini dilakukan terhadap produk-produk Perseroan maka akan berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

8. RISIKO PRODUK RUSAK

Produk yang telah beredar di pasaran dapat mengalami kerusakan, hal ini dapat disebabkan antara lain oleh distribusi yang kurang baik atau sebab-sebab lain diluar kemampuan Perseroan. Produk rusak ini dapat menimbulkan klaim dari konsumen.

9. RISIKO PEMOGOKAN KARYAWAN

Karyawan merupakan salah satu aset yang penting bagi Perseroan. Walaupun Perseroan memperhatikan kesejahteraan karyawan, pemogokan massal karyawan masih mungkin terjadi yang dapat menghambat kegiatan usaha Perseroan.

10. RISIKO DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam kegiatan produksinya, Perseroan menghasilkan limbah produksi berbentuk padat, cair dan gas. Perseroan telah melakukan pengelolaan limbah produksi dengan baik tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri tersebut sehingga dapat memberikan risiko tuntutan hukum bagi Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang cukup berarti dan relevan untuk diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1969 tanggal 23 Januari 1969 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma disingkat PN Farmasi Kimia Farma, suatu perusahaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.1 Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara yang termuat dalam Lembaran Negara No. 59 Tahun 1960. PN Farmasi Kimia Farma merupakan peleburan dari:

- a. Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 90 Tahun 1961
- b. Perusahaan Negara Farmasi Alat Kesehatan Radja Farma yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 102 Tahun 1961
- c. Perusahaan Negara Sari Husada yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1961
- d. Perusahaan Negara Farmasi Alat Kesehatan Nakula Farma yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 105 Tahun 1961
- e. Perusahaan Negara Farmasi Alat Kesehatan Bhinneka Kina Farma yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1961 yang termuat dalam Lembaran Negara No. 106 Tahun 1961

Pada tahun 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1971 tanggal 19 Maret 1971 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 1971, ditetapkan untuk dilakukan pengalihan bentuk PN Farmasi Kimia Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2.3 Undang-Undang No. 9 tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang

Perseroan didirikan menjadi suatu Persero dengan nama PT Kimia Farma (Persero) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 16 Agustus 1971 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 18 tanggal 11 Oktober 1971, yang keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Ketetapan No. J.A.5/184/21 tanggal 14 Oktober 1971, dan didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2888 dan No. 2889 tanggal 20 Oktober 1971 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 9 Nopember 1971, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 508.

Pada tahun 1987, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 2 Maret 1987, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 23 tanggal 28 Juli 1987, yang keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan atas seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-6075.HT.01.04.TH'87 tanggal 23 September 1987, dan didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2693/1987 dan No. 2694/1987 tanggal 23 Desember 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 23 Pebruari 1988, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 219.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 16 Januari 1998, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2758/HT.01.04.TH.98 tanggal 30 Maret 1998, dan Laporan Data Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di Departemen Kehakiman di bawah No. C2-HT.01.04-A.2389 tanggal 30 Maret 1998 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. 2324/BH.09.05/VI/98 tanggal 15 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 1998, Tambahan No.5281 dilakukan perubahan atas seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan kegiatan Penawaran Umum Perdana, seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan diubah sebagaimana dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 22, tanggal 14 September 2000 yang dibuat dihadapan Wahjono Hardjo, SH, pada waktu itu pengganti Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. C-20834/HT.01.04 - TH.2000 tanggal 19 September 2000 dan Data Perubahan Anggaran Dasar sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang - Undangan Republik Indonesia dimaksud diatas serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. 2122/RUB.09.05/X/2000 tanggal 4 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 2000 Tambahan No. 7758, , juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 27 April 2001 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C 00458/HT.01.04.TH2001 tanggal 1 Mei 2001.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya kegiatan usaha di bidang industri kimia, farmasi, biologi dan kesehatan serta industri makanan dan minuman dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1971

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 16 Agustus 1971 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 18 tanggal 11 Oktober 1971, yang keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Ketetapan No. J.A.5/184/21 tanggal 14 Oktober 1971, dan didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2888 dan No.2889 tanggal 20 Oktober 1971 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 9 Nopember 1971, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 508. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1971, modal Perseroan berasal dari kekayaan negara yang terlanam sebagai modal pada PN Farmasi Kimia Farma sampai saat pembubarannya. Susunan modal saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	900 saham prioritas 3.600 saham biasa	4.500.000.000	
Modal Ditempatkan	900 saham prioritas 2.600 saham biasa	3.500.000.000	
Modal Disetor	900 saham prioritas 2.600 saham biasa	3.500.000.000	
Negara Republik Indonesia	900 saham prioritas 2.599 saham biasa	3.499.000.000	99,97
Drs. Soekarjo	1 saham biasa	1.000.000	0,03
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	900 saham prioritas 2.600 saham biasa	3.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000 saham biasa	1.000.000.000	

Berdasarkan Akta Penjualan Dan Pembelian Serta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Atas Saham No. 19 tanggal 16 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan penjualan, pemindahan dan penyerahan 1 (satu) saham biasa Perseroan yang dimiliki Drs. Soekarjo kepada Negara Republik Indonesia.

Sehingga akibat penjualan, pemindahan dan penyerahan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	900 saham prioritas 3.600 saham biasa	4.500.000.000	
Modal Ditempatkan	900 saham prioritas 2.600 saham biasa	3.500.000.000	
Modal Disetor	900 saham prioritas 2.600 saham biasa	3.500.000.000	
Negara Republik Indonesia	900 saham prioritas 2.600 saham biasa	3.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	900 saham prioritas 2.600 saham biasa	3.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000 saham biasa	1.000.000.000	

Tahun 1987

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 2 Maret 1987, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 23 tanggal 28 Juli 1987, yang keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-6075.HT.01.04.TH'87 tanggal 23 September 1987, dan didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2693/1987 dan No. 2694/1987 tanggal 23 Desember 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 23 Pebruari 1988, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 219, pemegang saham Perseroan menyetujui:

- Meningkatkan Modal Dasar dari Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah);

- b. Peningkatan Modal Ditempatkan dari Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar Rupiah);
- c. Peningkatan Modal Disetor dari Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah); yang kemudian ditingkatkan kembali menjadi Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar Rupiah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-1563/MK.013/1990 tanggal 30 Nopember 1990.
- d. Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Penyeteroran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara kapitalisasi dana penyertaan modal pemerintah dan pemindahan dana selisih Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-1/MK.011/1987 tanggal 2 Januari 1987.

Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta perubahan nominal saham Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	700 saham prioritas 2.800 saham biasa	35.000.000.000	
Modal Ditempatkan	700 saham prioritas 1.600 saham biasa	23.000.000.000	
Modal Disetor	700 saham prioritas 1.600 saham biasa	23.000.000.000	
Negara Republik Indonesia	700 saham prioritas 1.600 saham biasa	23.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	700 saham prioritas 1.600 saham biasa	23.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.200 saham biasa	12.000.000.000	

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 18 tanggal 16 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2759/HT.01.04.TH.98 tanggal 30 Maret 1998, dan Laporan Data Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di Departemen Kehakiman di bawah No. C2-HT.01.04-A.2389 tanggal 30 Maret 1998 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. 2324/BH.09.05/VI/98 tanggal 15 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 1998, Tambahan No. 5281, pemegang saham Perseroan menyetujui:

- a. Meningkatkan Modal Dasar dari Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah);
- b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar Rupiah) menjadi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
- c. Perubahan nilai nominal saham dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- d. Meniadakan saham prioritas dalam anggaran dasar.

Penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara kapitalisasi cadangan umum sampai dengan tahun 1996 dan selisih revaluasi aset Perseroan.

Dengan adanya perubahan-perubahan sebagaimana tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan	100.000	100.000.000.000	
Modal Disetor	100.000	100.000.000.000	
Negara Republik Indonesia	100.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	300.000	300.000.000.000	

Tahun 2000

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 22 tanggal 14 September 2000 yang dibuat di hadapan Wahjono Hardjo, SH, pada waktu itu pengganti Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. C-20934 HT.01.04 – TH.2000 tanggal 19 September 2000 dan Data Perubahan Anggaran Dasar sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang - Undangan Republik Indonesia dimaksud diatas serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. 2122/ RUB.09.05/X/2000 tanggal 4 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 2000 Tambahan No. 7759 pemegang saham Perseroan menyetujui:

- Meningkatkan Modal Dasar dari Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah);
- Peningkatan Modal Ditempatkan dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp 375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah);
- Peningkatan Modal Disetor dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi 375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah);
- Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus Rupiah)
- Membagi 2 (dua) jenis seri saham yaitu saham seri A Dwiwarna dan saham seri B.

Penyetoran atas penyertaan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara kapitalisasi selisih revaluasi aktiva tetap dan kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2000 tanggal 21 Agustus 2000.

Dengan adanya perubahan-perubahan sebagaimana tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan	750.000.000	375.000.000.000	
Modal Disetor	750.000.000	375.000.000.000	
Negara Republik Indonesia			
- Seri A Dwiwarna	1	500	0,01
- Seri B	749.999.999	374.999.999.500	99,99
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	375.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portofolio	2.250.000.000	1.125.000.000.000	

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 27 April 2001 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C 00458/HT.01.04.TH2001 tanggal 1 Mei 2001, pemegang saham Perseroan menyetujui:

- Perubahan nilai nominal saham dari Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp 100 (seratus Rupiah) per saham
- Meningkatkan Modal Dasar dari Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
- Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Rp 375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);

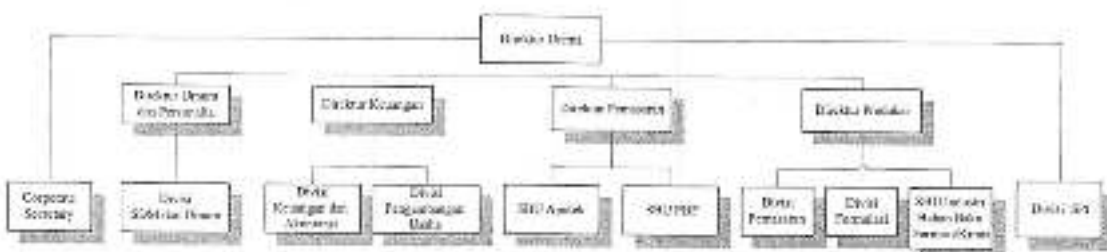
Penyetoran atas penyertaan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara kapitalisasi saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tahun 2000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2001 tanggal 25 April 2001.

Dengan adanya perubahan-perubahan sebagaimana tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
Modal Disetor			
Negara Republik Indonesia			
- Seri A Dwiwarna	1	100	0,01
- Seri B	4.999.999.999	499.999.999.900	99,99
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portofolio	15.000.000.000	1.500.000.000.000	

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan SK Direksi No.KEP.23/DIR/II/1998 tanggal 24 Februari 1998 juncto No.KEP.96/HUK/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 juncto No.KEP.09/HUK/I/2001 tanggal 10 Januari 2001, struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan pasal 11 Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 22 tanggal 14 September 2000 dinyatakan bahwa Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) direktur, seorang diantaranya menjabat sebagai direktur utama. Para anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Berdasarkan pasal 16 Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.22 tanggal 14 September 2000, komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota komisaris, seorang diantaranya menjabat sebagai komisaris utama. Para anggota komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.KEP-207/M-PBUMN/1999 tanggal 2 September 1999 susunan anggota komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Dr. E. Sutarto
Komisaris	: Prof. DR. Azrul Azwar
Komisaris	: Prof. DR.M. Ryaas Rasjid, MA
Komisaris	: Rujito, SE

Berdasarkan Surat Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. S-07/MDU7-PM.PBUMN/2000 tanggal 20 Maret 2000, disetujui permohonan pengunduran diri Rujito, SE dari jabatannya sebagai komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2000.

Dengan adanya pengunduran diri tersebut, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Dr. E. Sutarto
 Komisaris : Prof. DR. Azrul Azwar
 Komisaris : Prof. DR. M. Ryaas Rasjid, MA

Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.466/KMK.016/1997 tanggal 10 September 1997, susunan anggota direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Drs. Darodjatun, MBA
 Direktur Pemasaran : Drs. Tatong Suryanto
 Direktur Produksi : Drs. Syarif Bastaman
 Direktur Keuangan : Drs. Nugroho Widjajanto
 Direktur Umum dan Personalia : Drs. Saleh Rasidi

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota komisaris dan direksi Perseroan:

Komisaris :



Dr. E. Sutarto (59 tahun)
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan sebagai dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1967 dan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan mendapatkan gelar SKM pada tahun 1976. Memulai kariernya di Kodam V/Jaya sebagai dokter Staf Kodam V/Jaya (1968). Selain itu berurut-turut pernah menjabat sebagai dokter pribadi Menhankam (1983), Kakanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur (1989-1996), Kakanwil Departemen Kesehatan propinsi DKI Jakarta (1996-1998), Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan (1998) dan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan (1998-sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1999.



Prof. DR. Azrul Azwar (55 tahun)
Komisaris

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan sebagai dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1972. Pada tahun 1977 mendapatkan gelar MPH dari School of Public Health University of Hawaii. Mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 1996. Memulai kariernya di Universitas Indonesia sebagai Asisten Ahli Madya (1975-1977). Menjabat sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Kedokteran Komunitas sejak tahun 1997 dan sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat di Departemen Kesehatan RI sejak tahun 1998. Pada tahun 1999 diangkat sebagai Komisaris Perseroan hingga sekarang.



Prof. DR. M. Ryaas Rasjid, MA (51 tahun)
Komisaris

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan pada Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Nothem University, Illinois, Amerika Serikat serta University of Hawaii, Amerika Serikat, dengan mendapatkan gelar masing masing sebagai Sarjana Ilmu Politik, Pasca Sarjana maupun Doktor, Jurusan Ilmu Politik pada tahun 1977, 1988 dan 1994. Memulai kariernya sebagai Mantri Polisi di Kecamatan Mariso, Ujung Pandang (1972). Selain itu berturut-turut pernah menjabat sebagai Lurah Melayu, Ujung Pandang (1972-1975), Wakil Kepala Sub Dinas Pajak, Ujung Pandang (1978), Dosen Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) merangkap Konsultan Bidang Politik pada LITBANG Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) (1982-1986), Dosen IIP merangkap Staf Khusus IRJEN DEPDAGRI (1984-1986), Dosen IIP merangkap Ketua Tim Penulis Pidato Menteri Dalam Negeri (1984-1986), Dosen IIP merangkap Staf Khusus Inspektur Jendral DEPDAGRI (1988-1990), Kepala LLM-IIP (1988-1989), Kepala Puslit IIP (1989-1994) dan Rektor IIP (1996-1998). Sebagai Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah merangkap Plh. Sekretaris Jenderal DEPDAGRI (1 Juli 1998-Oktober 2000), Menteri Negara Otonomi Daerah (26 Oktober 1999-23 Agustus 2000) dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (23 Agustus 2000-Januari 2001). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1999.

Direksi :



Drs. Darodjatun, MBA (57 tahun)
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan apoteker di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1971 dan mengikuti Post Graduate Specialization di State University of Ghent, Belgia pada tahun 1976. Gelar Master of Business Administration diperoleh pada tahun 1991 dari European University, Belgia. Memulai kariernya di Apotek Jakarta, Bandung sebagai Asisten Apoteker (1963-1969), Supervisor Medical Representative (1969-1970), Sales Manager, IPACO (1971-1972), Quality Control and Production Development Manager di Kenrose Indonesia (1972-1974), Sales Promotion Manager, Marketing Manager di Faritex (1974-1976), Factory Manager di Kenrose Indonesia (1976-1978) dan Factory Director di Organon Indonesia (1978-1988). Sebelum bergabung dengan Perseroan, menjabat sebagai Direktur Utama PT Biolama (1988-1998). Selain itu saat ini masih sebagai tenaga pengajar tidak tetap di Fakultas Farmasi, Universitas Pancasila, Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1997 sampai sekarang.



Drs. Tatong Suryanto (55 tahun)
Direktur Pemasaran

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan pada Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan mendapatkan gelar Apoteker pada tahun 1971. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1971. Selanjutnya di Perseroan menjabat sebagai Kepala Apotek No. 31 Tanjung Pinang (1972-1977), Kepala Apotek No. 21 Yogyakarta (1977-1981), Kepala Bagian Sektor Pemerintah Jakarta (1982-1982), Stai Kuasa Direksi Perdagangan Rutin Jakarta (1982-1983), Kepala Apotek No. 1 Jakarta (1983-1983), Kepala Pedagang Besar Farmasi (PBF) Jakarta (1983-1986), Kepala PBF Palembang (1986-1988), Manager Unit Pemasaran Daerah Sumatera Bagian Selatan (1988-1991) dan General Manager Divisi PBF (1991-1992). Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak tahun 1992 sampai sekarang.



Drs. Syarif Bastaman (56 tahun)
Direktur Produksi

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan pada Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan mendapatkan gelar Apoteker pada tahun 1971. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1971 dan diangkat sebagai Kepala Apotek No. 30 Tebing Tinggi pada bulan April 1972. Selanjutnya di Perseroan berturut-turut menjabat sebagai Kepala Apotek No. 28 Belawan (1976), Kepala Bagian Pabrik Farmasi Tanjung Morawa Medan (1977-1982), Koordinator Promosi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau, Manager Pabrik Farmasi Tanjung Morawa Medan (1982-1984), Manager Produksi Unit Produksi Jakarta (1984-1989), General Manager Divisi Formulasi tahun 1989, General Manager Divisi Pemasaran (1990-1991), General Manager Divisi Formulasi (1991). Menjabat sebagai Direktur Produksi Perseroan sejak tahun 1992 sampai sekarang.



Drs. Nugroho Widjanto (48 tahun)
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan pada Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan, dengan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1980. Memulai kariernya pada tahun 1975 sebagai ajun akuntan di Dit.Jend. Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan. Setelah menyelesaikan jenjang sarjana, kemudian berdinis di Dit.Jend. Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan. Menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Tanaman Pangan pada tahun 1987. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Seksi Analisis Anak Perusahaan Dit. Perusahaan Industri, Dit. Jend. Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Departemen Keuangan (1992-1995), Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perusahaan Dit. Jasa Keuangan Dit.Jend. Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan (1995-1996), Kepala Sub Direktorat

Pengembangan Usaha Dit. Perusahaan Industri Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan (1996-1997). Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 1997 sampai sekarang.



Drs. Saleh Rasidi (50 tahun)
Direktur Umum dan Personalia

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dengan mendapatkan gelar Apoteker pada tahun 1978. Memulai kariernya di PT Nusa Ampara Indah (1978-1980). Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1980 sebagai penanggung jawab narkotika di Divisi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Manado. Selanjutnya menjabat di Perseroan berturut-turut sebagai Kepala Apotek No. 28 Belawan (1982-1985), Kepala Apotek No. 38 Ujung Pandang (1985-1988), Kepala Apotek No. 37 Banda Aceh (1988-1989), Pimpinan PBF Semarang (1989-1990), Manager Unit Perapotekan/PBF Sumatera Bagian Selatan (1991-1993), General Manager Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) (1993-1996), Kepala Divisi Perencanaan Pengendalian Produksi Manufaktur (1996-1997). Menjabat sebagai Direktur Umum dan Personalia Perseroan sejak tahun 1997 sampai sekarang.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen menyadari pentingnya peran sumber daya manusia sebagai asset dalam mendukung kelangsungan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik terutama dalam situasi persaingan usaha yang semakin ketat. Kebijakan Manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan pemerintah dalam hal ketenagakerjaan seperti tingkat upah yang diberikan berada di atas Upah Minimum Regional dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Dalam hal peningkatan produktivitas kerja, Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapat pendidikan dan pelatihan baik sebagai sarana penyegaran maupun sebagai tambahan keterampilan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam seminar, lokakarya atau kursus-kursus tertentu sesuai bidang tugasnya masing-masing baik di dalam maupun di luar negeri.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, Perseroan memiliki total karyawan tetap sebanyak 4.361 orang dan total karyawan tidak tetap sebanyak 789 orang di luar Direksi.

**Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
31 Desember 1997 - 31 Desember 2000**

Keterangan	Jumlah Karyawan			
	1997	1998	1999	2000
Pasca Sarjana (S2)	10	10	11	12
Sarjana Apoteker	281	271	273	310
Sarjana Lain-lain	190	190	201	198
Diploma (DS)	190	184	183	189
Analisis	108	111	109	100
SAA	1.139	1.139	1.164	1.158
SLTA	2.325	2.248	2.280	2.102
SLTP	614	565	549	445
SD	887	866	840	635
Jumlah	5.850	5.604	5.610	5.150

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan
31 Desember 1997 - 31 Desember 2000**

Keterangan	Jumlah Karyawan			
	1997	1998	1999	2000
Struktural				
Kepala Divisi/SBU	14	11	11	11
Kepala SubDivisi/Unit	30	30	33	32
Kepala Bagian/Cabang	275	281	278	279
Koordinator Teknik	628	600	597	506
Total Struktural	947	922	919	828
Non Struktural	4.903	4.682	4.691	4.322
Jumlah	5.850	5.604	5.610	5.150

Sedangkan komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia adalah sebagai berikut:

**Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia
31 Desember 1997 - 31 Desember 2000**

Keterangan	Jumlah Karyawan			
	1997	1998	1999	2000
20 tahun s/d 30 tahun	1.139	980	938	979
31 tahun s/d 40 tahun	2.539	2.451	2.395	2.235
41 tahun s/d 50 tahun	1.589	1.668	1.745	1.611
> 51 tahun	603	507	532	326
Jumlah	5.850	5.604	5.610	5.150

Pada tahun 2000 terjadi pengurangan jumlah karyawan yang sebagian besar disebabkan program pensiun dini dan pengakhiran kerja sukarela yang ditawarkan oleh Perseroan. Program ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Departemen Tenaga Kerja.

Tenaga Kerja Asing

Saat ini Perseroan mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing sebagai Konsultan Perseroan yaitu Mr. Eiji Ichikawa dengan No. IKTA 000 032/337 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2001 serta No. KITAS 2C2JD.1465.W yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2001.

Fasilitas, Tunjangan dan Sarana lainnya

Perseroan selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan karyawannya dari segi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan pemberian upah yang besarnya diatas Upah Minimum Regional yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan tetap, Perseroan menyediakan berbagai fasilitas, tunjangan dan sarana lainnya yaitu:

1. Jaminan Kesehatan (pengobatan dan perawatan)
2. Fasilitas rumah dinas dan kendaraan bagi jabatan tertentu
3. Tunjangan uang duka dan kematian serta pemberian bantuan bagi karyawan yang terkena musibah bencana alam
4. Rekreasi dan olahraga
5. Jamsostek (Asuransi Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Asuransi Kematian)
6. Hak pensiun bagi karyawan yang memenuhi syarat
7. Gratifikasi dari pembagian laba Perseroan
8. Tunjangan Kesejahteraan dan Hari Raya
9. Pakaian Dinas

Sedangkan untuk karyawan tidak tetap akan memperoleh seluruh fasilitas dan tunjangan kecuali jaminan kesehatan untuk anggota keluarga lain selain karyawan dan hak pensiun.

Dengan segala fasilitas tersebut, Perseroan berhasil menciptakan lapangan kerja yang baik dan aman bagi karyawannya. Sampai saat ini rata-rata masa kerja karyawan adalah 18 tahun.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan karyawan, Perseroan memiliki beberapa macam program pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar untuk membentuk sikap dan kepribadian yang harus dimiliki sebagai karyawan.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik.
3. Program asesment bagi jabatan struktural.

Adapun program pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan secara in-house training maupun dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan di luar perusahaan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Sejak 20 Oktober 2000, Perseroan mempekerjakan PT Booz Allen and Hamilton Indonesia sebagai konsultan Sumber Daya Manusia dan akan berakhir pada 20 Oktober 2001. Penunjukan ini merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan manajemen sumber dayanya sebagai suatu hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan Perseroan secara keseluruhan.

Dana Pensiun

Perseroan telah menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Kimia Farma yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan selaku pendiri Dana.

Pensiun Perseroan No. KEP.190/DIR/VIII/99 tanggal 30 Agustus 1999 Tentang Peraturan Dana Pensiun Perseroan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.KEP-023/KM.17/2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perseroan. Dana Pensiun Perseroan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Dana Pensiun pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Direktorat Dana Pensiun dibawah No. 00.01.00326.DPPK tanggal 31 Januari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 14 tanggal 18 Februari 2000, Tambahan No.8, dan Dana Pensiun telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Per tanggal 31 Desember 2000, jumlah peserta Dana Pensiun adalah 7.720 orang, yang terdiri dari peserta aktif/karyawan sejumlah 4.476 orang dan peserta pasif/pensiunan sejumlah 3.244 orang, termasuk 522 orang peserta pensiun ditunda.

Pembiayaan Dana Pensiun Perseroan berasal dari iuran peserta sebesar 6,50% dan Perseroan sebesar 13%. Perseroan akan membayar iuran tambahan, apabila terdapat kekurangan, yang besarnya sesuai dengan perhitungan aktuarial.

Sampai dengan 30 Juni 2000 kewajiban aktuarial Dana Pensiun Perseroan adalah sebesar Rp 75.262.121.513 dengan nilai wajar aktiva bersih sebesar Rp 66.991.901.513 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 8.270.220.000.

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ASOSIASI

6.1. PT Riasima Abadi Farma (Riasima)

6.1.1 Organisasi Perusahaan dan Keterangan Umum

6.1.1.1. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya.

PT Riasima Abadi Farma (selanjutnya disebut "Riasima"), berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Industri Kimia Farmasi Pertama Riasima Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.104 tanggal 28 Nopember 1979 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No.30 tanggal 10 Juni 1980, keduanya dibuat di hadapan Abdul Latief, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/325/20 tanggal 22 Desember 1980 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing di bawah No.309 dan No.310 tanggal 19 Januari 1981, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.19 tanggal 7 Maret 1986, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.288/1986.

Anggaran Dasar Riasima telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan yang terjadi adalah secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

- Akta Perubahan Anggaran Dasar No.19 tanggal 24 Januari 1981 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No.8 tanggal 9 Mei 1985, keduanya dibuat dihadapan Ali Harsojo, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3349.HT.01.04.TH.85 tanggal 30 Mei 1985 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.475/Not/1985/ PN.JKT.SEL dan No.476/Not/1985/PN.JKT.SEL tanggal 18 Juli 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.19 tanggal 7 Maret 1986, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.289/1986, yang menambahkan isi pasal 1 anggaran dasar mengenai singkatan nama perseroan yaitu PT Riasima Abadi serta pasal 4 anggaran dasar tentang modal dengan dilakukannya perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal ditempatkan.

- b. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Mengenai Perubahan Anggaran Dasar No.23 tanggal 13 Mei 1992, yang dibuat oleh Drs. Entjoen Mansoer Wiriadmadja, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6061.HT.01.04.Th.92 tanggal 30 Juli 1992 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.245/A.Not/Wapan/1992/PNJS tanggal 10 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.72 tanggal 8 September 1992, yang merubah pasal 3 anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan, perubahan pasal 4 anggaran dasar tentang modal dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, serta perubahan susunan direksi dan komisaris Riasima.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.82 tanggal 15 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3960 HT.01.04.Th-97 tanggal 20 Mei 1997, dan Laporan Data Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di Departemen Kehakiman di bawah No.C2-HT.01.04-A.8556 tanggal 20 Mei 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dibawah No.090312401381 tanggal 11 Juli 2000 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan ("Akta No.82/1996"), yang merubah seluruh anggaran dasar Riasima untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk merubah nama perseroan dari PT Industri Kimia Farmasi Pertama Riasima Abadi menjadi PT Riasima Abadi Farma.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 85 tanggal 23 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan di bawah No.C-5469.HT.01.04.TH'99 tanggal 29 Maret 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dibawah No. 090312401381 tanggal 11 Juli 2000 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan, yang merubah pasal 4 anggaran dasar tentang modal dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

6.1.1.2. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.82/1996 juncto Akta No.85/1998, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Riasima adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	Rp 10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan	8.000	Rp 8.000.000.000,00	
Modal Diseror	8.000	Rp 8.000.000.000,00	
Pemegang Saham			
PT (Persero) Indofarma	3.480	Rp 3.480.000.000,00	43,50
Perseroan	1.875	Rp 1.875.000.000,00	23,44
PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia	1.600	Rp 1.600.000.000,00	20,00
Muhammad Ishak Djuarsa	1.045	Rp 1.045.000.000,00	13,08
Jumlah Saham Ditempatkan	8.000	Rp 8.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000	Rp 2.000.000.000,00	

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 145 tanggal 30 September 1998 yang dibuat dihadapan Agus Madij, SH, juncto Akta Berita Acara Serah Terima Surat Kolektif Saham tanggal 26 Nopember 1998 dinyatakan bahwa telah dilakukan pengalihan 1.045 saham Riasima yang dimiliki Muhammad Ishak Djuarsa kepada Perseroan. Pengalihan saham dimaksud masih dalam proses administrasi pengesahan para pemegang saham lainnya.

6.1.1.3. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 10.1 anggaran dasar, disebutkan bahwa Riasima diurus oleh suatu Direksi yang jumlahnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan kebutuhan perseroan, apabila diangkat lebih dari 1 orang maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 15.1 anggaran dasar, disebutkan bahwa jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan kebutuhan perseroan, apabila diangkat lebih dari 1 orang maka seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 10.3 dan 15 ayat 15.3 anggaran dasar Riasima, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan masa jabatan 5 tahun sedangkan untuk Komisaris diangkat untuk masa jabatan 3 tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Direksi dan Komisaris sewaktu-waktu.

Berdasarkan Akta 82/1996 juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Juni 1999 yang dibuat di bawah tangan, susunan Komisaris dan Direksi Riasima adalah sebagai berikut:

Komisaris	
Komisaris Utama	: Drs. Gunawan Pranoto
Komisaris	: Drs. Nugroho Widjajanto
Komisaris	: Prijono Ashari SE, MBA

Direksi
Direktur : Drs. Peters Likin

6.1.2. Lingkup Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Riasima adalah berusaha dalam bidang farmasi/obat-obatan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Riasima dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- mendirikan pabrik guna membuat bahan baku untuk keperluan pabrik obat-obatan (fine chemical);
- menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri pengolahan antar bahan baku kimia antara lain untuk keperluan usaha-usaha memproduksi/menghasilkan bahan-bahan baku untuk obat hama;
- mengusahakan pengadaan dan/atau tersedianya alat-alat perlengkapan dan/atau sarana-sarana yang diperlukan untuk menjalankan usaha-usaha tersebut diatas;
- mengimpor bahan-bahan yang diperlukan untuk sub a dan sub b di atas termasuk mesin-mesin dan alat-alat yang diperlukan;
- berdagang pada umumnya, terutama yang bertalian dengan usaha-usaha tersebut di atas, termasuk perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair), baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atau barang-barang yang diproduksi sendiri atau produksi pihak lain, demikian pula usaha-usaha berdagang atau grosir, distributor, leveransir dan supplier dan barang-barang farmasi/obat-obatan;
- memegang keagenan/ perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain yang menjalankan usaha-usaha yang sama dengan perseroan, baik di dalam maupun di luar negeri.

6.1.3. Ikhtisar Data Keuangan Pokok

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Riasima untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Freddy Pam Situmorang dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 yang angkanya berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Riasima yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Salmon dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2000	1999	1998
Neraca			
Aktiva Lancar	10.078	9.978	15.905
Aktiva Tetap – Bersih	3.238	2.802	2.028
Aktiva Lain-lain	4.528	4.057	3.349
Jumlah Aktiva	17.845	16.835	21.282
Kewajiban Jangka Pendek	2.652	1.752	5.573
Kewajiban Jangka Panjang	4.860	5.560	6.160
Jumlah Kewajiban	7.512	7.312	11.733
Ekuitas	10.333	9.523	9.549
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	17.845	16.835	21.282

	2000	1999	1998
Laporan Laba-Rugi			
Penjualan Bersih	29.250	35.576	31.656
Laba Kotor	4.142	7.105	8.552
Laba Usaha	1.565	4.749	6.625
Laba Bersih	1.215	2.253	5.143

6.2. PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)

6.2.1. Organisasi Perusahaan dan Keterangan Umum

6.2.1.1. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya.

PT Sinkona Indonesia Lestari (selanjutnya disebut "SIL"), berkedudukan hukum di Bandung, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.33 tanggal 25 Oktober 1986 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No.4 tanggal 6 April 1987, serta diperbaiki dengan Akta Perbaikan No.7 tanggal 4 Agustus 1987, ketiganya dibuat di hadapan Irene Ratnaningsih, SH, notaris pengganti dari Komar Andasasmita, SH, Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5174.HT.01.01.TH87 tanggal 15 Agustus 1987 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, masing-masing di bawah No.611, 612 dan No.613 tanggal 3 Oktober 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 30 Oktober 1987, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.971/1987.

Anggaran Dasar SIL telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan yang terjadi secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

Akta Risalah Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham No.9 tanggal 5 Maret 1998 yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan No.86 tanggal 29 Agustus 1998 yang keduanya dibuat dihadapan Martinah Sumarno, SH, Notaris di Bandung (Akta No.9 juncto Akta No.86), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-8286.HT.01.04.TH99 tanggal 11 Mei 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dibawah No.034/BH.10.11/VI/99 tanggal 22 Juni 1999 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Dati II Subang, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.4909/1999, yang merubah seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995.

6.2.1.2. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.9 juncto No.86 juncto Akta Hibah Saham No.11 tanggal 18 Oktober 1999 yang dibuat Martinah Sumarno, SH, Notaris di Bandung, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIL adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	8.576	Rp 8.576.000.000,00	
Modal Ditempalkan	8.576	Rp 8.576.000.000,00	
Modal Disetor	8.576	Rp 8.576.000.000,00	
Pemegang Saham			
Perseroan	1.266	Rp 1.266.000.000,00	15,00
PT Perkebunan VII (Persero)	5.574	Rp 5.574.000.000,00	65,00
Yayasan Kartika Eks Paksi	1.716	Rp 1.716.000.000,00	20,00
Jumlah Saham Ditempalkan	8.576	Rp 8.576.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.576	Rp 8.576.000.000,00	

6.2.1.3. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan pasal 10 ayat 10.1 anggaran dasar, SIL diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 orang direktur. Berdasarkan pasal 15 ayat 15.1 anggaran dasar, Komisaris terdiri dari 3 orang dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

Berdasarkan pasal 10 ayat 10.3 dan 10.4 anggaran dasar, anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Berdasarkan pasal 15 ayat 15.3 dan 15.4 anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 3 tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Susunan Komisaris dan Direksi SIL adalah sebagai berikut:

Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham SIL No.07/KPS-SIL/VII/1998 tanggal 17 Juli 1998, susunan Komisaris SIL adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ir.H. Imam Wahyudi
 Komisaris : Abdul Azis
 Komisaris : Drs. Saleh Rasidi

Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham SIL No.005/KPS-SIL/IV/1995 tanggal 3 April 1995 juncto Surat Keputusan Pemegang Saham No.14/KPS-SIL/XII/1996 tanggal 23 Desember 1996, susunan Direksi SIL adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Drg. Wahyoe Widayat
 Direktur : Uki Mardjuki, SE

6.2.2. Lingkup Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan SIL adalah melaksanakan Industri Kina beserta turunan-turunannya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SIL dapat melakukan kegiatan usaha memproduksi dan memasarkan Kina Sulfat, Kinidin dan derivat-derivatnya dengan kemungkinan untuk pengembangan produk agrochemicals dan produk-produk lain yang berhubungan dengan itu.

6.2.3. Ikhtisar Data Keuangan Pokok

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari SIL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 yang angkanya berasal dan atau dihilung berdasarkan laporan keuangan SIL yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2000	1999	1998
Neraca			
Aktiva Lancar	52.302	38.974	47.080
Aktiva Tetap - Bersih	3.799	7.905	6.297
Beban Ditangguhkan	-	-	813
Jumlah Aktiva	56.101	46.879	54.200
Kewajiban Jangka Pendek	33.272	20.332	20.925
Jumlah Kewajiban	33.272	20.332	20.925
Ekuitas	22.829	26.577	33.275
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	56.101	46.879	54.200
Laporan Laba-Rugi			
Penjualan Bersih	37.700	50.140	64.850
Labai Kotor	11.025	14.180	40.859
Labai Usaha	7.396	10.944	37.049
Labai Bersih	6.603	7.051	24.122

6.3. PT Kifa Gema Sarana Husada (Kifa)

6.3.1. Organisasi Perusahaan dan Keterangan Umum

6.3.1.1. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PT Kifa Gema Sarana Husada (selanjutnya disebut "Kifa"), berkedudukan hukum di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.9 tanggal 2 Mei 1984 yang dibuat di hadapan Haji Bebasa Daeng Lalo, SH, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No.4 tanggal 5 Nopember 1985 yang dibuat dihadapan Mochtar Daud Sarjana, SH, Notaris di Jakarta yang kedua akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7438/HT.01.01.Th.85 tanggal 26 Nopember 1985 dan telah didaftarkan dalam buku

register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.115/1993 dan No.116/1993 tertanggal 11 Januari 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 16 Pebruari 1993, Tambahan No.727/1993.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Kifa tidak pernah mengalami perubahan dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

6.3.1.2. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.8/1984, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Kifa adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	880	Rp 8.800.000.000,00	
Modal Ditempatkan	440	Rp 4.400.000.000,00	
Modal Disetor	440	Rp 4.400.000.000,00	
Pemegang Saham			
PT Getraco Utama	308	Rp 3.080.000.000,00	70,00
Perseroan	132	Rp 1.320.000.000,00	30,00
Jumlah Saham Ditempatkan	440	Rp 4.400.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	440	Rp 4.400.000.000,00	

6.3.1.3. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 7.1 dan 7.2 anggaran dasar, disebutkan bahwa Kifa diurus oleh suatu direksi yang terdiri atas seorang atau beberapa orang direktur dan apabila lebih dari seorang direktur maka seorang diantaranya menjabat sebagai direktur utama dibawah pengawasan suatu dewan komisaris yang terdiri atas seorang atau beberapa orang komisaris dan apabila lebih dari seorang komisaris, maka seorang diantaranya menjabat sebagai komisaris utama. Para dewan komisaris dan anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Akta No.8/1984, susunan Komisaris dan Direksi Kifa adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Imam Hidayat
 Komisaris : Ir. Ady Rizalsyah Thahir, M-Arch
 Komisaris : Erry Putra Oudang

Direksi

Direktur Utama : Jimmy Herbowo
 Direktur : Drs. Mohammad Oekaranasasmita (Alm)
 Direktur : Ir. Bambang Riyadi Soegomo

6.3.2. Ikhtisar Keuangan Pokok

Sejak berdirinya, Kifa sudah tidak beroperasi sehingga tidak menerbitkan laporan keuangan.

7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

	Perseroan	Rilasima	SIL	Kifa
Dr. E. Sularjo	KU	-	-	-
Prof. DR. Azrul Azwar	K	-	-	-
Prof. DR. M. Rhyas Rasjid, MA	K	-	-	-
Drs. Darodjatun, MBA	DU	-	-	-
Drs. Tatong Suryanto	D	-	-	-
Drs. Syarif Bastaman	D	-	-	-
Drs. Nugroho Widjajanto	D	K	-	-
Drs. Saleh Rasidi	D	-	K	-

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur

8. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perseroan pada dasarnya mempunyai kebijakan untuk tidak mengadakan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, kecuali dengan tingkat harga dan syarat-syarat yang selidik-tidaknya sama dengan syarat-syarat yang akan dapat diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan transaksi yang lazim.

Sesuai dengan peraturan Bapepam, setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia maka setiap transaksi antara lain seperti akuisisi, penyertaan pada perusahaan lain atau divestasi yang mengandung benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu) harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi yang direncanakan, kecuali transaksi itu sudah biasa/lazim dilaksanakan sebelum saham-saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan telah diungkapkan dalam dokumen-dokumen Penawaran Umum.

Transaksi antara Perseroan dengan badan-badan lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Negara dapat merupakan transaksi "benturan kepentingan" berdasarkan peraturan Bapepam dan karenanya harus memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi tersebut (Pemegang Saham Independen), kecuali jika hubungan dan transaksi tersebut sudah biasa/lazim dilaksanakan sebelum Perseroan mengadakan Penawaran Umum dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan dalam prospektus penawaran perdana.

Perseroan berpendapat bahwa transaksi-transaksi yang dilakukannya dengan BUMN atau perusahaan yang dikendalikan oleh Negara dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi-transaksi yang selama ini dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan transaksi dengan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- (i) Penjualan obat, yang meliputi Obat Ethical dan Obat OTC, penjualan alat kesehatan kepada BUMN dan kepada perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Negara. Penjualan dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dengan pihak ketiga. Rincian penjualan dan piutang usaha atas transaksi dengan pihak hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

Penjualan

Nama Perusahaan	2000 (%)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2,85
PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero)	2,22
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1,12
PT Perkebunan Nusantara (Persero)	0,82
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	0,54
PT Angkasa Pura (Persero)	0,35
PT Indofarma Global Medika	0,28
PT Indonesia Aluminium (Persero)	0,20
PT Timah (Persero) Tbk	0,18
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	0,14
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	0,13
PT Jamsostek (Persero)	0,13
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	
(dih PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (Persero))	0,12
PT Pupuk Kaltim (Persero)	0,08
PT PAL (Persero)	0,09
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	0,08
PT Pantja Niaga (Persero)	0,07
PT Paabrik Gula (Persero)	0,07
PT Garuda Indonesia (Persero)	0,07
Total dibawah 0,80%	0,75
PT Bank Mandiri (Persero) PT Indofarma (Persero)	
PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero)	
PT Mopati Nusantara Airline (Persero)	
PT Bali Tourist Development Company (Persero)	
PT Taspen (Persero)	
PT Djakarta Loyd (Persero)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT LNG Arun (Persero)	
PT Kerjasama Kraf Arah (Persero)	
PT Gas Negara (Persero)	
PT Semen Cibinang Tbk	
PT Balai Pustaka (Persero) PT Cipta Niaga (Persero)	
PT Garam (Persero)	
PT Jasa Raharja (Persero)	
PT Pos Indonesia (Persero)	
PT PATAL (Persero)	
PT Barita (Persero)	
PT Pagilaran (Persero)	

Piutang usaha

Nama Perusahaan	2000 (%)
PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero)	0,40
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	0,31
PT Indofarma Global Medika	0,25
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	0,21
PT Perkebunan Nusantara (Persero)	0,20
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	0,11
Total dibawah 0,5%	0,41
PT Bank Mandiri (Persero)	
PT Indofarma (Persero)	
PT Garuda Indonesia (Persero)	
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	
PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero)	
PT Merpati Nusantara Airline (Persero)	
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
PT PAL (Persero)	
PT Jamsostek (Persero)	
PT Taspen (Persero)	
PT Garam (Persero) PT Jasa Nelayan (Persero)	
PT Pos Indonesia (Persero)	
PT Aneka Tambang (Persero)	
PT Cipta Niaga (Persero)	
PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero)	
PT Pupuk Kaltim (Persero)	
PT Angkasa Pura (Persero)	
PT PT Indonesia Aluminium (Persero)	
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	
PT LNG Arun (Persero)	
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	
(dih PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (Persero))	
PT Gas Negara (Persero)	
PT Timah (Persero) Tbk	
PT Balai Pustaka (Persero)	
PT Semen Cibinong Tbk	
PT Pantja Niaga (Persero)	

Pembelian

Nama Perusahaan	2000 (%)
PT Indofarma (Persero) Tbk	15,02
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	10,85
PT Indofarma Global Medika	9,07
PT Biolamina (Persero)	2,98
PT Pliapros (Persero)	0,58
PT Pantja Niaga (Persero)	0,22

Hutang usaha

Nama Perusahaan	2000 (%)
PT Indofarma Global Medika	3,83
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	3,26
PT Biolamina (Persero)	0,82
PT Indofarma (Persero)	0,62
PT Pantja Niaga (Persero)	0,02

- (ii) Pembelian obat dan bahan baku obat dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Negara. PT Indofarma (Persero) melakukan pembelian barang jadi dari Perseroan sebesar Rp 109.185 juta (16,02% dari total pembelian) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp 73.929 juta (10,85% dari total pembelian) yang melebihi 10% dari jumlah pembelian bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000.
- (iii) Perseroan menempatkan dana dalam bentuk rekening giro pada PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Mandiri (Persero).
- (iv) Perseroan memperoleh kredit modal kerja dan kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perseroan memperkirakan bahwa sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan usaha Perseroan dan banyaknya BUMN atau perusahaan yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia serta diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah maka tidak tertutup kemungkinan Perseroan akan mengadakan usaha patungan atau perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi lain dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia tersebut atau dengan Pemerintah Daerah dari waktu ke waktu.

Dalam menjalankan usaha Perseroan sehari-hari, Perseroan akan selalu mengadakan transaksi atas dasar komersil dengan syarat-syarat normal yang sama berdasarkan suatu transaksi yang lazim dengan pihak manapun baik dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia maupun dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Selanjutnya Perseroan juga memberikan pinjaman karyawan berupa kredit kendaraan dan pembelian rumah yang pelunasannya dilakukan melalui pemotongan gaji.

9. TRANSAKSI MATERIAL YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI KEGIATAN PERSEROAN

Pada tanggal 28 Maret 2000, Perseroan menandatangani fasilitas pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari RDI sebesar Rp 65.000 juta dengan biaya administrasi 12% per tahun. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2001. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai modal kerja pengadaan Obat Generik tahap III. Sehubungan Perseroan akan membiayai pengadaan bahan baku/kemasan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Obat Generik Berlogo tahun anggaran 2001 dalam rangka mensukseskan Program Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 12 Februari 2001 Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penurunan biaya administrasi pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) No. 378/DP3/2000 sebesar Rp 65.000 juta kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada saat ini permohonan tersebut sedang diproses oleh Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk perpanjangan jangka waktu dan penurunan biaya administrasi pinjaman RDI tersebut.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 2 April 2001, diputuskan dividen tahun buku 2000 sebesar Rp 33.963 juta harus disetor ke kas Negara selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2001. Pada tanggal 11 Mei 2001 Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar 10% dari dividen terutang atau Rp 3.396 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 15 Oktober 2001 sebesar 40% dan 30 November 2001 sebesar 50%.

10. Perkara Pengadilan Yang Sedang Dihadapi

Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan dan/atau anggota Direksi dan/atau Komisaris Perseroan terlibat sebagai tergugat dalam satu perkara perdata yang terdaftar dibawah No. 43/PDT/G/2001/PNBDG tanggal 7 Februari 2001 di Pengadilan Negeri Bandung yang diajukan oleh Johni Harro, SH selaku kuasa dari PT Merapi Utama Pharma, PT Anugerah Argon Medica, PT Indofarma, PT Wigo Hoslab, PT Pantja Niaga dan PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Solaku penggugat dengan dasar gugatan Wanprestasi. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 1 Juni 2001 Perseroan dan penggugat sepakat untuk menanggung beban kerugian yang timbul secara proporsional dan menganggap selesai permasalahan tersebut. Namun Perjanjian Perdamaian tersebut belum disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa perkara tersebut.

Selain perkara diatas, terdapat pula suatu perkara sengketa tata usaha negara dengan registrasi No. 100/G.TUN/1998/PTUN-JKT antara Dr. Harro Harris Liman melawan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, dalam mana salah satu aset Perseroan yang terletak di Jalan Matraman Raya No. 57, Jakarta Timur dengan Hak Guna Bangunan No. 138/Palmeriam, merupakan obyek perkara dan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara tersebut sedang dalam proses pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hal kepentingan Perseroan pada kedua perkara tersebut dikalahkan, Perseroan berkeyakinan bahwa keputusan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan pada keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

VIII. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN DAN MANAJEMEN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 2 April 2001, sebagaimana tercantum dalam akta No. 2 tanggal 2 April 2001 dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui adanya program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen. Sesuai keputusan RUPSLB, Perseroan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 180.000.000 Saham Seri B Baru untuk karyawan dan manajemen Perseroan dalam program kepemilikan saham untuk karyawan dan manajemen Perseroan yang terbagi atas program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen dan program hak opsi.

Berdasarkan hasil laporan minat karyawan dan manajemen tanggal 24 April 2001 sehubungan dengan program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen di atas diketahui bahwa pernyataan minat karyawan dan manajemen atas saham Perseroan adalah sejumlah 54.000.000 saham yang pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat. Harga saham untuk jumlah tersebut ditentukan sebesar Rp 180 per saham. Pembayaran saham tersebut dilakukan oleh karyawan dan manajemen secara tunai dan penuh, dengan cara pemotongan maksimum 50% dari bonus yang akan diterima oleh karyawan dan manajemen pada tahun 2001 dan sisanya akan dibayar melalui pinjaman dari Perseroan dalam jangka waktu 2 tahun dan dikenakan bunga berkisar antara 8% sampai dengan 14% per tahun sesuai jenjang jabatan karyawan dan manajemen.

Berdasarkan RUPSLB dan Surat Keputusan Direksi, saham yang dibeli oleh karyawan dan manajemen tersebut mempunyai syarat-syarat khusus antara lain hanya dapat dijual kembali setelah 8 bulan sejak tanggal pencatatan dan pembayaran telah dilunasi oleh karyawan dan manajemen (periode lock up). Oleh karena Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen dilakukan secara terpisah dari Penawaran Umum kepada masyarakat, maka pembatasan penjualan kembali saham selama periode *lock up* tersebut tidak mengacu pada ketentuan mengenai hal yang sama dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Bagi karyawan dan manajemen yang mengikuti program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen akan memperoleh hak opsi untuk membeli saham Perseroan. Jumlah saham yang dialokasikan untuk program hak opsi ini adalah sebanyak-banyaknya 180.000.000 saham dikurangi jumlah yang diambil dalam Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen. Saham Perseroan tersebut akan dialokasikan sesuai jenjang jabatan karyawan dan manajemen. Harga saham untuk program hak opsi ditentukan sebesar 115% dari harga penawaran saham perdana kepada masyarakat atau Rp 230 per saham. Pembagian hak opsi tersebut akan dilaksanakan 3 bulan setelah tanggal pencatatan. Masa pelaksanaan hak opsi dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pencatatan, dan bila hak opsi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal dimulainya masa pelaksanaan hak opsi maka hak opsi tersebut dinyatakan gugur.

Jumlah 54.000.000 saham yang ditawarkan kepada karyawan dan manajemen ini terpisah dari Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat, dengan demikian maka alokasinya tidak mengacu kepada ketentuan Pasar Modal yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 perihal Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan dan Manajemen berlaku untuk karyawan (pegawai tetap dan pegawai tidak tetap) dan manajemen yang terdiri dari komisaris dan direksi, yang tercatat per tanggal 1 Maret 2001, dan kepesertaannya bersifat sukarela.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pada kegiatan-kegiatan usaha di bidang industri kimia, farmasi, biologi dan kesehatan melalui berbagai aktivitas seperti penyediaan bahan baku dan obat jadi, pendistribusian dan perdagangan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan serta kegiatan usaha di bidang pelayanan kesehatan meliputi pengoperasian jaringan apotek, optik dan laboratorium klinik.

Disamping itu, kondisi lingkungan yang berubah dan berkembang seperti jumlah penduduk yang bertambah, pendapatan per kapita, tingkat usia harapan hidup, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta semakin meningkatnya tingkat kecerdasan dan pendidikan masyarakat serta makin hilangnya batas-batas antar negara sebagai akibat globalisasi akan merubah tingkat kebutuhan dan keinginan, yang pada gilirannya akan merubah tingkat permintaan. Sehingga hal ini akan berdampak pada tingkat produksi dan pelayanan Perseroan yang harus berkembang dan meningkat sesuai perubahan tingkat permintaan tersebut.

2. KEGIATAN USAHA

2.1. Produk Perseroan

a. Produk Bahan Baku

Perseroan pada saat ini memproduksi bahan baku obat-obatan seperti garam kina, Yodium dan garamnya, Ferro Sulfat, minyak jarak (castor oil), minyak-minyak nabati dan ekstrak tanaman obat. Bahan baku ini selain dipergunakan untuk produksi obat jadi oleh unit produksi Perseroan, juga dijual kepada pihak ketiga antara lain PT Kalbe Farma Tbk, PT Mandom Indonesia Tbk dan PT Sari Husada Tbk. Perseroan juga mengekspor bahan baku Yodium dan garam kina ke negara-negara antara lain: Inggris, Belanda, India, Pakistan dan Australia.

b. Produk Obat Jadi

Pada saat ini Perseroan memproduksi dan memasarkan 267 jenis obat-obatan yang digolongkan sebagai Obat Ethical dan Obat OTC.

Perseroan memproduksi obat dalam bentuk tablet, tablet salut gula dan salut film, obat tetes, serbuk, kapsul, kapsul lunak, sirup/ suspensi, sirup kering, injeksi dan krim. Disamping itu Perseroan juga memproduksi obat dan alat kontrasepsi untuk program keluarga berencana seperti pil KB dan Alat Kontraspsi Dalam Rahim (AKDR). Perseroan merupakan satu-satunya produsen farmasi di Indonesia yang memproduksi obat-obat golongan narkotika berdasarkan penugasan dari Pemerintah.

Tabel di bawah ini menunjukkan produk obat yang dihasilkan Perseroan dalam 5 tahun terakhir berdasarkan jenisnya yaitu:

Produk	31 Desember				
	1996	1997	1998	1999	2000
Obat Ethical					
Obat Generik	130	133	134	147	145
Obat Nama Dagang					
- Perseroan	40	42	42	46	42
- Lisensi	41	40	40	39	36
Total	211	215	216	231	223
Obat OTC					
Obat OTC	28	28	30	31	32
Obat Asli Indonesia	3	4	5	5	9
Total	31	32	35	36	41
Obat dan Alat Kontrasepsi	3	3	3	3	3
Total Produk	245	250	254	270	267

b.1. Obat Ethical

Obat Ethical merupakan jenis obat yang terbanyak dihasilkan Perseroan yaitu mencapai 187 jenis obat per tahun 2000. Obat Ethical Perseroan terbagi dalam dua kategori yaitu Obat Generik dan Obat Nama Dagang.

Obat Generik

Saat ini Obat Generik memberikan kontribusi sekitar 15% dari total penjualan Perseroan.

Tabel berikut ini merupakan beberapa Obat Generik yang dihasilkan Perseroan beserta kegunaannya:

Kegunaan Obat	Obat Generik
Antinfeksi	Amoxycillin, Ampicillin, Cefadroxil, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Doxycycline, Erythromycin, Tetracycline, Rifampicin
Antianemi	Ferrous sulphate, Tablet Tambah Darah
Analgesik, antipiretik, antiinflamasi	Paracetamol, Asam Melenamat, Analgin, Na. Diklofenak, Piroxicam
Antasida, antulceran	Antasida DOEN, Cimetidine, Ranitidin
Antelmintika	Albendazole, Mebendazole, Pyrantel
Antibakteri Kombinasi	Cotrimoxazole
Asma	Aminophylline, Salbutamol
Antitusif	Dextromethorphan
Ekspektoran	Glyceril Guaiacolate
Antidabet	Glibenclamide
Antiseptik/Disinfektan	Iodine Povidon
Antihipertensi	Nifedipine, Diltiazem, Verapamil, Furosemide, HCT, Captopril, Clonidine, Propranolol
Anti Malaria	Chloroquine, Primaquine, Quinine, Sulfadoxine-pyrimethamine
Vitamin	Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Calcium Lactate, Thiamine, Vit B complex, Pyridoxine, Retinol/Vit A
Antifungi	Griseofulvin / Miconazole
Elektrolit	Oralt
Obat Gangguan Pencernaan	Metoclopramide
Hormon Kortikosteroid	Dexamethasone, Prednisone, Hydrocortisone
Anti Tuberkulosa	Ethambutol, INH, Pyrazinamide, Rifampicin
Antiviral	Acyclovir

Obat Nama Dagang

Obat Nama Dagang yang dihasilkan Perseroan adalah obat yang diproduksi dengan nama Perseroan sendiri dan atas dasar lisensi.

Tabel berikut ini adalah beberapa Obat Nama Dagang yang dihasilkan Perseroan dengan nama dagang Perseroan sendiri beserta kegunaannya.

Kegunaan Obat	Obat Nama Dagang Perseroan
Hormon	Gravynon, Betason, Betason N, Chloramfenicol, Chloramfenicol H, Enkacort
Anil anemia	Dasablon
Antibakteri Kombinasi	Ka/lin
Antiasma	Rotaphyl SR
Antitusif	Ersylan
Antihipertensi	Cordalat
Antinfeksi	Kimovil, Kifarox, Spirapotic
Analgesik, antipiretik, antiinflamasi, analgesik narkotik	Enkapyrin, Kiblaron, Neurodal, Coditam
Antasid	Magasida
Antikoksidan	Progenex
Uterotonika	Methovin
Vitamin	Neurovit E
GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium)	Yadiol

Pada tahun 2000 dari 267 produk Perseroan, 36 jenis obat jadi merupakan produk yang diproduksi berdasarkan lisensi dari Prinsipal. Prinsipal utama Perseroan antara lain: Heinrich Mack Nachf GmbH & Co. KG, Solvay Pharmaceutical GmbH, Schering AG, dan Sankyo Company Limited. Perjanjian lisensi umumnya memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk memproduksi produk yang dilindungi paten dan/atau menggunakan merek dagang milik Prinsipal, serta mendistribusikan produk yang dilindungi paten.

Perjanjian lisensi yang dimiliki oleh Perseroan merupakan perjanjian induk, yang hingga dibuatnya Prospektus ini masih berlaku karena dapat diperpanjang secara otomatis bila tidak ada keberatan di antara kedua belah pihak. Pada umumnya harga jual obat-obatan berdasarkan lisensi ditentukan oleh Perseroan bersama dengan Prinsipal. Obat-obatan yang diproduksi berdasarkan lisensi umumnya merupakan Obat Ethical.

Para Prinsipal umumnya melakukan pemantauan yang cukup ketat terhadap sarana produksi serta obat-obatan yang diproduksi berdasarkan lisensi antara lain dengan melakukan audit secara periodik terhadap sarana dan proses produksi serta mutu produk.

Berikut ini adalah obat-obat yang diproduksi, diimpor dan dipasarkan Perseroan berdasarkan perjanjian lisensi dengan Prinsipal yang berasal dari Jepang dan Eropa:

Prinsipal	Produk	Jenis Kegiatan	Tanggal Perjanjian	Masa Berlaku
Heinrich Mack Nachf GmbH & Co. KG	Alexan, Codipront, Codipront, Cum Expectorant, Rhinopront, Rhinotuesal, Nitromack Retard, Nitromack Retard Forte, Isomack spray	Impor, Produksi dan Distribusi	1 Oktober 1975	Masih berlaku karena secara otomatis diperpanjang
Sankyo Company Limited	Benar, Celmetazon, Lacton, Mavalotin, Trimate E, Yohmotonic, Loxonia	Impor, Produksi, Distribusi dan Pemasaran	1 Januari 1968	Masih berlaku karena secara otomatis diperpanjang
Schering AG	PI Keluarga Berencana (KB)	Produksi, Distribusi dan Pemasaran	8 September 1987	Masih berlaku karena secara otomatis diperpanjang

Solvay Pharmaceutical GmbH (merupakan hasil penggabungan Duphar dan Kalchemie)	Betaserc, Dobutamin Glutini, Dopamin Glutini, Duphalac, Duphaston, Duspatalin, Duvadlan, Luvox, Epidosin, Pankreoflat, Pankreon Comp, Peracron, Yulopar, Pankreon for Children	Impor, Produksi, Distribusi dan Pemasaran	8 Februari 1990	Masih berlaku karena secara otomatis diperpanjang
Asta Medica AG	MST (Morphine Sulphate Tablet) Continues	Impor, Distribusi dan Pemasaran	15 Oktober 1992	Masih berlaku karena secara otomatis diperpanjang
Janssen Pharmaceutica	Fentanyl Injection, Sufenta Injection dan Sufenta Forte Injection	Impor dan Distribusi	17 Mei 1991	Masih berlaku karena secara otomatis diperpanjang

b.2. Obat OTC

Obat OTC yang dihasilkan Perseroan adalah obat yang dapat dibeli bebas baik berupa obat modern maupun obat tradisional/obat asli Indonesia. Perseroan merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan obat asli Indonesia.

Tabel berikut ini adalah beberapa Obat OTC dan obat asli Indonesia yang diproduksi Perseroan berdasarkan jenis dan kegunaannya:

Kegunaan Obat	OTC
Enzim	Enzymfort
Scabies	Scabicide
Vitamin	Askorbin, Bekamin B compl. forte, Bekamin C forte, Bekamin 10, Calcidol B12, Encevit, Yeastafort.
Antianemia	Akifon
Influenza	Supra Flu
Teles Mata	Fillo
Kosmetik	Marcks' Bodyk (Cream, Putih, Rose), Marcks' Body Talk
Antitusiva, Ekspektoran	Antussin, Rexal
Antimalaria	Kina
Antidiare	Bekafon
Kegunaan Obat	Obat Asli Indonesia
Penghancur batu ginjal	Balugin
Sariawan	Enkasari / Enkasari Lozenges
Antidiare	Fitolax
Pelancar ASI	Fitolax
Penurun Kolesterol	Fitocholes
Gangguan Pencernaan	Fitogaster
Antikoksid	Fitocassol
Gangguan hati	Fitaliv

b.3. Obat dan alat kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana

Obat dan alat kontrasepsi yang dihasilkan Perseroan untuk mendukung program Keluarga Berencana (KB) terdiri dari Pil KB, Mikrodol dan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) jenis Copper T380A.

c. Produk Jasa

Produk jasa Perseroan meliputi distribusi dan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan. Jasa distribusi Perseroan dikenal dengan nama PBF Kimia Farma yang melakukan kegiatan distribusi untuk produk Perseroan, Prinsipal maupun dari produsen lain. Perseroan memiliki pusat pengaturan persediaan dan distribusi ke seluruh cabang PBF Perseroan.

Untuk melakukan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan, Perseroan menyediakan sarana pelayanan berupa:

- Apotek
- Konter swalayan di beberapa apotek yang menjual obat-obat bebas dan consumer products
- Praktek dokter
- Optik
- Laboratorium klinik

2.2. Kegiatan Produksi

Kegiatan produksi Perseroan difokuskan pada komitmen terhadap mutu dan ketersediaan produk sesuai dengan tata laksana Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB). Pada saat ini seluruh unit produksi Perseroan telah memiliki sertifikat CPOB, yang berarti Perseroan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM), saat ini bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), sesuai Keputusan No. 05411/A/SK/XII/89 tanggal 16 Desember 1989 tentang Penerapan CPOB pada industri farmasi. Dalam upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produknya sesuai dengan CPOB, setiap unit produksi di Perseroan memiliki quality assurance yang menjamin mutu bahan baku, bahan kemasan, proses produksi dan produk jadi.

Disamping itu Perseroan telah melaksanakan sistem mutu dan memperoleh sertifikasi. Berikut adalah sertifikasi internasional yang diperoleh unit produksi Perseroan:

Unit Produksi	Jenis Sertifikat	Tahun Diperoleh	Lembaga Pemberi Sertifikat
Unit Produksi Semarang	ISO 9001	1997	Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Unit Produksi Watudakon, Jawa Timur *	ISO 9002	1997	SGS Yarsley International Certification Services Limited
	ISO 14001	1999	TUV Anlagentechnik GmbH
Unit Produksi Formulasi Jakarta	ISO 9002	1999	SGS Yarsley International Certification Services Limited
Unit Produksi Formulasi Bandung	ISO 9002	1999	SGS Yarsley International Certification Services Limited
Unit Produksi Bandung	ISO 9002	1999	SGS Yarsley International Certification Services Limited

2.2.1. Pengadaan Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan untuk produksi Perseroan mencapai sekitar 500 jenis bahan baku utama dan pembantu. Sampai saat ini sekitar 95% bahan baku yang dibutuhkan Perseroan merupakan bahan baku impor baik yang diimpor secara langsung maupun secara tidak langsung.

Perseroan tidak tergantung pada satu pemasok bahan baku saja sehingga sampai saat ini Perseroan tidak mengalami kesulitan pasokan bahan baku utama. Untuk menjamin mutu bahan baku yang berasal dari pemasok rutin, Perseroan selalu melakukan pengujian kualitas bahan baku ketika bahan baku tersebut diterima. Sedangkan untuk bahan baku yang berasal dari produsen baru harus terlebih dahulu dilakukan pengujian terpadu antara unit kerja riset dan unit produksi yang menggunakan.

Untuk memproduksi bahan baku garam kina, Perseroan memperoleh pasokan kulit kina dari kebun kina milik sendiri, memanfaatkan kulit kina rakyat dan membeli dari luar negeri. Kurangnya pasokan kulit kina mengakibatkan produksi garam kina Perseroan menjadi terbalas. Oleh karena itu, Perseroan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti kerjasama dengan Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung untuk memperoleh bibit kina yang lebih baik, memanfaatkan kulit kina rakyat di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Perseroan juga menjalin kerjasama dengan DSM Minera BV dan Arnold Suhr International BV dari Belanda dalam upaya mengoptimalkan pemakaian kapasitas terpasang yang ada di Unit Produksi Bandung.

Biji jarak yang merupakan bahan baku minyak jarak (castor oil) diperoleh dari petani jarak maupun koperasi-koperasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Untuk pengadaan bibit dan mendapatkan benih jarak yang baik, Perseroan bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Serat dan Tembakau (Balitas) di Malang. Dalam hal pembudidayaan tanaman jarak sebagai upaya Perseroan untuk meningkatkan pasokan bahan baku biji jarak, Perseroan bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah dan Koperasi Pesantren. Selain itu Perseroan dengan instansi terkait memberikan penyuluhan kepada para petani ataupun calon petani mengenai budi daya tanaman jarak tersebut.

Perseroan sedang melakukan upaya penyempurnaan sistem informasi untuk mengintegrasikan sistem informasi antara unit-unit produksi dengan kantor pusat. Dengan sistem ini Perseroan berharap akan mampu meningkatkan kecepatan informasi, efisiensi dalam pengadaan bahan baku dan efisiensi operasi.

2.2.2. Fasilitas Produksi

Perseroan memiliki 6 (enam) unit produksi yang terdiri dari :

1. Unit Produksi Formulasi Jakarta (UPFJ)

Unit Produksi Formulasi Jakarta (UPFJ) berlokasi di daerah Kawasan Industri Pulo Gadung dengan luas tanah kurang lebih 35.000 m² dan bangunan seluas kurang lebih 11.225 m². Lokasi ini merupakan milik sendiri dengan status HGB.

Unit produksi ini memproduksi obat dalam bentuk sediaan tablet, tablet salut, kapsul, granul, sirup kering, suspensi/sirup, tetes mata, krim dan injeksi. Unit produksi ini menghasilkan sekitar 120 jenis obat yang terdiri dari golongan Obat Ethical termasuk obat golongan narkotika dan lisensi serta Obat OTC.

Fasilitas produksi di UPFJ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu betalaktam (derivat penisilin) dan non betalaktam. Menurut ketentuan CPOB, fasilitas pembuatan obat jenis betalaktam harus dipisahkan secara khusus, oleh sebab itu, Perseroan memiliki bangunan pabrik yang terpisah. Bentuk sediaan obat betalaktam yang dihasilkan terdiri dari kapsul, tablet dan sirup kering.

2. Unit Produksi Formulasi Bandung (UPFB)

Unit Produksi Formulasi Bandung (UPFB) terletak di atas tanah seluas kurang lebih 21.643 m² yang berlokasi di jalan Cicendo No.43 Bandung. Lokasi ini merupakan milik sendiri dengan status HGB.

Unit produksi ini memproduksi obat dalam bentuk sediaan tablet, sirup/suspensi, serbuk dan pil Keluarga Berencana.

3. Unit Produksi Formulasi Tanjung Morawa (UPFT)

Unit Produksi Formulasi Tanjung Morawa, Medan (UPFT) ini terletak di atas lahan seluas kurang lebih 20.058 m² dengan bangunan seluas kurang lebih 1.774 m² yang merupakan milik sendiri dengan status HGB, dan berlokasi di Tanjung Morawa, Medan.

UPFT merupakan fasilitas produksi Perseroan yang berfungsi untuk mengisi kebutuhan obat-obatan khususnya di wilayah Sumatera. Unit produksi ini menghasilkan antara lain obat-obatan dalam bentuk sediaan tablet, krim dan kapsul.

4. Unit Produksi Bandung (UPB)

Unit Produksi Bandung (UPB) ini terletak dalam satu area dengan Unit Produksi Formulasi Bandung.

Unit produksi ini menghasilkan bahan baku garam kina dan telah memperoleh "United States Food & Drugs Administration (USFDA) Approval" untuk proses dan hasil produk kina sejak tahun 1976. Bahan baku garam kina selain dipergunakan sebagai obat malaria, juga dipergunakan sebagai bahan campuran minuman tonik.

Perseroan telah memproduksi dan mempergunakan ekstrak bahan baku tumbuh-tumbuhan sebagai bahan baku obat asli Indonesia yang diproduksi Perseroan. Perseroan juga merencanakan untuk mengembangkan fasilitas produksi obat asli Indonesia terpadu di UPB.

UPB memiliki lahan kebun dengan HGU atas tanah hingga tahun 2023 seluas kurang lebih 1.060 ha yang terletak di daerah Ciwidey, Cianjur Selatan. Sekitar 550 ha dari lahan tersebut dipergunakan bagi perkebunan kina, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi tanaman lainnya seperti: tanaman keijibeling, saga, jambu batu, dll yang digunakan sebagai bahan baku obat asli Indonesia yang diproduksi oleh unit produksi Perseroan. Lahan kebun ini setiap tahunnya mampu memasok sekitar 60 ton kulit kina. Pengelolaan kebun ini dilakukan oleh 14 tenaga tetap dan 200 tenaga harian. Selain untuk konsumsi sendiri, Perseroan juga mengekspor garam kina dalam bentuk bulk ke negara seperti India, Pakistan dan Eropa.

UPB, selain menghasilkan garam kina juga memproduksi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan obat asli Indonesia antara lain Batugin Elixir dan Enkasari.

5. *Unit Produksi Semarang (UPS)*

Unit Produksi Semarang (UPS) ini terletak di atas lahan seluas kurang lebih 39.913 m² yang merupakan milik sendiri dengan status HGB, dan berlokasi di Simongan, Semarang.

Unit produksi ini memproduksi minyak jarak (castor oil) yang banyak dipakai dalam produk kosmetika, obat-obatan, cat, karet dan lain-lain. UPS juga melakukan pemurnian minyak-minyak nabati seperti minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak kodolai, dan minyak kacang yang digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan susu dan biskuit. Disamping menghasilkan minyak jarak dan minyak nabati lainnya, unit produksi ini juga memproduksi kosmetika (badak).

6. *Unit Produksi Watudakon (UPW)*

Unit Produksi Watudakon (UPW) ini terletak di atas lahan seluas kurang lebih 78.576 m² dan berlokasi di Jombang, Jawa Timur. Lokasi ini merupakan milik sendiri dengan status HGB. Kegiatan UPW meliputi pertambangan Yodium dan produksi obat jadi.

Perseroan memiliki Kuasa Pertambangan (eksploitasi) dan fasilitas pengolahan Yodium di Indonesia dengan lahan seluas kurang lebih 1.000 ha yang berlokasi di daerah Jombang dan Mojokerto. Metode penambangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengeboran. Fasilitas pengolahan ini memiliki kapasitas produksi sekitar 140 ton/tahun dan rencananya akan dikembangkan menjadi sekitar 200 ton/tahun. Cadangan Yodium di wilayah ini diperkirakan akan cukup untuk sekitar 100 tahun dengan kapasitas output sekitar 250 ton/tahun. Kuasa Pertambangan Perseroan yang berlokasi di Jombang dan Mojokerto tersebut memiliki jangka waktu berkisar antara 20 hingga 30 tahun.

Pada tahun 1999 Perseroan melakukan investasi pembuatan empat sumur Yodium untuk memenuhi permintaan ekspor Yodium. Pengeboran sumur Yodium ini dikontrakkan kepada pihak ketiga dan sejak akhir tahun 1999 telah berproduksi.

Perseroan juga memiliki Kuasa Pertambangan (eksplorasi) baru di Pasuruan yang berlaku sampai tahun 2001 dan dapat diperpanjang. Untuk Kuasa Pertambangan ini, Perseroan sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan Jepang dalam bentuk penyusunan studi kelayakan.

Produk yang dihasilkan adalah Yodium dan garam-garamnya yaitu Kalium Yodat, Kalium Yodida, Natrium Yodida serta garam-garam lainnya seperti Kalium Klorida dan Natrium Klorida. Selain itu unit juga menghasilkan bahan baku Ferro Sulfat sebagai bahan baku pembuatan tablet besi sebagai obat tambah darah. UPW menghasilkan kapsul lunak "Yodiol" yang merupakan obat pilihan untuk pencegahan gondok dan Yodium test. Disamping menghasilkan produk di atas, unit produksi ini juga menghasilkan produk formulasi seperti tablet, tablet salut, kapsul lunak, salep, sirup dan cairan obat luar/dalam.

2.2.3. Kapasitas Produksi

Tabel berikut adalah tabel kapasitas produksi Perseroan beserta realisasinya berdasarkan bentuk sediaan dari Perseroan:

Urutan	Satuan (000)	1996	1997	1998	1999	2000
Tablet	Butir					
Realisasi Produksi		2.073.027	2.029.665	2.309.915	3.215.910	4.335.168
Kapasitas Terpasang		2.072.758	2.217.570	2.217.570	2.272.570	2.426.720
Utilisasi (%)		100,0%	91,5%	104,2%	141,5%	178,3%
Tablet Salut	Butir					
Realisasi Produksi		613.867	569.747	529.815	588.217	671.264
Kapasitas Terpasang		586.400	636.599	636.599	636.599	636.599
Utilisasi (%)		104,9%	89,5%	83,1%	92,4%	105,4%
Salap/Krim	Kg					
Realisasi Produksi		104	96	96	219	155
Kapasitas Terpasang		140	128	129	190	163
Utilisasi (%)		73,9%	75,1%	73,9%	115,1%	95,1%
Kapsul	Butir					
Realisasi Produksi		236.539	204.950	218.982	452.194	257.502
Kapasitas Terpasang		286.110	329.000	332.000	332.000	332.000
Utilisasi (%)		83,4%	71,4%	66,0%	136,2%	77,7%
Kapsul Lunak	Butir					
Realisasi Produksi		45.323	43.986	45.709	49.072	53.245
Kapasitas Terpasang		83.280	83.280	83.260	83.260	83.260
Utilisasi (%)		54,4%	52,8%	54,9%	58,9%	60,3%
Granul/Serbuk	Kg					
Realisasi Produksi		203	167	159	154	138
Kapasitas Terpasang		96	92	92	92	92
Utilisasi (%)		211,4%	182,2%	173,5%	167,2%	150,0%
Sirup Kering	Kg					
Realisasi Produksi		68	83	81	120	93
Kapasitas Terpasang		61	125	125	125	125
Utilisasi (%)		111,4%	66,4%	64,7%	101,1%	74,4%
Sirup/Suspensi	Liter					
Realisasi Produksi		734	595	505	706	790
Kapasitas Terpasang		713	1.010	1.010	1.010	1.010
Utilisasi (%)		103,0%	59,3%	50,0%	69,8%	72,3%
Tetes Mata	Liter					
Realisasi Produksi		-	-	3	1	1
Kapasitas Terpasang		11	11	11	11	11
Utilisasi (%)		0,0%	0,0%	24,3%	11,1%	9,1%
Ineksi	Liter					
Realisasi Produksi		17	13	11	34	10
Kapasitas Terpasang		18	18	18	18	18
Utilisasi (%)		94,4%	72,2%	61,7%	189,2%	56,1%
Pil KD	Siktus					
Realisasi Produksi		26.200	24.300	11.400	9.600	27.163
Kapasitas Terpasang		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Utilisasi (%)		139,4%	129,3%	60,6%	51,1%	144,6%
Bedak	Kg					
Realisasi Produksi		398	407	320	572	518
Kapasitas Terpasang		475	475	475	475	475
Utilisasi (%)		83,8%	85,5%	67,3%	120,3%	109,0%
Yodium	Kg					
Realisasi Produksi		96	107	69	74	127
Kapasitas Terpasang		140	140	140	140	140
Utilisasi (%)		68,6%	76,4%	49,6%	52,8%	90,7%
Kalium Yodat	Kg					
Realisasi Produksi		26	25	29	16	29
Kapasitas Terpasang		18	18	18	18	18
Utilisasi (%)		141,7%	158,8%	160,1%	88,4%	161,1%

Uraian	Satuan (000)	1996	1997	1998	1999	2000
Ferro Sulfat	Kg					
Realisasi Produksi		8	64	62	74	82
Kapasitas Terpasang		70	70	70	70	70
Utilisasi (%)		11,4%	91,4%	88,6%	105,7%	117,2%
Minyak & Minyak Atsiri	Kg					
Realisasi Produksi		3.557	2.547	1.476	3.445	3.710
Kapasitas Terpasang		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Utilisasi (%)		65,8%	47,0%	27,3%	63,6%	68,9%
Kina & Garam-2 Kina	Kg					
Realisasi Produksi		22	45	38	35	56
Kapasitas Terpasang		90	90	90	90	90
Utilisasi (%)		24,8%	51,6%	42,3%	39,8%	62,3%
AKDR	Unit					
Realisasi Produksi		613	416	110	281	89
Kapasitas Terpasang		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Utilisasi (%)		35,0%	23,8%	6,3%	16,1%	5,1%

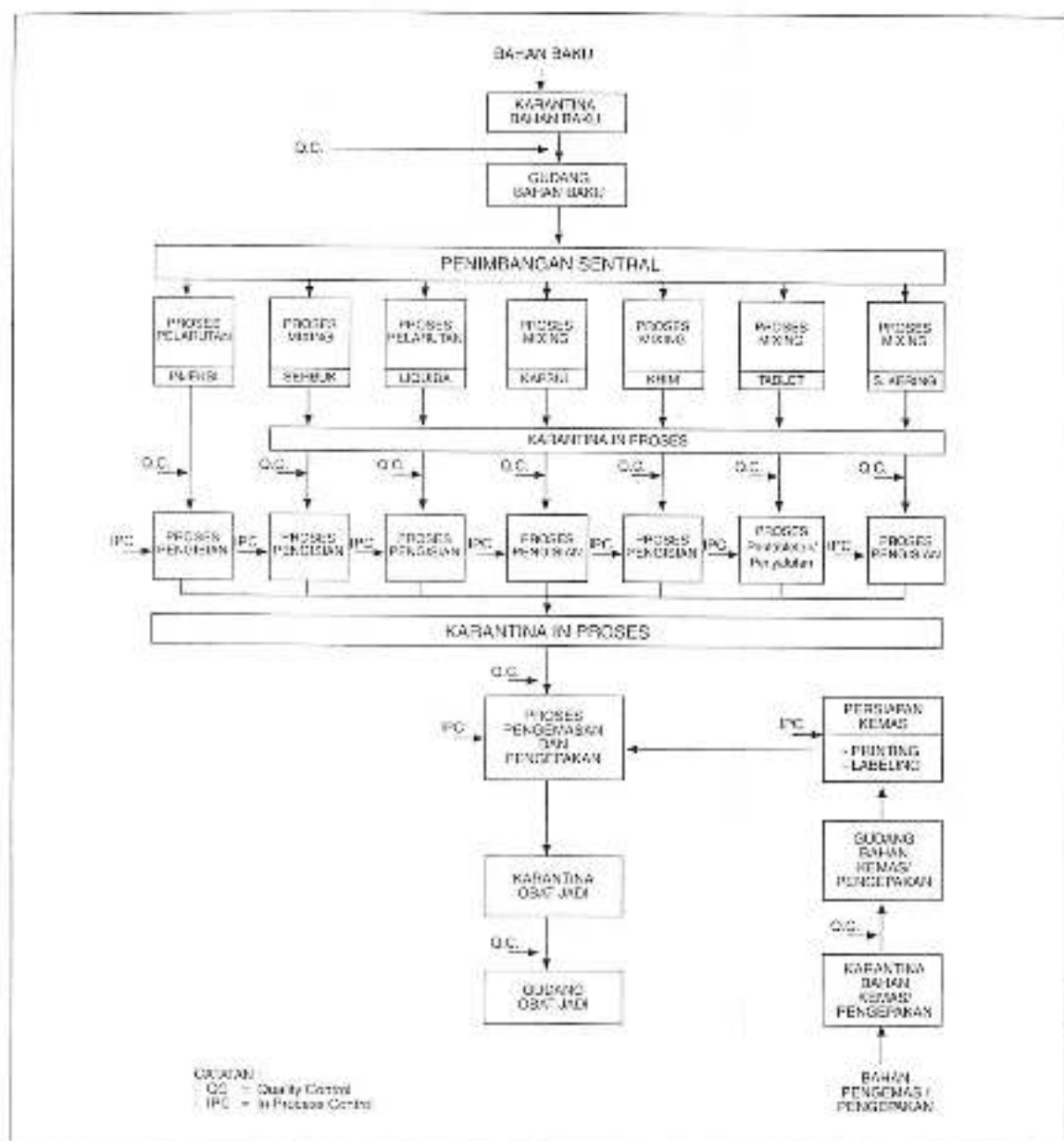
Catatan: Kapasitas terpasang adalah untuk kapasitas 1/satu shift kerja. Sedangkan utilisasi yang lebih dari 100% menunjukkan bahwa Perseroan melakukan penambahan shift kerja dan/atau toll manufacturing.

2.2.4. Proses Produksi

Proses produksi Perseroan dapat digolongkan menjadi proses produksi formulasi dan proses produksi bahan baku. Proses produksi pada divisi Formulasi terdiri dari beberapa macam proses yaitu antara lain proses produksi tablet, tablet salut gula atau selaput, kapsul, krim, sirup/suspensi, injeksi, serbuk, obat tetes, sirup kering, dan salep. Proses produksi bahan baku dilaksanakan oleh SBU Industri Bahan Baku Farmasi/Kimia yang meliputi proses produksi garam kina, Yodium, AKDR, pemurnian minyak nabati, bedak dan obat asli Indonesia.

Proses produksi formulasi Perseroan diawali dengan melakukan pemeriksaan bahan baku dan kemasan di laboratorium kontrol kualitas. Semua bahan baku dan kemasan harus telah dinyatakan lulus uji sebelum diserahkan ke bagian produksi. Selama proses produksi dilakukan In Process Control (IPC) dan setelah menjadi produk jadi dilakukan pula pemeriksaan mutu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

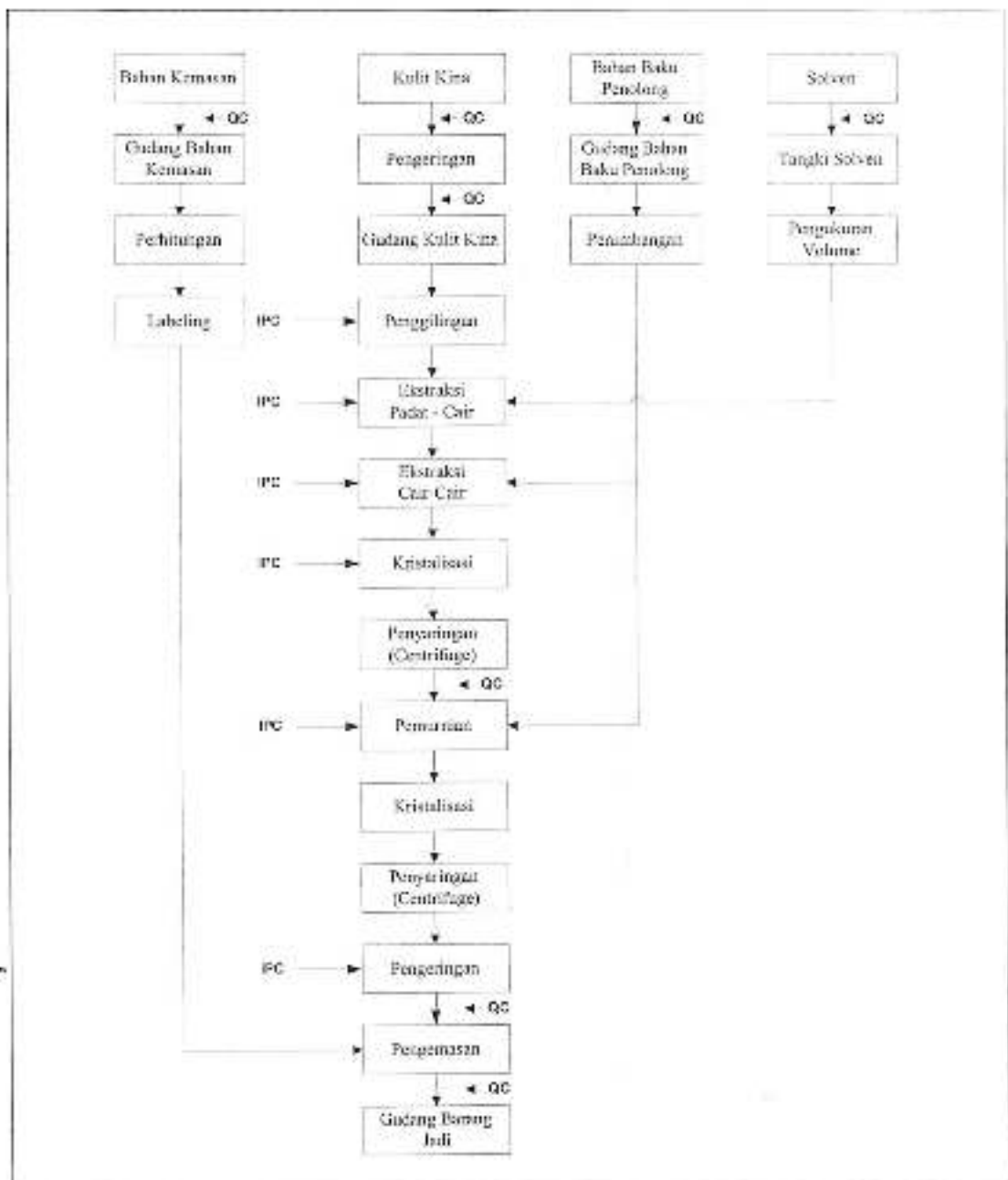
Secara sederhana proses-proses produksi tersebut dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Proses produksi bahan baku untuk beberapa produknya tidak jauh berbeda dengan proses produksi formulasi kaduati untuk proses garam kina, minyak jarak dan Yodium. Untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan, dari mulai kedatangan bahan baku, selama proses produksi sampai dengan pengemasan, dilakukan pengawasan secara terus menerus oleh bagian pengendalian dan pengawasan mutu.

Proses produksi garam kina dimulai dari pengeringan kulit kina, penggilingan, ekstraksi, pemurnian, kristalisasi sampai dengan pengemasan. Produk garam kina yang dihasilkan Perseroan yang merupakan salah satu proses produksi manufaktur telah memenuhi persyaratan internasional

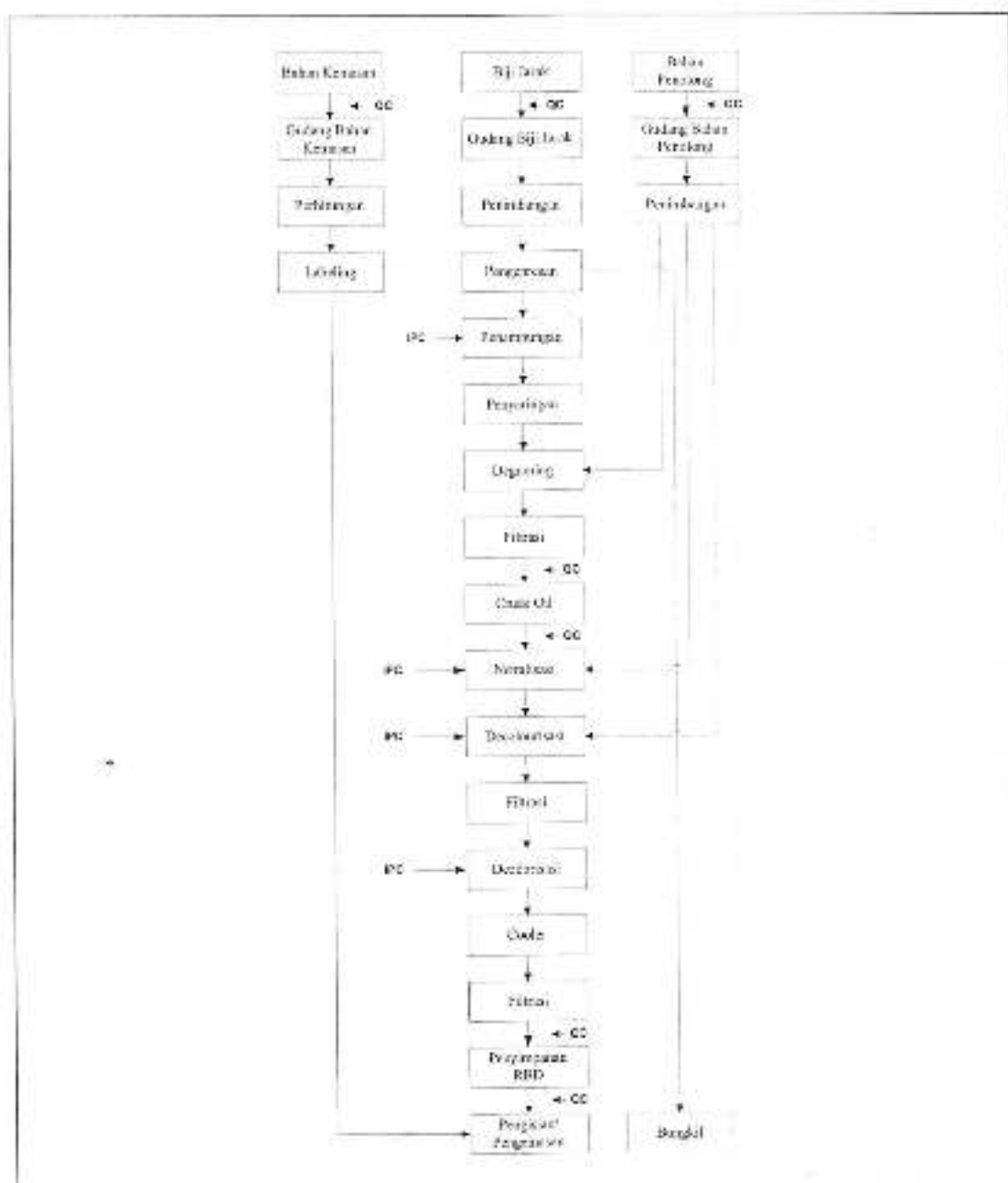
Diagram dibawah ini adalah proses produksi pembuatan kina



Proses pemurnian minyak jarak (castor oil) Perseroan dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap proses pressing dan tahap proses refining.

- i. Proses pressing. Biji jarak yang telah dibersihkan dari kotoran dipres dalam expeller. Minyak yang merupakan hasil dari pengepresan tersebut ditampung dalam tangki penampung yang kemudian digumpalkan dan disaring sehingga dihasilkan crude castor oil.
- ii. Proses refining. Crude castor oil dinetralkan (netralisasi), dihilangkan warnanya (decolourisasi) dan kemudian disaring. Hasil saringan tersebut dihilangkan baunya (deodorisasi), didinginkan dan kemudian disaring kembali untuk mendapatkan minyak jarak Refined Bleached Deodorized (RBD).

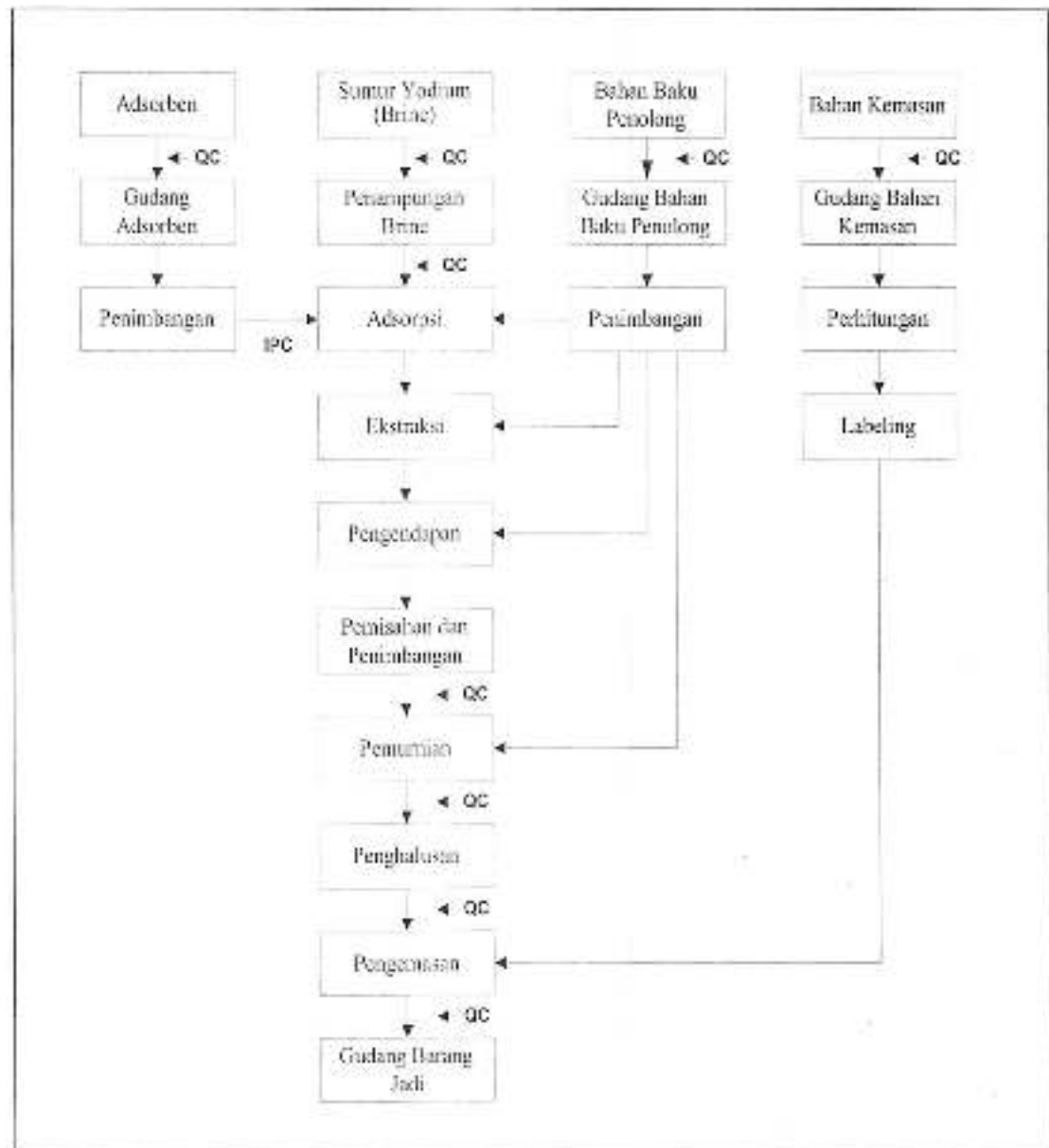
Diagram dibawah ini adalah proses produksi pembuatan minyak jarak



Proses produksi Yodium melalui dua tahap yaitu:

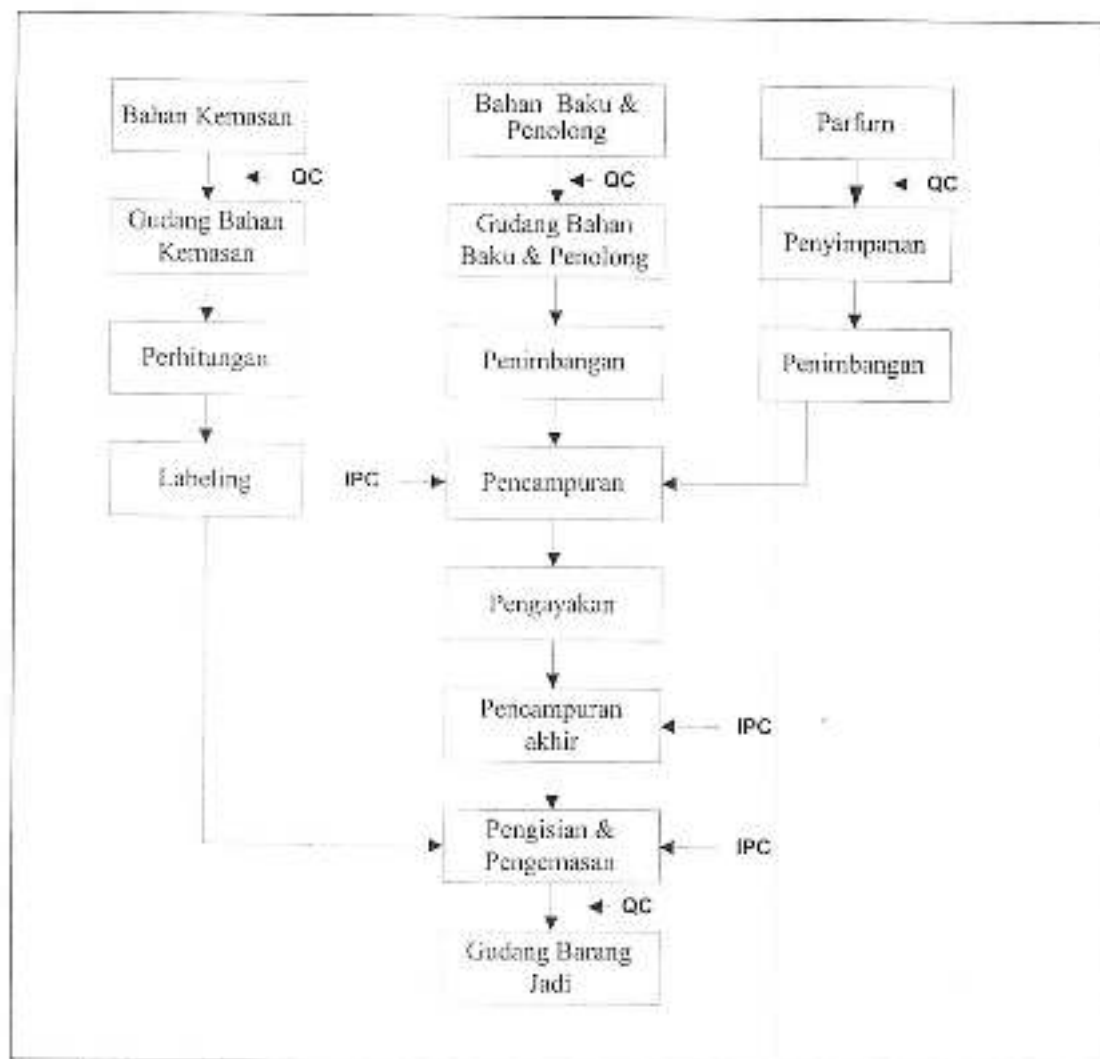
- i. Tahap pengendapan (jalur Yodium endap)
Tahap pengendapan dimulai dari proses adsorpsi air yang mengandung Yodium (brine), kemudian diekstraksi dan diendapkan. Endapan Yodium tersebut kemudian dikeringkan.
- ii. Tahap kristalisasi (Jalur Yodium kristal)
Tahap kristalisasi dimulai dari pemurnian Yodium endap dan kristal yang dihasilkan kemudian dihaluskan. Setelah itu dilakukan pengemasan.

Diagram dibawah ini adalah proses produksi pembuatan Yodium



Proses produksi bedak dimulai dari penimbangan bahan baku kemudian dilakukan pencampuran, pengayakan dan penambahan parfum, setelah itu didiamkan selama 24 jam lalu dilakukan pengayakan dan pencampuran kembali.

Diagram dibawah ini adalah proses produksi pembuatan bedak



2.2.5. Pengembangan dan Penelitian

Perseroan memiliki fasilitas laboratorium riset yang berlokasi di Jl. Cihampelas no. 5 Bandung yang antara lain berfungsi melakukan kegiatan pengembangan dan penelitian. Kegiatan pengembangan dan penelitian yang dilakukan berupa pengembangan formula produk baru maupun reformulasi produk lama untuk meningkatkan efektivitas obat dan efisiensi produksi. Disamping itu unit ini juga melakukan perbaikan kualitas, keamanan dan khasiat melalui uji toksisitas, stabilitas, ketersediaan hayati dan bioekivalensi.

Pada tahun 2000 kegiatan pengembangan dan penelitian yang dilakukan mencapai 24 jenis yang terdiri dari 20 jenis skala pilot dan 4 jenis skala laboratorium. Kegiatan pengembangan dan penelitian ini didukung oleh 53 orang tenaga ahli. Dalam kegiatan pengembangan formula produk baru, unit kerja ini mendapatkan masukan terutama dari Divisi Pemasaran.

Dari hasil penelitian telah dipasarkan 7 jenis Obat OTC, 6 jenis Obat Ethical dan 14 jenis Obat Generik dalam 5 tahun terakhir. Disamping teknologi produksi minyak beryodium yang dikemas dalam kapsul lunak dengan nama Yodiol, sebagai obat penanggulangan gangguan akibat kekurangan Yodium, Perseroan berhasil pula mengembangkan teknologi produksi bahan baku sinkonin dan sinkonidin.

Selain obat modern, Perseroan melakukan pengembangan obat asli Indonesia secara ilmiah, dengan menghasilkan produk-produk seperti Enkasari Lozenges sebagai obat sariawan dan penyegar napas, Fitodiar sebagai obat diare, Fitolac sebagai obat pelancar ASI, Fitaliv sebagai obat penyakit hati, Fitocholes untuk menurunkan kolesterol, Fitogaster untuk mengatasi gangguan lambung dan Fitocassol untuk anti kelmid.

Proses pengembangan produk baru umumnya memerlukan waktu 1 sampai 2 tahun hingga siap untuk dipasarkan. Secara umum suatu produk baru sebelum dapat dipasarkan harus menjalani uji toksisitas, uji khasiat, uji ketersediaan hayati (bioavailability), uji klinis dan harus didaftarkan pada Badan POM.

Dalam pengembangan produknya, Perseroan juga telah melakukan kerjasama penelitian dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

2.2.6. Pemasaran

Kegiatan pemasaran Perseroan ditangani oleh Divisi Pemasaran yang saat ini mempunyai tenaga pemasaran berjumlah 247 orang. Perseroan membagi kegiatan pemasarannya masing-masing untuk lini produk Obat Generik, Obat OTC, Obat Ethical dan Obat Lisensi. Divisi Pemasaran secara konsisten melakukan penelitian pasar baik berdasarkan data primer dan sekunder sehingga mampu menghasilkan strategi pemasaran yang tepat bagi Perseroan. Divisi ini juga membuat rencana pemasaran secara terpadu yang kemudian dikoordinasikan dengan unit terkait seperti produksi dan distribusi.

Perseroan melalui Divisi Pemasaran ini secara teratur mempromosikan Obat OTC melalui surat kabar, majalah, radio, TV, billboard, leaflet dan personal selling melalui OTC Representative. Untuk Obat Ethical, Perseroan melakukan promosi melalui personal selling, pameran, forum ilmiah dan seminar. Divisi Pemasaran juga secara teratur melakukan komunikasi kepada provider (dokter, bidan dan rumah sakit) di tingkat pusat maupun daerah. Selain melakukan promosi seperti Obat Ethical tersebut diatas, Obat Generik dipromosikan melalui iklan layanan masyarakat di media televisi dan penyuluhan kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Departemen Kesehatan.

Di sektor swasta, pangsa pasar produk Perseroan pada tahun 2000 mencapai sekitar 3% terhadap pasar farmasi nasional. Dalam upaya untuk meningkatkan pangsa pasarnya, Perseroan secara konsisten mengadakan pengembangan pasar dan produk-produk baru, serta melakukan promosi secara selektif. Biaya promosi dan pemasaran untuk tahun 2000 mencapai sekitar 6% dari total penjualan Perseroan.

2.2.7. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Upaya pelestarian lingkungan dilakukan dengan mengacu kepada dokumen yang telah disetujui oleh komisi AMDAL/Badan POM untuk Unit Produksi Formulasi dan bahan baku sesuai dengan peraturan Pemerintah guna menunjang program industri berwawasan lingkungan.

Pada tahun 1997, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000, akan berlaku efektif pada tanggal 7 Nopember 2000. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 3 Tahun 2000 tersebut berbagai kegiatan industri dengan luas penggunaan area tertentu (antara lain bila kegiatan industri berlokasi di kota kecil dengan luas area penggunaan 30 Ha atau lebih, atau bila berlokasi di luar wilayah perkotaan (rural) dengan area penggunaan 50 Ha atau lebih) dapat diwajibkan untuk membuat AMDAL. Pelaksanaan dari apa yang dimaksud dengan kegiatan industri tertentu tersebut akan dilihat kasus per kasus oleh instansi yang berwenang.

Dalam kegiatan produksinya Perseroan menghasilkan 3 macam limbah yaitu:

a. Limbah cair

Usaha-usaha pencegahan pencemaran air telah dilakukan oleh Perseroan dimulai dari melakukan penghematan pemakaian air, melakukan daur ulang terhadap air produksi dan pemanfaatan limbah cair setelah diolah untuk keperluan penghijauan dan mengolah limbah cair melalui Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPAL) yang dimiliki oleh Perseroan. Usaha-usaha pencegahan pencemaran air tersebut dilakukan agar dapat menjamin terpeliharanya kepentingan umum dan terjaganya keseimbangan lingkungan. Pengolahan limbah cair dilakukan melalui IPAL dengan beberapa tahap pengolahan secara Fisika, Kimia dan Biologi. Dengan sistem pengolahan secara terpadu tersebut zat-zat pencemar yang terdiri dari polutan fisik, polutan organik dan anorganik serta polutan biologis dapat direduksi sehingga menghasilkan buangan limbah cair yang memenuhi syarat untuk dibuang ke badan air penerima.

b. Limbah padat

Limbah padat berasal dari obat-obat kadaluarsa, debu dari dust collector, ampas karbon aktif dan bleaching earth dari decolourisasi minyak, endapan kapur tohor dan sisa ampas kulit kina. Penanganan terhadap limbah padat dilakukan dengan cara:

1. Untuk limbah padat yang berasal dari obat-obat kadaluarsa dan debu dari dust collector dengan cara mengumpulkan limbah padat tersebut ke tempat tertentu dan pada jumlah tertentu dikirim ke PPLI Cileungsi Bogor (tempat pengolahan limbah padat yang direkomendasi oleh Pemerintah)
2. Untuk limbah padat yang berasal dari ampas karbon aktif dan bleaching earth, endapan kapur tohor dan sisa ampas kulit kina digunakan untuk tanah urukan, setelah melalui analisa terhadap limbah padat tersebut

c. Limbah gas

Limbah gas berasal dari sisa pembakaran bahan bakar minyak dari generator listrik dan steam boiler. Usaha pencegahan pencemaran dilakukan dengan membuat cerobong asap yang dilengkapi dengan separator untuk memisahkan partikel debu dari gas buang, sehingga gas buang yang dibuang ke udara bebas telah bersih dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dalam hubungannya dengan analisa mengenai dampak lingkungan, Perseroan telah membuat:

1. Kegiatan pemantauan lingkungan yang dilakukan berupa monitoring efektivitas dan efisiensi Instalasi Pengolahan Air Limbah, kualitas udara, kualitas limbah padat, biologi perairan dan aspek sosial ekonomi budaya bekerjasama dengan unit-unit produksi terkait.
2. Pelaporan kegiatan pemantauan lingkungan secara periodik kepada BAPEDALDA, Komisi AMDAL Depkes, Badan POM dan instansi terkait lainnya
3. Melakukan perbaikan dan efisiensi secara terus menerus terhadap pengelolaan lingkungan yang ada.

Sehubungan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan penanganan limbah Perseroan telah memperoleh antara lain :

1. ISO 14001 untuk Unit Produksi Watudakon
2. Sahwali Award untuk Unit Produksi Formulasi Jakarta
3. Peringkat Biru dari Pemda setempat untuk Unit Produksi Bandung dan Unit Produksi Semarang

Untuk unit produksi Tanjung Morawa, meskipun telah mengikuti prosedur AMDAL yang seharusnya tetapi belum memperoleh sertifikat ISO ataupun lainnya.

2.3. SBU Pedagang Besar Farmasi (PBF)

SBU PBF memiliki 40 PBF yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk pusat pengaturan persediaan dan distribusi ke seluruh cabang PBF Perseroan. Masing-masing PBF memiliki gudang penyimpanan yang sebagian besar merupakan milik sendiri.

Berdasarkan data per 31 Desember 2000, SBU PBF Perseroan mendistribusikan produk kepada pelanggan yang terdiri dari sekitar 4.230 apotek termasuk apotek milik Perseroan, 2.005 grosir dan toko obat, 425 PBF pihak ketiga, 575 rumah sakit serta 315 instansi Pemerintah dan swasta.

Tabel berikut ini menunjukkan cabang-cabang PBF yang dimiliki oleh unit distribusi Perseroan :

Wilayah	Daerah	Jumlah PBF
Sumatera	Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan (Sumbagut), Palembang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Padang, Teluk Betung, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Batam (Sumbagsel),	12
Jawa	Purabaya, Matraman, Klaten, Bandungan, Majapahit, Bogor (DKI Jawa dan sekitarnya), Bandung, Cirebon (Jabar), Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan (Jateng dan DIY), Rungkut, Kramatmulya (Jatim)	15
Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kupang	3
Maluku	Ambon	1
Kalimantan	Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda	4
Sulawesi	Makassar, Palu, Kendari, Manado	4
Papua	Jayapura	1
Total		40

SBU PBF mendistribusikan produk-produk baik dari Perseroan, Prinsipal maupun dari produsen lain kepada apotek-apotek, rumah sakit, toko obat dan institusi Pemerintah maupun swasta. Per 31 Desember 2000 persentase nilai produk Perseroan dan lisensi yang didistribusikan oleh PBF mencapai kurang lebih 81% dari total nilai penjualan PBF dan 19%-nya merupakan penjualan produk pihak ketiga lain yang terdiri dari obat-obatan dan alat kesehatan. Penjualan oleh SBU PBF termasuk penjualan kepada apotek Perseroan. Untuk kegiatan distribusi ini PBF juga didukung oleh armada pengangkutan milik sendiri.

Tabel berikut ini menunjukkan hasil penjualan SBU PBF Perseroan berdasarkan produk :

Jenis Produk	(dalam jutaan Rupiah)				
	1996	1997	1998	1999	2000
Obat Ethical, Obat OTC, dll	61.825	59.548	80.182	67.268	146.098
Obat Lisensi	11.454	5.825	12.851	19.969	22.306
CGB	162.260	80.498	119.683	132.303	640.528
Bahan baku	2.469	1.137	2.879	3.637	1.298
Alat kesehatan	22.435	30.502	37.137	47.016	59.427
Pihak ketiga	20.925	127.825	141.268	271.764	123.520
Total	281.368	305.103	394.109	502.160	993.177

Tabel berikut ini menunjukkan hasil penjualan SBU PBF Perseroan berdasarkan segmen pasar :

Segmen pasar	(dalam jutaan Rupiah)				
	1996	1997	1998	1999	2000
Tender	84.530	86.035	147.521	203.895	363.054
Toko Obat	6.976	7.195	11.512	14.201	15.793
Apotek	42.477	47.253	82.610	111.751	118.817
PBF	14.383	15.818	19.408	35.198	54.183
Grosier	3.522	3.578	4.660	5.600	6.144
Sektor Pemerintah	129.480	144.224	130.107	230.245	435.149
Total	281.368	305.103	384.108	602.100	993.177

Perseroan sedang melaksanakan peningkatan sistem informasi SBU PBF yaitu dengan menerapkan sistem informasi yang mampu menghubungkan seluruh PBF Perseroan, dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan persediaan dan delivery system. Investasi sistem informasi ini dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 2 tahun dan diharapkan mulai bulan Juli tahun 2001 sistem ini sudah berjalan di seluruh PBF.

SBU PBF didukung oleh 270 orang tenaga penjualan yang secara aktif melakukan pemasaran secara langsung kepada apotek, rumah sakit, toko obat dan institusi Pemerintah maupun swasta. SBU PBF merencanakan untuk menambah jumlah tenaga penjualan untuk memperkuat kegiatan distribusi Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan pelatihan bagi tenaga penjualan untuk meningkatkan hasil penjualan Perseroan.

Unit Distribusi SBU PBF selain memasarkan produk hasil produksi Perseroan juga memasarkan produk dari produsen lain seperti PT Biofarma (Persero), PT Phapros (Persero) dan PT Indofarma (Persero) Tbk. untuk obat program Pemerintah, serta produk dari Prinsipal seperti antara lain: Abbott, Janssen, Sankyo, Mack, Solvay Duphar, Kasa Husada dan Busana Utama.

PBF juga melakukan penjualan kepada pelanggan institusi untuk produk-produk yang diproduksi oleh Perseroan maupun perbekalan farmasi dari Prinsipal mitra Perseroan.

SBU PBF juga memiliki unit perdagangan Alat-Alat Kesehatan dan Penyelidikan (AAKP) yang memasarkan dan menjual peralatan medis dan laboratorium untuk kebutuhan rumah sakit dan institusi lainnya. Keagenan yang dimiliki SBU PBF dibidang alat kesehatan adalah alat kesehatan habis pakai antara lain: jarum suntik dan infus set dari Bu Kwang Korea, IV Catheter, Foley Catheter dan Blood Administration Set dari Zhejiang Medicines China, benang bedah (cat gut dan silk) dari SMI Belgia serta plester dan Plaster Italia. Untuk pemasaran produk-produk ini Perseroan melakukan pemasaran langsung ke rumah sakit, laboratorium klinik, dokter dan institusi lainnya. Tenaga pemasaran alat-alat kesehatan Perseroan ini seluruhnya telah mendapat pendidikan khusus untuk menunjang keberhasilan pemasaran. Perseroan juga memberikan pelayanan prima jual untuk pemasaran produk-produk tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa bisnis alat-alat kesehatan ini masih potensial untuk dikembangkan.

Dalam hal persediaan, Perseroan berusaha melakukan pengelolaan persediaan secara efisien dalam upaya menekan biaya operasional. Per 31 Desember 2000 rata-rata umur persediaan Perseroan mencapai sekitar 24 hari. Untuk PBF yang berada di daerah yang terpencil umumnya memiliki periode umur persediaan yang lebih panjang.

Untuk penjualan kepada apotek milik Perseroan maupun kepada pihak ketiga, SBU PBF memberikan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 45 hari. Sedangkan pembelian dari pihak ketiga, SBU PBF memperoleh jangka waktu pembayaran selama 45 hari. Umur rata-rata piutang SBU PBF per 31 Desember 2000 adalah sekitar 39 hari.

2.4. SBU Apotek

Kegiatan apotek Perseroan, selain melayani resep dokter juga menyediakan pelayanan lain yang berupa konter swalayan, praktek dokter, optik dan laboratorium klinik.

a. Apotek

Apotek Perseroan merupakan salah satu jaringan apotek yang terbesar di Indonesia. Jaringan ini diarahkan untuk mendekatkan, memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Per 31 Desember 2000, Perseroan memiliki 210 apotek yang terdiri dari 59 apotek yang berada di dalam rumah sakit dan 151 apotek yang berlokasi di luar rumah sakit, yang tersebar di ibukota provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. Perseroan memiliki 84 apotek yang beroperasi 24 jam per hari, terutama yang berada di dalam rumah sakit. Apotek Perseroan beroperasi rata-rata 14 jam per hari. Sekitar 99% dari obat-obatan yang disediakan oleh apotek Perseroan merupakan obat jadi, sedangkan sisanya merupakan obat racikan.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan jumlah apotek Perseroan berdasarkan lokasi:

Lokasi Apotek	1996	1997	1998	1999	2000
Apotek di luar rumah sakit	95	105	110	121	151
Apotek di dalam rumah sakit	58	58	62	59	59
Total	153	163	172	180	210

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2001, jumlah apotek Perseroan telah menjadi 218 apotek. Perseroan membagi SBU apotek ke dalam 8 unit perapotekan daerah seperti pada tabel berikut.

Unit Perapotekan Daerah Perseroan per 31 Maret 2001

Unit	Kota	Jumlah Apotek
Sumatera Bagian Utara	Banda Aceh, Lhokseumawe, Beureuen, Langsa, Kabanjane, Medan, Belawan, Lubuk Pakam, Tanjung Gading Asehan, Tebing Tinggi, Permatang Siantar, Kiseran, Tanjung Balai, Rantau Prapat	29
Sumatera Bagian Selatan	Pekanbaru, Tanjung Pinang, Batam, Padang, Bukit Tinggi, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Metro, Tanjung Balai Karimun	26
DKI Jaya dan sekitarnya	Jakarta, Bogor, Tangerang, Pontianak	31
Jawa Barat	Bandung, Cimahi, Karawang, Sukabumi, Cikarang, Cimahi	18
Jawa Tengah	Semarang, Pekalongan, Tegal, Cilacap, Yogyakarta, Bantul, Klaten, Surakarta, Boyolali, Purwokerto, Kudus	23
Jawa Timur	Surabaya, Sidoarjo, Bangli, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Kediri, Madiun, Jember, Bangkalan, Sampit, Banjarmasin, Palangkaraya, Banjar Baru, Muaraduwu	42
Bali dan Nusa Tenggara	Bali, Denpasar, Singaraja, Tabanan, Mataram, Selong, Kupang, Maumere	19
Daerah Timur	Makassar, Bone, Pare-pare, Pomalaa, Kendari, Tana Toraja, Manado, Kota Mobaigu, Ambon, Ternate, Belikpapan, Samarinda, Tarakan, Palu, Jayapura, Sorong	30
Total		218

Setiap apotek Perseroan dipimpin oleh apoteker yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengadaan obat hingga penyerahan obat kepada pelanggan.

Penjualan di apotek Perseroan dilakukan secara tunai dan kredit yang besarnya masing-masing 58% dan 42%, penjualan tunai umumnya dilakukan kepada individual, sedangkan untuk penjualan kredit kepada institusi. Dalam melakukan pembelian, apotek Perseroan memperoleh jangka waktu kredit sekitar 45 hari.

Perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan Perseroan antara lain adalah PT Asuransi Kesehatan, PT Garuda Sentra Medika, PT Jamsostek, PT PLN, PT Telkom Tbk, PT Angkasa Pura, PT Pos Indonesia, PTPN, Pertamina, Bank Indonesia dan lain-lain.

Perseroan telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit untuk pelayanan apotek. Per 31 Maret 2001 terdapat 57 apotek Perseroan yang berlokasi di rumah sakit. Penurunan dibandingkan tahun 2000, dikarenakan terdapat dua apotek dalam Rumah Sakit yang ditutup yaitu apotek Perseroan di RS Pematang Siantar, Sumatera Utara dan RS Adji di Makassar. Perseroan juga telah menjalin kerjasama yang baik untuk jangka lebih dari 10 tahun dengan rumah sakit seperti RS Dr. Cipto Mangunkusumo (DKI Jakarta), RS Dr. Sardjito (Yogyakarta), RS Sanglah (Bali), RS Malalayang (Manado), RS Dr. Suradji Tirtonegoro (Klaten), RS Dr. M. Djamil (Padang) dan lain-lain.

Bangunan apotek yang dimiliki Perseroan per 31 Maret 2001 sejumlah 86 apotek merupakan milik sendiri, sedangkan sejumlah 59 apotek adalah menyewa dan sejumlah 73 apotek melalui kerjasama dengan metode pembagian hasil yaitu antara lain berdasarkan persentase dari penjualan dan profit sharing.

Perseroan menyadari bahwa prospek usaha di bidang perapotekan ini akan terus meningkat, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah apotek baru dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan untuk menarik pelanggan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis apotek ini antara lain meliputi faktor pelayanan, pengelolaan persediaan, lokasi, serta sistem informasi yang mendukung yang telah dimiliki dan akan terus dikembangkan oleh Perseroan.

Faktor pelayanan merupakan hal yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan suatu apotek. Saat ini berbagai diferensiasi telah dilakukan oleh apotek-apotek untuk menarik pelanggan dalam memberikan layanan yang lebih memuaskan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan tersebut, Perseroan merencanakan untuk melakukan klasifikasi apotek sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan.

Perseroan menyadari bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan apotek dan untuk memberikan pelayanan yang optimal adalah kemampuan dalam mengelola tingkat persediaan obat-obatan yang akan mampu mengurangi tingkat kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan. Tingkat rata-rata umur persediaan apotek Perseroan per 31 Desember 2000 adalah 32 hari.

Dalam melakukan pembukaan apotek, Perseroan telah melakukan penelitian baik dari segi geografis dan demografis, mengingat potensi suatu apotek sangat ditentukan oleh faktor lokasi. Apotek yang mudah diakses, dekat dengan provider (dokter, rumah sakit) dan lingkungan pemukiman akan lebih menguntungkan Perseroan.

Sistem informasi yang mendukung juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen yang semakin kritis. Perseroan berkeyakinan bahwa penggunaan sistem informasi akan mampu meningkatkan sistem pengelolaan persediaan, efisiensi SDM, kecepatan informasi, dan posisi tawar apotek terhadap pemasok, sehingga mutu pelayanan dapat ditingkatkan. Perseroan sedang dalam proses memperbaiki sistem informasi yang terintegrasi untuk apoteknya. Dengan demikian Perseroan mengharapkan biaya operasi dapat ditekan sementara kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Investasi yang dilakukan adalah untuk jangka waktu 2 tahun dan diharapkan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2001.

Pendapatan apotek pada tahun 2000 sebesar Rp 474.099 juta telah mengalami peningkatan sebesar 106,3% dibandingkan pendapatan tahun 1996 sebesar Rp 229.849 juta.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pendapatan apotek Perseroan berdasarkan wilayah :

(dalam jutaan Rupiah)

Unit	1996	1997	1998	1999	2000
Sumatera Bagian Utara	23.111	25.986	37.439	45.333	51.100
Sumatera Bagian Selatan	21.207	23.914	37.487	41.822	41.208
DKI Jaya dan sekitarnya	56.856	61.848	73.341	89.183	95.270
Jawa Barat	24.061	26.911	29.507	32.029	36.309
Jawa Tengah	26.898	31.007	39.311	51.551	61.596
Jawa Timur/Bali Nusa Tenggara	53.796	62.161	79.397	98.635	116.499
Daerah Timur	23.828	28.248	41.776	58.729	71.537
Total	229.849	260.065	338.270	417.482	474.099

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang mencakup daerah operasi apotek yang berada di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur telah dibentuk Perseroan sejak 1 Agustus 2000, tetapi secara akuntansi baru dipisahkan dari wilayah Jawa Timur sejak awal tahun 2001, dikarenakan jumlah pendapatannya yang masih relatif kecil.

b. Praktek Dokter

Dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Perseroan menyediakan ruangan praktek bagi dokter, yang umumnya terletak di bangunan apotek Perseroan. Per tahun 2000, terdapat 396 dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di lingkungan apotek Perseroan tersebut. Perseroan bermaksud untuk menambah jumlah tempat praktek dokter, serta secara selektif menarik dokter-dokter yang potensial ke tempat praktek yang disediakan Perseroan.

c. Laboratorium Klinik

Di samping itu, Perseroan juga melengkapi fasilitas apoteknya dengan menyediakan laboratorium klinik yang masing-masing berlokasi di Jakarta, Bogor, Pontianak, Bandung, Surabaya, Bali, Balikpapan dan Banjarmasin. Laboratorium yang dimiliki oleh Perseroan memberikan pelayanan pemeriksaan standar yaitu antara lain pemeriksaan darah, urine dan radiology. Perseroan berkeyakinan bahwa jasa pelayanan laboratorium klinik ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan akan dikembangkan lebih lanjut.

d. Optik

Sampai dengan akhir tahun 2000, Perseroan mengoperasikan 22 optik yang terletak dalam bangunan apotek Perseroan. Optik-optik yang dimiliki Perseroan antara lain berada di Jakarta (12 optik), Bogor (2 optik), Pontianak (1 optik), Bandung (5 optik) dan Bali (2 optik). Optik Perseroan melayani pemeriksaan mata, penjualan kaca serta bingkaiacamata. Perseroan merencanakan untuk meningkatkan jumlah optiknya menjadi 60 optik pada akhir tahun 2005 dan mengembangkannya pada lokasi-lokasi di luar apotek Perseroan seperti pada mal-mal perbelanjaan atau tempat strategis lainnya. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, pendapatan optik Perseroan mencapai Rp 1.740 juta.

3. PROSPEK USAHA

3.1. Prospek Usaha Obat Jadi

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, maka pemakaian obat-obatan juga akan meningkat sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada Perseroan untuk meningkatkan kegiatan produksi, distribusi maupun kegiatan pelayanan di bidang kesehatan.

a. Tingkat Konsumsi Obat Per Kapita

Pada 31 Desember 1999 tingkat konsumsi obat di Indonesia yaitu sebesar US\$3,88/kapita merupakan yang terendah di antara beberapa negara di Asia. Sebagai perbandingan, Malaysia dan Thailand, mengkonsumsi obat sekitar 4 kali lebih banyak dibandingkan Indonesia, sehingga masih terdapat prospek bagi pasar farmasi di Indonesia untuk meningkat dimasa datang. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tingkat konsumsi obat per kapita di beberapa negara Asia

(dalam US\$)

	Tahun				
	1995	1996	1997	1998	1999
Indonesia	5,46	6,54	6,00	2,20	3,88
Korea Selatan	92,98	99,91	88,61	65,91	83,46
Taiwan	74,58	80,92	77,16	75,31	87,65
Singapura	50,65	57,10	61,94	47,89	56,32
Hongkong	47,10	56,88	52,62	55,16	53,72
Filipina	16,61	18,61	17,65	14,25	15,62
Thailand	14,44	16,95	15,07	9,50	12,04
Malaysia	13,33	14,81	14,93	10,14	11,71

Sumber: IMS Health

b. Pasar Farmasi

Pasar Farmasi di Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan data pada tahun 1999 dimana konsumsi obat per kapita Indonesia masih yang terendah. Walaupun demikian pasar farmasi di Indonesia masih lebih besar dari pada pasar farmasi di Thailand, Malaysia, Hongkong dan Singapura karena jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu sekitar 207 juta dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sekitar 2% per tahun. Hal ini akan memberikan peluang bagi peningkatan permintaan terhadap produk-produk Perseroan.

Pasar farmasi di Asia dan Australia

(dalam US\$ juta)

	1995	1996	1997	1998	1999
Australia	-	2821	2.919	2.725	3.143
Jepang	61.119	52.819	46.887	43.579	53.548
Cina	3.510	4.130	4.980	5.570	6.222
Korea Selatan	4.183	4.496	4.067	3.053	3.911
India	1.668	2.970	3.437	3.910	3.410
Taiwan	1.619	1.757	1.688	1.639	1.937
Filipina	1.168	1.290	1.253	1.042	1.167
Indonesia	1.090	1.277	1.171	444	804
Thailand	906	1.041	921	587	743
Hongkong	345	343	344	371	375
Malaysia	210	277	301	227	266
Singapura	158	194	205	186	214

Sumber: IMS Health

c. **Pergeseran Pola Konsumsi Obat**

Pasar Obat Generik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan baik di sektor apotek, toko obat maupun rumah sakit. Hal ini sejalan dengan adanya pergeseran pola konsumsi obat dari obat nama dagang ke Obat Generik yang memiliki manfaat dan khasiat yang sama yaitu sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Perkembangan Obat Generik ini terlihat pada tabel berikut ini dimana penjualan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan. Untuk tahun 2000, data IMS Health menunjukkan bahwa penjualan Obat Generik meningkat sebesar 31% menjadi sekitar Rp 824.000 juta dibandingkan dengan total penjualan di tahun 1999.

Perkembangan Penjualan Obat Generik

	1996	1997	1998	1999	2000
Penjualan Obat Generik	230	253	437	630	824
Pertumbuhan	N/A	10%	73%	44%	31%

Sumber: IMS Health

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih banyak menggunakan Obat Generik yang dilakukan melalui penggunaan Obat Generik di rumah sakit Pemerintah, institusi kesehatan Pemerintah maupun sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat di media massa.

3.2. Prospek Usaha Obat Asli Indonesia

Obat Asli Indonesia yang dihasilkan Perseroan mempunyai potensi yang semakin besar mengingat saat ini adanya kecenderungan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan dan/atau digunakan sebagai pengobatan alternatif. Pasar Obat Asli Indonesia untuk tahun 2000 adalah sebesar Rp 684.770 juta dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan. Untuk itu Perseroan melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran Obat Asli Indonesia.

3.3. Prospek Usaha Yodium

Pasar Yodium dunia saat ini adalah sekitar 18.650 MT yang terutama dipasok oleh Chili, Jepang, Amerika dan Indonesia. Dari jumlah tersebut, Indonesia hanya memberi kontribusi sekitar 0,5%. Dengan demikian, Perseroan yang merupakan satu-satunya perusahaan milik negara penghasil Yodium, memiliki peluang untuk meningkatkan produksinya yang pada saat ini baru mencapai 140 ton per tahun menjadi 200 ton per tahun pada tahun 2002 yang ditujukan untuk pasar ekspor.

3.4. Prospek Usaha PBF dan Apotek

PBF sebagai jaringan distribusi Perseroan dan apotek sebagai jaringan ritel yang menyediakan jasa layanan kesehatan kepada masyarakat menjadi penunjang pemasaran produk Perseroan. PBF dan apotek memiliki prospek untuk berkembang sejalan dengan masih sangat besarnya peluang pasar bagi produk Farmasi, sehubungan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Selain itu Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan peluang bagi Perseroan untuk memperluas jaringan distribusi dan apotek dalam upaya menjangkau penduduk di seluruh pelosok Indonesia.

a. PBF

PBF Perseroan pada saat ini berjumlah 40 masih dapat terus ditingkatkan jumlah dan jangkauannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan pembangunan infrastruktur seperti penambahan propinsi baru dan perkembangan fasilitas kesehatan misalnya penambahan jumlah rumah sakit Pemerintah maupun swasta, puskesmas, apotek, toko obat dan lainnya. Dengan adanya infrastuktur PBF yang terus berkembang, Perseroan memiliki prospek untuk lebih banyak menyalurkan produk farmasi Perseroan maupun Prinsipal lain.

b. Apotek

Dari sekitar 5.700 apotek yang ada di Indonesia, yang beberapa diantaranya tergabung dalam jaringan apotek, Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki jaringan yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan memiliki sekitar 3,7% dari total apotek di seluruh Indonesia, dengan pangsa pasar sekitar 13% dari total pasar apotek, yang menunjukkan bahwa apotek Perseroan mempunyai produktivitas sekitar 3,5 kali dari rata-rata apotek di Indonesia.

Dengan jaringan apotek yang besar, Perseroan memiliki daya tarik yang lebih dibandingkan pesaing, sehingga akan memberikan peluang untuk bekerjasama dalam mendistribusikan produk dari Prinsipal terkemuka serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menambah apotek baru melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu, skala kegiatan yang besar memberikan posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemasok bagi Perseroan.

4. STRATEGI USAHA

Perseroan berusaha untuk menjadi perusahaan farmasi terintegrasi yang terbaik dan terhormat di Indonesia, dengan dukungan unit produksi yang kuat dan jaringan distribusi serta penjualan yang menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan menerapkan strategi Perseroan sebagai berikut:

1. Dalam upaya menghasilkan produk bahan baku dan obat jadi unggulan, Perseroan akan meningkatkan kapasitas produksi, sarana dan prasarana penunjang yang meliputi :
 - a. Investasi mesin-mesin baru untuk kegiatan produksi non betalaktam
 - b. Penyediaan fasilitas baru untuk produk betalaktam, Obat Asli Indonesia dan produk kosmetika
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi di area konsesi penambangan dengan melakukan peningkatan produksi Yodium
 - d. Riset dan pengembangan produk baru, reformulasi produk yang sudah ada, kerjasama lisensi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian/perguruan tinggi.
2. Meningkatkan penjualan Perseroan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi jaringan penjualan serta produk yang ada, yaitu antara lain dengan:
 - a. Perluasan cakupan pasar dengan penambahan tenaga penjualan, distributor dan/atau sub distributor
 - b. Penambahan jumlah apotek, utamanya melalui kerjasama, sewa dan/atau membeli apotek
 - c. Penambahan produk baru
 - d. Peningkatan pemasaran baik di dalam maupun luar negeri.
3. Meningkatkan kontribusi produk yang diproduksi Perseroan terhadap total Penjualan Perseroan yaitu melalui peningkatan efektivitas pemasaran dengan meningkatkan kegiatan promosi dan pengembangan produk termasuk produk Obat Asli Indonesia dan kosmetik.

4. Memperkuat posisi distribusi dengan menjalin kerjasama dengan industri farmasi (Prinsipal baru non Perseroan) dan industri lainnya baik dari dalam maupun luar negeri serta mencari keagenan alat-alat kesehatan. Selain itu untuk meningkatkan mutu layanan, Perseroan menambah sarana dan prasarana penunjang operasi/kendaraan, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga penjual.
5. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan karyawan.
6. Melaksanakan efisiensi biaya dengan meningkatkan sistem informasi melalui teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan persediaan, delivery system dan pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk membuat posisi Perseroan tetap kompetitif.
7. Memperkuat posisi jaringan pelayanan di bidang kesehatan melalui:
 - a. Peningkatan mutu pelayanan dengan mempercepat pelayanan, memperbaiki tampilan fisik dan penyusunan standard operating procedure dengan menggunakan pendekatan standar sistem mutu serta melakukan klasifikasi apotek.
 - b. Peningkatan loyalitas pelanggan, antara lain dengan memperkenalkan kartu keanggotaan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

5. KOMPETISI

Pada industri farmasi tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki pangsa pasar domestik lebih dari 10%. Perseroan menghadapi persaingan dari beberapa perusahaan farmasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun perusahaan farmasi nasional yang jumlahnya mencapai kurang lebih 200 perusahaan. Untuk Obat Ethical, pada akhir tahun 2000 Perusahaan PMA menguasai pangsa pasar sebesar sekitar 50% sedangkan untuk pasar Obat OTC perusahaan farmasi nasional menguasai pangsa pasar sebesar sekitar 54%.

Pada tahun 2000, berdasarkan laporan IMS, Perseroan menguasai sekitar 3% pangsa pasar farmasi domestik. Untuk Obat Generik Perseroan merupakan salah satu perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di pasar domestik yaitu sekitar 23%, sedangkan untuk Obat Ethical dan Obat OTC Perseroan menguasai pangsa pasar masing-masing sekitar 3% dan 2%.

Untuk Obat Ethical, Perseroan bersaing langsung dengan produsen antara lain : PT Sanbe, PT Kalbe Farma Tbk, PT Dixa Medica, PT Aventis dan PT Novartis. Pesaing utama Perseroan untuk Obat Generik adalah PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Dixa Medica dan PT Phapros (Persero) sedangkan untuk Obat OTC, Perseroan bersaing dengan produsen antara lain: PT Tempo Scan Pacific Tbk, PT Konimex, PT Medifarma dan PT Kalbe Farma Tbk.

Pada tahun 2000, Perseroan memiliki sekitar 3.7% apotek dari jumlah apotek yang ada, dengan pangsa pasar sekitar 13% dari seluruh pasar yang ada. Perseroan menghadapi pesaing dari apotek swasta seperti antara lain apotek Melawai, Guardian, Century ataupun apotek-apotek lain milik perseorangan. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Perseroan terus berupaya meningkatkan faktor pelayanan sebagai aspek paling utama keberhasilan usaha selain juga terus berupaya mengembangkan, pengelolaan persediaan, pemilihan lokasi yang tepat, serta sistem informasi yang efektif.

Pesaing yang dihadapi SBU PBF selain dari perusahaan distribusi seperti PT Indofarma Global Medika, PT Anugrah Pharmindo Lestari, PT Rajawali Nusindo (Persero), PT Enseval Mega Trading Tbk dan lain-lain juga dari produsen farmasi lainnya yang dapat secara langsung mendistribusikan produknya. Per tahun 2000, jumlah PBF Perseroan adalah sekitar 2% dari seluruh jumlah PBF yang terdaftar di

Departemen Kesehatan. Dalam upaya menghadapi persaingan ini, Perseroan terus berupaya meningkatkan ketrampilan para sales forcenya dan juga mengembangkan sistem informasi agar dapat menunjang upaya untuk meningkatkan penjualan PBF.

6. ASURANSI

Perseroan mengasuransikan bangunan kantor, mesin dan peralatan, barang dagangan serta uang tunai yang ada pada Perseroan, baik untuk kantor pusat, pabrik, pedagang besar farmasi, apotek maupun rumah dinas milik Perseroan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Ramayana dan PT Asuransi Parolamas. Adapun jenis-jenis asuransi yang telah ditutup oleh Perseroan adalah :

1. Asuransi kebakaran; untuk gedung/bangunan kantor pusat, pabrik, barang dagangan, pedagang besar farmasi, apotek maupun rumah dinas milik Perseroan.
2. Asuransi Kebongkaran; untuk peralatan dan perlengkapan kantor dan barang dagangan baik untuk kantor pusat, pabrik, pedagang besar farmasi, apotek maupun rumah dinas milik Perseroan.
3. Asuransi Cash in Safe; uang yang berada dalam penyimpanan pada Perseroan, baik kantor pusat, pedagang besar farmasi, maupun apotek milik Perseroan, terutama risiko kehilangan.
4. Asuransi Kendaraan Bermotor; seluruh kendaraan yang dimiliki oleh Perseroan diasuransikan sesuai dengan Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
5. Asuransi Pengangkutan, seluruh barang dagangan yang diangkut oleh kendaraan dari perusahaan ekspedisi ataupun kendaraan Perseroan sendiri untuk dikirim dari pabrik ke PBF ataupun ke outlet, apotek dan lain-lain, diasuransikan sesuai dengan jumlah barang dagangan yang diangkut tersebut.

Manajemen Perseroan percaya bahwa pertanggungan asuransi telah cukup memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia.

7. LAIN-LAIN

Perseroan telah memperoleh surat keterangan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak melalui surat No. SH-131/WPJ.06/BD.03/2001 tanggal 17 April 2001 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, maupun Pajak Bumi dan Bangunan. Surat keterangan fiskal ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 2002.

X. IKHTISAR INDUSTRI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PERSEROAN

1. INDUSTRI FARMASI

1.a. Industri Obat Jadi

a. Umum

Industri farmasi di Indonesia terdiri dari 193 perusahaan dimana 4 perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara, 33 perusahaan merupakan PMA serta sisanya merupakan perusahaan domestik. Saat ini 9 perusahaan farmasi telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dimana 5 perusahaan merupakan perusahaan domestik sedangkan 4 perusahaan lainnya merupakan PMA.

Seluruh perusahaan farmasi memiliki nilai penjualan sebesar Rp 7,4 triliun per 31 Desember 1999 dan pada Desember 2000 mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 31% menjadi sekitar Rp. 9,7 triliun, dimana 20 perusahaan farmasi dengan pangsa pasar terbesar, menguasai sekitar 53% dari pangsa pasar industri farmasi (Sumber: IMS). Namun, pada industri farmasi di Indonesia tidak terdapat perusahaan yang memiliki pangsa pasar domestik lebih dari 10%.

Berdasarkan data IMS tahun 2000, perusahaan domestik menguasai sekitar 51% pangsa pasar industri farmasi Indonesia, baik untuk Obat Ethical maupun Obat OTC, yaitu dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 50% dan 54%. Hal ini disebabkan karena produk domestik memiliki harga yang lebih murah, iklan yang agresif serta produk-produk yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.

b. Produk

Produk industri farmasi di Indonesia secara umum terdiri dari 2 kategori yaitu: Obat Ethical dan Obat OTC yang dapat pula dikategorikan menjadi Obat Nama Dagang dan Obat Generik. Obat Ethical menguasai sekitar 60% dari total penjualan obat di Indonesia. Namun pertumbuhan dari Obat Ethical lebih rendah daripada Obat OTC. Pada tahun 2000 Obat OTC dan Obat Ethical mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 36% dan 28%. Nilai penjualan Obat Nama Dagang adalah sekitar 91,5% dari total penjualan perusahaan farmasi di Indonesia dan sisanya yaitu sekitar 8,5% adalah Obat Generik. (Sumber : IMS)

c. Konsumsi Obat

Tingkat konsumsi obat-obatan di Indonesia, pada tahun 1999, yaitu sebesar US\$3,88 / kapita merupakan yang terendah di ASEAN. Malaysia dan Thailand mengkonsumsi obat-obatan 4 kali lebih banyak dibandingkan Indonesia. Tingkat konsumsi obat-obatan Indonesia hanya sekitar 0,5% dari GDP, masih di bawah tingkat konsumsi yang direkomendasikan WHO yaitu sekitar 5% dari GDP. Hal ini menunjukkan masih besarnya potensi pasar domestik untuk produk-produk farmasi.

d. Regulasi Pemerintah dan Penetapan Harga

Industri farmasi pada umumnya terikat pada regulasi yang sangat ketat, baik produksi maupun pemasaran.

Deregulasi Pemerintah pada bulan Mei 1990 memperbolehkan perusahaan-perusahaan farmasi mengimpor barang jadi. Namun barang jadi tersebut harus diimpor dari negara-negara anggota Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Masyarakat

Ekonomi Eropa (diluar Spanyol dan Portugis), Jepang, Australia dan Selandia Baru. Perusahaan-perusahaan farmasi dilarang mengimpor dari negara-negara selain anggota PIC, kecuali perusahaan farmasi di negara-negara tersebut telah diaudit oleh Badan POM.

Harga produk-produk farmasi tidak ditetapkan oleh Pemerintah, tetapi perusahaan-perusahaan farmasi harus menginformasikan kepada Pemerintah untuk setiap kenaikan harga dari produk-produknya. Pemerintah hanya menetapkan harga untuk Obat Generik Berlogo.

1.b. Industri Bahan Baku

a. Bahan Baku Garam Kina

Garam kina diperoleh dari kulit tanaman kina yang memiliki ciri tertentu yaitu membutuhkan iklim, komposisi tanah maupun ketinggian tanah yang spesifik, sehingga hanya dapat hidup antara 15° LU dan 15° LS. Tanaman kina dapat tumbuh dengan baik di Amerika Selatan, Afrika dan Indonesia.

Penggunaan garam kina selain untuk obat, juga digunakan dalam industri minuman ringan (Tonic Water).

Kebutuhan garam kina dunia adalah sekitar 400 ton per tahun. Kebutuhan ini relatif stabil bahkan sebagai bahan baku obat cenderung akan mengalami penurunan.

Pelaku bisnis di industri kina relatif sedikit yaitu PT Sinkona Indonesia Lestari dari Indonesia, DSM Minera BV dari Belanda dan Perseroan sendiri sehingga masih ada peluang pasarnya. Ekspor produk kina Indonesia ditujukan ke negara Belanda, Kanada, Pakistan dan India.

b. Yodium

Produk Yodium digunakan untuk kebutuhan industri yang berteknologi tinggi dan berskala besar, antara lain untuk industri farmasi, X-ray contrast media, herbisida, photography dan food additive.

Pada saat ini produksi Yodium dunia adalah sekitar 18.650 MT yang dihasilkan oleh Chili, Jepang, Amerika dan Indonesia. Dari jumlah produksi dunia tersebut, Indonesia menghasilkan 0,5% sedangkan Jepang dan Chili menghasilkan sekitar 87% dari produksi Yodium dunia tersebut. Pada saat ini Yodium dari Indonesia diekspor antara lain ke India, Belanda, Inggris dan Australia.

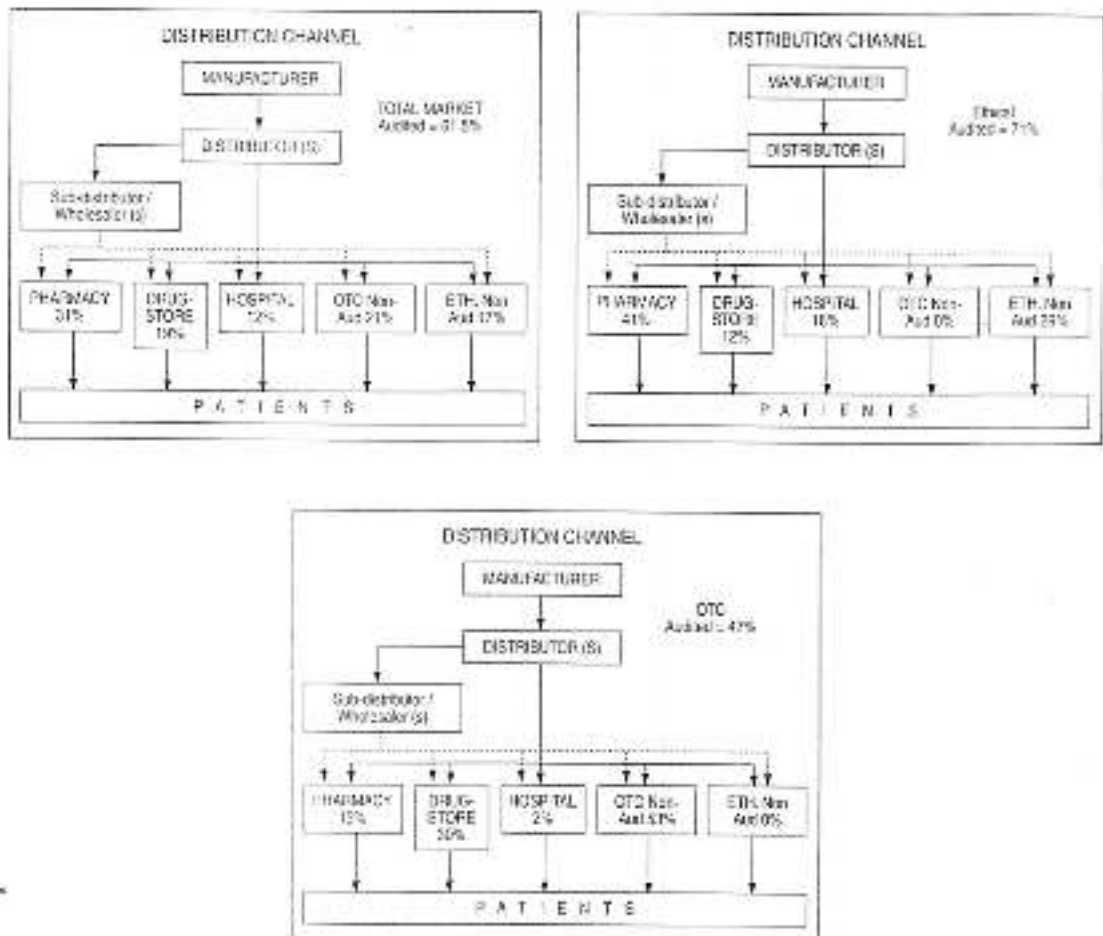
2. INDUSTRI OBAT ASLI INDONESIA

Industri Obat Asli Indonesia/tradisional menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari jumlah sarana produksi obat tradisional yang tumbuh sekitar 50% sejak tahun 1996 hingga tahun 2000 yaitu dari sebesar 543 sarana produksi menjadi 815 sarana produksi. Sarana produksi obat tradisional terbagi dalam 2 kategori yaitu industri obat tradisional dan industri kecil obat tradisional. Pada tahun 1999 pasar obat tradisional di Indonesia adalah sekitar Rp 685 miliar atau jika dibandingkan dengan pasar farmasi hanya sekitar 7%.

3. INDUSTRI DISTRIBUSI DAN RITEL

Produk farmasi pada umumnya dipasarkan melalui jaringan distribusi yang dikenal dengan Pedagang Besar Farmasi yang kemudian disalurkan ke apotek, toko obat, rumah sakit dan saluran distribusi lain seperti toko serba ada, supermarket, pedagang eceran untuk dapat dipasarkan ke pasien atau konsumen.

Grafik di bawah menunjukkan jaringan distribusi per data IMS tahun 2000 untuk total produk farmasi, Obat Ethical dan Obat OTC.



Industri PBF dan apotek adalah bagian dari industri farmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari industri kesehatan secara keseluruhan. Menurut data yang ada di Badan POM per 31 Desember 2000 jumlah PBF mencapai kurang lebih 1.728 buah, apotek mencapai kurang lebih 5.700 dan toko obat berizin sekitar 5.600 yang tersebar di seluruh Indonesia.

XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998 dan 1997 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi terhadap kegiatan usaha Perseroan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, yang angkanya berasal dari dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2000	1999	31 Desember 1998	1997	1996 ¹
Aktiva					
Aktiva Lancar					
Kas dan setara kas	176.317	186.269	262.369	6.299	5.752
Deposito berjangka	35.623	-	-	-	-
Piutang usaha	131.602	99.867	108.563	74.723	83.690
Persediaan	248.425	264.804	178.728	76.716	78.171
Aktiva lancar lainnya	47.798	38.146	11.102	23.074	28.914
Jumlah Aktiva Lancar	638.063	589.086	561.762	180.812	196.527
Aktiva Tidak Lancar					
Aktiva pajak tangguhan	1.824	1.742	2.513	3.466	3.974
Investasi jangka panjang	4.103	4.166	6.284	4.740	4.765
Aktiva tetap	293.392	63.792	75.488	73.180	73.455
Aktiva tidak lancar lainnya	26.980	25.338	16.908	18.268	14.072
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	326.399	115.038	101.193	99.654	96.266
Jumlah Aktiva	964.462	704.124	662.955	280.466	292.793
Kewajiban dan Ekuitas					
Kewajiban Lancar					
Pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia	65.000	111.500	-	-	855
Hutang bank	5.101	-	22.924	38.929	60.787
Hutang usaha	161.841	121.248	222.365	86.885	81.968
Hutang pajak	65.404	31.612	19.607	1.035	3.891
Uang muka penjualan	51.429	61.282	14.420	1.719	1.097
Dana subsidi diterima dimuka	-	30.777	48.892	-	-
Kewajiban lancar lainnya	47.910	69.955	42.012	18.012	19.704
Jumlah Kewajiban Lancar	416.685	446.374	368.220	156.551	173.282
Kewajiban Tidak Lancar					
Hutang bank jangka panjang	-	-	9.122	16.785	11.914
Pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia	7.800	7.800	111.500	-	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	7.800	7.800	119.622	16.785	11.914
Jumlah Kewajiban	424.485	454.174	487.842	173.336	185.196
Jumlah Ekuitas^{1d}	539.977	249.950	175.113	107.130	107.597
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	964.462	704.124	662.955	280.466	292.793

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali Laba Per Saham)

Uraian	31 Desember				
	2000	1999	1998	1997	1996 ¹⁾
Penjualan Bersih	1.517.153	1.059.115	793.685	565.172	525.423
Beban Pokok Penjualan	963.402	705.876	524.488	415.725	368.480
Laba Kotor	553.751	353.239	259.198	169.447	156.943
Beban Usaha	303.829	250.394	168.877	139.729	146.286
Laba Usaha	249.922	102.845	90.321	29.718	10.657
Perhasilan (Beban) Lain-lain	(8.251)	34.219	6.900	(20.775)	596
Laba Sebelum Pajak	241.671	137.064	97.222	8.943	11.253
Beban Pajak	71.852	38.918	28.552	8.076	7.224
Laba Bersih ²⁾	169.819	98.146	68.670	867	4.029
Laba Per Saham Dasar ³⁾	33,96	19,65	14,17	0,17	0,91

Rasio - Rasio Penting

(dalam %)

Uraian	31 Desember				
	2000	1999	1998	1997	1996 ⁴⁾
Rasio-rasio Keuangan					
Jumlah aktiva lancar / jumlah kewajiban lancar	153,13%	131,97%	152,58%	115,50%	113,41%
Jumlah kewajiban / jumlah ekuitas	78,61%	181,71%	278,59%	181,80%	172,12%
Jumlah kewajiban / jumlah aktiva	44,01%	64,50%	73,59%	61,80%	63,20%
Rasio-rasio Usaha					
Laba kotor / penjualan bersih	36,50%	33,36%	33,07%	29,96%	29,87%
Laba usaha / penjualan bersih	16,47%	9,71%	11,55%	5,06%	2,03 %
Laba bersih / penjualan bersih	11,19%	9,27%	9,04%	0,15%	0,77 %
Laba usaha / jumlah ekuitas	48,28%	41,14%	51,70%	27,74%	9,82%
Laba bersih / jumlah ekuitas	31,45%	29,31%	40,47%	0,81%	3,76 %
Laba usaha / jumlah aktiva	25,91%	14,31%	13,66%	10,80%	3,64%
Laba bersih / jumlah aktiva	17,81%	13,95%	10,70%	0,31%	1,38 %
Rasio Pertumbuhan					
Penjualan bersih	43,24%	39,15%	33,92%	11,37%	9,57%
Laba kotor	58,76%	36,23%	52,97%	7,95%	11,26%
Laba usaha	143,00%	13,61%	204,80%	178,34%	(58,00%)
Laba sebelum beban pajak	76,32%	40,70%	989,37%	(20,67%)	(80,03%)
Laba bersih setelah pajak ⁵⁾	72,85%	38,93%	8.074,16%	(79,59%)	(76,03%)
Jumlah aktiva	36,97%	6,21%	138,38%	(4,21%)	14,25%
Jumlah kewajiban	(6,54%)	(6,90%)	181,44%	(6,40%)	27,38%
Jumlah ekuitas	116,03%	42,74%	63,48%	(0,43%)	(2,65%)

- Dihitung untuk menyesuaikan PSAK 45 dan penyesuaian pembatasan secara akrual lainnya, grafikasi, biaya manajemen dan lain-lain berdasarkan pengumuman yang sebelumnya dibebankan ke saldo laba.
- Jumlah saham beredar yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999, 1998, 1997 dan 1996 adalah sebesar 5.000 juta saham.
- Kenaikan laba bersih tahun 1998 sebesar Rp 70.003 juta atau 8.074,16 % dari laba bersih tahun 1997 terutama disebabkan peningkatan penjualan pada Obat Generik dan alat kesehatan di PBF dari sektor Pemerintah sehubungan program pemerintah dalam mengatasi krisis dalam Poliklinik Kesehatan Dasar, kenaikan harga jual yang signifikan kurang lebih 100% sehubungan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, biaya penelitian produk yang dijual pada tahun 1998 relatif lebih rendah karena diperoleh sebelum depresiasi Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat serta peningkatan hasil investasi dan deposito.
- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 April 2001, ditentukan laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 sebesar Rp 125.790 juta dan Rp 37.360 juta sebagai saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan dividen tahun buku 2000 serta saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 125.000 juta dikapitalisasi untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 2 April 2001.

XII. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi terhadap kegiatan usaha Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

	2000	31 Desember 1999	1998
Modal dasar	1.500.000	400.000	400.000
Modal ditempatkan dan disetor	375.000	100.000	100.000
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	1.827	41.173	5.323
Tidak ditentukan penggunaannya	163.150	106.777	69.790
Jumlah Ekuitas	539.977	249.950	175.113

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Desember 1997, sebagaimana tercantum dalam akta No. 19 tanggal 16 Januari 1998 dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-2579.HT.01.04.TH.98 tanggal 30 Maret 1998, pemegang saham menyetujui :

- Peningkatan modal dasar dari Rp 35.000 juta, terbagi atas 3.500 saham yang terdiri dari 700 saham prioritas dan 2.800 saham biasa dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 10 juta per saham menjadi Rp 400.000 juta yang terbagi atas 400.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 23.000 juta, terbagi atas 700 saham prioritas dan 1.600 saham biasa dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 10 juta per saham menjadi Rp 100.000 juta, terbagi atas 100.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 77.000 juta tersebut dilakukan melalui kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp 66.501 juta dan tambahan modal disetor sebesar Rp 10.499 juta.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Agustus 2000, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 22 tanggal 14 September 2000 yang dibuat di hadapan Wahjono Hardjo, SH, pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-20934.HT.01.01-TH.2000 tanggal 19 September 2000, pemegang saham menyetujui :

- Peningkatan modal dasar dari Rp 400.000 juta, terbagi atas 400.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 1.500.000 juta yang terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 2.999.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 500 per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000 juta, terbagi atas 100.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp 1 juta per saham menjadi Rp 375.000 juta, yang terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 749.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 500 per saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 275.000 juta tersebut dilakukan melalui kapitalisasi :

- Cadangan umum sebesar Rp 110.382 juta yang diambil dari cadangan umum sampai dengan tahun buku 1998 sebesar Rp 41.174 juta dan cadangan umum tahun 1999 sebesar Rp 69.208 juta.
- Salisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 164.618 juta.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 2 April 2001, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1 tanggal 2 April 2001 dan pernyataan keputusan rapat No. 46 tanggal 23 April 2001, keduanya dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian laba tahun buku 2000 untuk dividen sebesar Rp 37.360 juta dan cadangan umum sebesar Rp 125.790 juta. Jumlah bantuan untuk Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ditetapkan sebesar Rp 3.396 juta yang telah termasuk dalam jumlah dividen yang ditetapkan tersebut diatas. Pembayaran dividen sebesar Rp 33.963 juta akan disetor selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2001.

Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 April 2001, sebagaimana tercantum dalam akta No. 2 tanggal 2 April 2001 dan pernyataan keputusan rapat No. 47 tanggal 23 April 2001, keduanya dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui:

- Peningkatan modal dasar dari Rp 1.500.000 juta, terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 2.999.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 500 per saham menjadi Rp 2.000.000 juta yang terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 19.999.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 100 per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 375.000 juta, terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 749.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 500 per saham menjadi Rp 500.000 juta, yang terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 4.999.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 100 per saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 125.000 juta tersebut dilakukan melalui kapitalisasi cadangan umum.
- Penjualan saham dalam simpanan dan/atau penjualan saham milik Negara Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 49%, yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Direksi dan Komisaris, kecuali untuk penetapan harga jual saham.
- Perseroan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 180.000.000 Saham Seri B Baru untuk karyawan dan manajemen Perseroan dalam program kepemilikan saham untuk karyawan dan manajemen Perseroan yang terbagi atas program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen dan program hak opsi.

Berdasarkan hasil laporan minat karyawan dan manajemen tanggal 24 April 2001 sehubungan dengan program Penawaran Saham kepada karyawan dan manajemen di atas diketahui bahwa pernyataan minat karyawan dan manajemen atas saham Perseroan sejumlah 54.000.000 saham yang pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat. Harga saham untuk jumlah tersebut ditentukan sebesar Rp 180 per saham. Pembayaran saham tersebut dilakukan oleh karyawan dan manajemen secara tunai dan penuh, dengan cara pemotongan maksimum 50% dari bonus yang akan diterima oleh karyawan dan manajemen pada tahun 2001 dan sisanya akan dibayar melalui pinjaman dari Perseroan dalam jangka waktu 2 tahun dan dikenakan bunga berkisar antara 0% sampai dengan 14% per tahun sesuai jenjang jabatan karyawan dan manajemen. Berdasarkan RUPSLB dan Surat Keputusan Direksi saham yang dibeli oleh karyawan dan manajemen tersebut mempunyai syarat-syarat khusus antara lain hanya dapat dijual kembali setelah 8 bulan sejak tanggal pencatatan dan pembayaran telah dilunasi oleh karyawan dan manajemen.

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2000

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agiu Saham	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2000	375.000	-	1.827	169.160	639.977
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2000 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
- Dividen	-	-	-	(37.360)	(37.360)
- Cadangan umum	-	-	125.790	(125.790)	-
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui kapitalisasi saldo laba	125.000	-	(125.000)	-	-
- Penawaran Umum sejumlah 500.000.000 saham seri B baru kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 200 per saham	50.000	50.000	-	-	100.000
- Penawaran Saham bagi Karyawan dan Manajemen sejumlah 54.000.000 saham seri B baru	5.400	4.960	-	-	10.260
- Pengeluaran sebanyak 126.000.000 Saham Seri B baru untuk pelaksanaan hak opsi saham *)	12.000	14.400	-	-	27.060
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2000 sesudah Penawaran Umum Saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp 100 per saham	568.000	69.360	2.617	-	639.967

*) Diasumsikan seluruh hak opsi dilaksanakan dengan harga pelaksanaan Rp 230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, pada tahun buku 2001 dan selanjutnya manajemen bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai atas laba tahun 2001 dan selanjutnya dengan perincian sebagai berikut :

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak atas dividen yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama. Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Direksi Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan jumlah setinggi-tingginya 30% dari sisa laba yang belum ditentukan penggunaannya (sisa laba setelah dikurangi cadangan umum dan cadangan lainnya (jika ada)) kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

XIV. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10, tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen, atau bagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Sedangkan untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan pada saat Penawaran Umum perdana. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-Undang No. 10, tahun 1994.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain penanaman modal dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor: SE-28/PJ-43/1995 tanggal 22 Mei 1995 perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 antara lain atas Bunga Obligasi dan Dividen yang diterima Wajib Pajak orang Pribadi (Seri Pph Ps. 23/Ps.26 No.6), maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 tanggal 1 Mei 2001 dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21 tanggal 8 Juni 2001 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang keduanya dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (lembar saham)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek :		
PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	461.967.500	92,39
Penjamin Emisi Efek :		
PT Agung Securities Indonesia	400.000	0,08
PT Andalan Aritra Advisindo Sekuritas	1.000.000	0,20
PT Bali Securities (terafiliasi)	750.000	0,15
PT Bapindo Bumi Sekuritas (terafiliasi)	2.000.000	0,40
PT Betavia Aritama Sekurindo	750.000	0,15
PT BNI Securities (terafiliasi)	712.500	0,14
PT Ciptadana Sekuritas	2.000.000	0,40
PT Danatama Makmur Securities	500.000	0,10
PT Dangdang Sekuritas	600.000	0,12
PT Dinamika Usaha Jaya	100.000	0,02
PT Dongrah Kolibindo Securities	150.000	0,03
PT Gajah Nusantara Sekuritas	350.000	0,07
PT Gandasura Sekuritas	300.000	0,06
PT General Capital Indonesia	250.000	0,05
PT Global Inter Capital	250.000	0,05
PT Ichiyoshi Securities Indonesia	100.000	0,02
PT Inter-Pacific Securities (terafiliasi)	100.000	0,02
PT Inti Hikasa Sekurindo	1.300.000	0,26
PT Kapila Sekurindo	500.000	0,10
PT Kencana Invesartha Sekuritas	100.000	0,02
PT Kresna Graha Sekurindo	100.000	0,02

Nama Penjamin Emisi Efek	Portofolio Penjaminan (Jumlah Saham)	%
PT Ludlow Securities	1.000.000	0,20
PT Madani Securities	750.000	0,15
PT Makinda Securities	100.000	0,02
PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	250.000	0,05
PT Mashil Jaya Securities	100.000	0,02
PT Millenium Atlantik Securities	300.000	0,05
PT Mitra Investidana Sekurindo	600.000	0,12
PT Naga Sekuritas (terafiliasi)	1.000.000	0,20
PT Panin Sekuritas	1.500.000	0,30
PT Pratama Penaganara	1.000.000	0,20
PT Pridana Futura Centra Investama (PDCFI)	250.000	0,05
PT Samuel Sekuritas Indonesia	235.000	0,05
PT Sarijaya Pemana Sekuritas	7.000.000	1,40
PT Santra Investindo	1.500.000	0,30
PT Sinarmas Sekuritas	1.500.000	0,30
PT Suprinvest Central Gani	1.000.000	0,20
PT Suprasurya Danawan Sekuritas	500.000	0,10
PT Surabaya Arthaselaras	550.000	0,11
PT Topas Multi Securities	1.000.000	0,20
PT Transpacific Securindo	85.000	0,02
PT Trimingham Securities	4.000.000	0,80
PT Usaha Bersama Sekuritas	1.000.000	0,20
PT Victoria Kapitalindo Internasional	250.000	0,05
PT Wanleg Securindo	500.000	0,10
PT Yulia Sekurindo	50.000	0,01
Jumlah	500.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut :

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama,

Negara Republik Indonesia memiliki 100% (Seratus persen) saham dengan nominal Rp. 100 per saham atau 100% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Negara Republik Indonesia memiliki 100% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa (Persero), sedangkan PT Danareksa (Persero) memiliki 99,99% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa Sekuritas.

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. **Akuntan Publik:** **Hans Tuanakotta & Mustofa**
Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu
Wisma Antara, Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Selatan No.17
Jakarta 10110

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. **Notaris:** **Imas Fatimah, SH**
Wisma Danamon Aetna Life Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Pusat

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

3. **Konsultan Hukum:** **Bahar, Tjajo & Partners**
Graha Niaga Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna menilai informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

4. **Biro Administrasi Efek :** PT Datindo Entrycom
Wisma Diners Club Annex
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai peraturan yang berlaku.

5. **Perusahaan Penilai :** PT Asian Appraisal Indonesia
Jalan Musi No. 38
Jakarta 10150

Tugas dan kewajiban Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan secara langsung pada lokasi aktiva tetap Perseroan dan memberikan pendapat atas nilai pasar aktiva tetap Perseroan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar atas aktiva tetap Perseroan yang dinilai per tanggal 31 Desember 2000

Properti yang dinilai meliputi aktiva tetap yang terdiri atas tanah, bangunan-bangunan dan sarana-sarana pelengkap lainnya.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAHAR, TIAJO & PARTNERS
Counsellors at Law

No. Ref.: 004/BTP/Ext-L/VI/2001

11 Juni 2001

Kepada yang terhormat,

PT DANAREKSA SEKURITAS

Plaza Bapindo Menara II Lt.17-19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190

u.p. **Heru Djojo Adhiningrat**
Managing Director

**PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana**

Dengan hormat,

Atas permintaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Hukum tanggal 14 Maret 2001, melalui penawaran umum saham perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham seri B dan sejumlah 54.000.000 (lima puluh empat juta) saham seri B yang ditawarkan dan dijual melalui penawaran umum kepada karyawan dan manajemen Perseroan, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) (selanjutnya disebut "IPO"), maka kami, Rambun Tjajo, Partner pada, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum BAHAR, TIAJO & PARTNERS, berkantor di Graha Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") dengan nomor pendaftaran 179/STTD-KH/PM/1998, selaku konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perseroan, telah melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami terhadap Perseroan No.Ref. 002/BTP/Ext-L/V/2001 tanggal 2 Mei 2001 juncto 003/BTP/Ext-L/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 (selanjutnya disebut "LPDSH") yang disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT Danarekxa Sekuritas dengan tembusan kepada BAPEPAM.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan LPDSH yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Berdasarkan LPDSH dan dengan mengingat asumsi sebagaimana tertera di bawah ini, dengan ini kami sampaikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dokumen pendirian, akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diumumkan berturut-turut dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia No.4 tahun 1969;
- b. Lembaran Negara Republik Indonesia No.18 tahun 1971;
- c. Berita Negara Republik Indonesia No.90 tanggal 9 Nopember 1971, Tambahan No.508/1971;
- d. Berita Negara Republik Indonesia No.16 tanggal 23 Pebruari 1988, Tambahan No.219/1988;
- e. Berita Negara Republik Indonesia No.74 tanggal 15 September 1998, Tambahan No.5281/1998;
- f. Berita Negara Republik Indonesia No.101 tanggal 19 Desember 2000, Tambahan No.7759/2000.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam akta pendirian telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali, yang perubahan terakhirnya dilakukan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.82 tanggal 27 April 2001 ("Akta No. 82") yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-00458/HT.01/04 TH.2001 tanggal 1 Mei 2001 yang pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Akta pendirian dan perubahan-perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegaskan keabsahan dan keberlakuan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan izin-izin yang dikeluarkan oleh badan atau instansi Pemerintah yang berwenang, sepanjang pengetahuan kami, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya kegiatan usaha dibidang industri kimia, farmasi, biologi dan kesehatan serta industri makanan dan minuman dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mengadakan, menghasilkan, mengolah bahan kimia, farmasi, biologi dan lainnya yang diperlukan guna pembuatan sediaan farmasi, kontrasepsi, kosmetika, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/minuman dan produk lainnya termasuk bidang perkebunan dan pertambangan yang ada hubungannya dengan produksi di atas;
- b. Memproduksi pengemas dan bahan pengemas, mesin dan peralatan serta sarana pendukung lainnya, baik yang terkait dengan industri farmasi maupun industri lainnya;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari hasil produksi seperti di atas, baik hasil produksi sendiri maupun

- hasil produksi pihak ketiga, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha Perseroan;
- d. Berusaha di bidang jasa, baik yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan maupun jasa, upaya dan sarana pemeliharaan dan pelayanan kesehatan pada umumnya termasuk jasa konsultasi kesehatan;
- e. Jasa penunjang lainnya termasuk pendidikan, penelitian dan pengembangan sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan No KP.1002/FS/154/2001 tanggal 11 Juni 2001 (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Perseroan**"), sampai dengan tanggal surat tersebut Perseroan hanya melakukan kegiatan usaha sebagaimana termuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.82 tanggal 27 April 2001 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia berdasarkan Keputusan No C 00458/HT.01.04.TH.2001 tanggal 1 Mei 2001, struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut.

Modal Dasar	:	Rp.2.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 1 saham seri A Dwi Warna dan 19.999.999.999 saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00.
Modal yang ditempatkan	:	Rp.500.000.000.000,00 yang terbagi atas 1 saham seri A Dwi Warna dan 4.999.999.999 saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00.
Modal yang disetor	:	Rp.500.000.000.000,00 yang terbagi atas 1 saham seri A Dwi Warna dan 4.999.999.999 saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00.

4. Susunan pemegang saham dan komposisi saham Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Negara Republik Indonesia	1 saham seri A Dwi Warna 4.999.999.999 saham seri B	Rp500.000.000.000,00	100,00
Jumlah	1 saham seri A Dwi Warna 4.999.999.999 saham seri B	Rp500.000.000.000,00	100,00

Sepanjang LPDSH, yang dikonfirmasi oleh Direksi dalam Surat Pernyataan Perseroan, kami berpendapat bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam draft final Prospektus adalah benar.

5. Bahwa pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Drs. Darodjatun, MBA
Direktur Pemasaran	: Drs. Tatong Suryanto;
Direktur Produksi	: Drs. Syarief Bastaman;
Direktur Keuangan	: Drs. Nugroho Widjajanto;
Direktur Umum dan Personalia	: Drs. Saleh Rasidi.

Komisaris:

Komisaris Utama	: DR. E. Sutarto, SKM;
Komisaris	: Prof. DR. dr. Azrul Azwar, MPH;
Komisaris	: Prof. DR. M. Ryaas Rasjid, MA.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, para anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat secara sah, dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, jabatan para anggota Direksi dan Komisaris belum diakhiri berdasarkan suatu keputusan pemerintah maupun keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan yang sah ataupun berdasarkan sebab-sebab lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Perseroan telah memiliki semua izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai suatu perusahaan industri, distribusi dan perdagangan yang berhubungan dengan farmasi, kimia, biologi dan kesehatan dari instansi yang berwenang, kecuali izin-izin yang secara tegas diakui Direksi Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan sedang dalam pengurusan perpanjangan, pembaharuan atau yang dalam proses pengumpulan, sebagaimana dirinci dalam Bab II LPDSH beserta lampiran-lampirannya. Sepanjang pengetahuan kami, Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan telah memiliki perizinan dan persetujuan lingkungan untuk pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, dinyatakan bahwa Perseroan selalu memenuhi kewajiban yang disyaratkan dari perizinan dan persetujuan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
8. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, manajemen Perseroan bersama-sama dengan Serikat Pekerja Kimia Farma sedang membuat Kesepakatan Kerja Bersama.

Sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja Kimia Farma dan ikut dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) untuk seluruh karyawan Perseroan dan Perseroan telah melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai upah minimum regional yang berlaku. Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, sebagaimana dirinci dalam Bab III LPDSH.

9. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan menguasai dan memiliki 215 (dua ratus lima belas) bidang tanah yang terletak di berbagai lokasi di Indonesia. Sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan pernyataan Direksi dalam Surat Pernyataan Perseroan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi Perseroan berkenaan dengan aset-tanah miliknya, yaitu:
 - a. Terdapat penguasaan oleh pihak ketiga atas aset tanah milik KF yaitu untuk tanah-tanah dengan Hak Guna Bangunan No.138/Palmeriam dan Hak Guna Bangunan No.81/Tamansari.
 - b. Permohonan KF untuk memperpanjang sertifikat Hak Guna Bangunan No.435/Balimester tidak dikabulkan oleh instansi yang berwenang, karena pada wilayah dimana tanah berlokasi telah diubah peruntukkannya untuk menjadi jalur hijau. Meskipun demikian sampai dengan Tanggal Konfirmasi tanah tersebut masih dikuasai KF dan dipergunakan untuk bangunan Apotik KF.54 Jatinegara.

Disamping masalah-masalah tersebut di atas, terdapat beberapa sertifikat tanah hak guna bangunan yang sedang dalam proses perpanjangan masa berlakunya, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5/Jatinegara;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.76/Lingkungan Braga;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.235/Jebres;
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.672/Gajahmungkur;
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1416/Lingkungan III;
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.0005/Bantan;
- g. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1752/81/594.3/Tpi;
- h. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.507/Panaragan.

Selain dari harta kekayaan yang berupa tanah-tanah, Perseroan juga menguasai dan memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak, yang terdiri dari sejumlah kendaraan bermotor baik kendaraan roda empat maupun roda dua sebagaimana dirinci dalam Bab IV LPDSH dan lampiran-lampirannya.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dokumen bukti kepemilikan atas benda bergerak yang dipergunakan untuk kegiatan usahanya sehari-hari terutama bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, kecuali dokumen bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor yang secara tegas diakui Direksi Perseroan sedang dalam proses pengumpulan, sebagaimana dirinci dalam Bab IV LPDSH beserta lampirannya.

10. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki penyertaan modal pada 3 (tiga) perusahaan terasosiasi, dengan perincian sebagai berikut:
- PT Riasima Abadi, sebesar 1.875 saham atau 23,44% dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan.
 - PT Sinkona Indonesia Lestari, sebesar 1.286 atau 15,00% dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan.
 - PT Kifa Gema Sarana Husada, sebesar 132 saham atau 30,00% dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, kepemilikan Perseroan atas perusahaan-perusahaan tersebut di atas adalah benar dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah.

11. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, sesuai dengan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas dokumen-dokumen perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan dan penegasan-penegasan serta informasi yang diberikan Perseroan, bahwa perjanjian-perjanjian yang dianggap penting oleh Perseroan, yang hasil pemeriksaannya dilaporkan dalam Bab V LPDSII, adalah sah dan mengikat Perseroan, dan Perseroan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam masing-masing perjanjian tersebut serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, hukum maupun peraturan yang berlaku terhadap Perseroan sehubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang dalam keadaan lalai atau dinyatakan lalai oleh krediturnya baik atas pembayaran pokok maupun pembayaran bunga. Perseroan selalu memenuhi segala kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang telah ditandatanganinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran royalti sehubungan dengan perjanjian lisensi kepada pihak pemilik lisensi.

Sepanjang pengetahuan kami, dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari perjanjian-perjanjian yang ditandatanganinya oleh Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian kredit, yang melarang atau membatasi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan penawaran umum saham perdana (negative covenants). Meskipun demikian sehubungan dengan IPO ini Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar melalui Akta No. 82, dalam hal mana perubahan tersebut memerlukan persetujuan dari PT. Bank Bukopin sebagai kreditur dalam perjanjian pemberian line bank garansi No. XXX/118/BUKI/IX/2000 tanggal 26 September 2000 ("Perjanjian"); dan sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT. Bank Bukopin untuk melakukan perubahan anggaran dasar dalam rangka IPO sebagaimana konfirmasi dan persetujuan PT. Bank Bukopin atas surat permohonan Perseroan No. KP. 1002/FS/152/2001 tanggal 5 Juni 2001.

12. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya atas resiko kebakaran, kehilangan dan/atau resiko lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi harta kekayaannya tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan senantiasa mengasuransikan harta kekayaannya atas resiko tersebut sebagaimana diuraikan dalam Bab VI LPDSH dan lampiran-lampirannya. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, seluruh polis asuransi atas harta kekayaannya tersebut masih tetap berlaku, kecuali yang secara tegas diakui oleh Direksi Perseroan bahwa polis asuransi tersebut masih dalam proses pembaharuan.
13. Bahwa pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan tidak mempunyai tagihan atau perkara dengan pihak otorita perpajakan yang jika diputuskan dengan mengalahkan Perseroan dapat memberi dampak negatif pada keadaan keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan.
14. Saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan data dan keterangan Perseroan dan surat keterangan badan-badan peradilan, instansi-instansi dan pejabat-pejabat pemerintah yang menerangkan keterlibatan Perseroan beserta Direksi dan Komisaris dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, ketenagakerjaan dan kepailitan, yang semuanya telah dirinci dalam Bab VIII LPDSH, Perseroan sedang terlibat dalam 1 (satu) sengketa perkara perdata dengan registrasi No.43/PDT.G/2001/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung dan 1 (satu) sengketa perkara tata usaha negara yang sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melibatkan asset Perseroan, namun Perseroan bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Bahwa sepanjang pengetahuan kami dengan merujuk pada Surat Pernyataan Perseroan, tidak ada perkara sebagaimana tercantum dalam Bab VIII LPDSH yang jika diputuskan dengan mengalahkan Perseroan dapat memberi dampak negatif pada keadaan keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan.

15. Semua Perjanjian yang berkenaan dengan IPO, yaitu sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas tanggal 12 April 2001 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.23 tanggal 12 April 2001 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom;
 - c. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No PPPE-011/BES/IV/2001 tanggal 23 April 2001 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Surabaya.
 - d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No 7 tanggal 1 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta juncto Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.21 tanggal 8 Juni 2001, yang dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar,

SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang dilakukan oleh dan antara PERSEROAN dengan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.

- c. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 2 Mei 2001 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta.

telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya peraturan mengenai penawaran umum, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

16. Sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Danareksa Sekuritas yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan perusahaan efek PT Bali Securities, PT Bapindo Bumi Sekuritas, PT BNI Securities, PT Inter-Pacific Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Niaga Sekuritas yang bertindak selaku Penjamin Emisi Efek yang terafiliasi karena adanya kepemilikan saham Negara Republik Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, namun Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan lembaga pasar modal dan para profesi penunjang pasar modal lainnya yang berpartisipasi dalam IPO.
17. Penandatanganan perjanjian-perjanjian berkenaan dengan IPO yang dilaksanakan oleh Direktur Utama Perseroan, telah memperoleh persetujuan-persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan. Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain yang mengikat Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pembiayaan atas usaha Perseroan.
18. Berkaitan dengan pelaksanaan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham seri B ("Penawaran Umum"), yang dilakukan bersamaan dengan penawaran saham kepada karyawan dan manajemen dalam jumlah sebanyak 54.000.000 (lima puluh empat juta) saham seri B ("Penawaran Kepada Karyawan dan Manajemen"), Perseroan menentukan harga saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah) setiap saham dan harga penawaran saham dalam rangka Penawaran Kepada karyawan dan Manajemen adalah sebesar Rp180 (seratus delapan puluh rupiah) setiap saham. Sehubungan terdapatnya perbedaan harga saham untuk masing-masing penawaran tersebut, sepanjang pengetahuan kami tidak terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang melarang penawaran saham kepada publik tersebut dilakukan dengan menggunakan harga penawaran yang berbeda.

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dengan asumsi bahwa:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak ketiga yang berkepentingan kepada kami dalam rangka LPDSH dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah asli dan ditandatangani oleh yang berwenang, dan dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan Perseroan dan pihak ketiga yang berkepentingan kepada kami untuk tujuan pemeriksaan dari segi hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta sampai dengan tanggal LPDSH dan Pendapat Dari Segi Hukum tidak mengalami perubahan;
3. Bahwa data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang kami peroleh langsung dari pihak ketiga, termasuk badan eksekutif dan yudikatif yang berhubungan erat dengan pemeriksaan dari segi hukum dan untuk maksud pemberian LPDSH dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar dan tidak menghilangkan fakta yang penting atau perlu diketahui sampai dengan tanggal LPDSH dan Pendapat Dari Segi Hukum;
4. Di dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan pemberian pendapat hukum ini, atas suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait, kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansialnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum kami buat dengan sebenarnya dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan dan kami akan bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

BAHAR, TJAJO & PARTNERS



Rambun Tjajo
Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 dan Laporan Auditor Independen yang diaudit oleh Hans Tuanakota & Mustofa (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen

No. 060601 KF MS SA

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Kimia Farma (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit neraca P.T. Kimia Farma (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 serta laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Riasima Abadi Farma, perusahaan asosiasi, yang investasinya dicatat dengan metode ekuitas. Jumlah investasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 masing-masing sebesar Rp 3.057.085.524, Rp 3.120.371.652 dan Rp 2.938.029.085 dan bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 masing-masing sebesar (Rp 63.286.128), Rp 182.542.567 dan Rp 1.077.736.039 yang termasuk dalam laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan asosiasi tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk perusahaan asosiasi tersebut, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Kimia Farma (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998, serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Catatan 39 atas laporan keuangan berisi pengungkapan dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan dan tindakan yang ditempuh serta rencana yang dibuat oleh manajemen Perusahaan untuk menghadapi kondisi tersebut. Laporan keuangan terlampir mencakup dampak kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan.

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
NERACA
31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998 (Lanjutan)

	Catatan	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN LANCAR				
Pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia	15,36,41	65.000.000.000	-	10.352.973.372
Hutang bank	16,36,41	5.101.073.105	-	-
Hutang usaha	17,36	-	-	-
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		82.153.758.812	85.580.841.400	72.569.114.486
Pihak ketiga		99.682.534.453	62.666.840.475	149.795.072.621
Hutang pajak	2m, 18,31	65.404.250.439	31.611.612.076	19.605.666.469
Uang muka penjualan	19,36	51.429.110.491	61.282.470.619	14.419.597.523
Biaya yang masih harus dibayar	20	42.918.171.811	67.754.909.140	39.552.963.462
Dana subsidi diterima dimuka	2k, 21	-	30.777.374.227	45.892.358.266
Kewajiban lancar lain-lain	22,33	4.991.529.399	2.189.726.328	2.349.755.340
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		-	-	-
Pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia	15,36	-	111.500.000.000	-
Hutang bank	23,36	-	-	4.540.764.065
Jumlah Kewajiban Lancar		416.685.428.510	446.373.774.224	360.220.285.605
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Pinjaman dana dan Pemerintah Republik Indonesia jangka panjang	15,36	7.800.000.000	7.800.000.000	111.500.000.000
Hutang bank jangka panjang	23,36	-	-	8.122.054.404
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		7.800.000.000	7.800.000.000	119.622.054.404
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham tahun 2000 dan Rp 1.000.000 per saham tahun 1999 dan 1998				
Modal dasar - 3.000.000.000 saham terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 2.999.999.999 saham seri B tahun 2000 dan 400.000 saham tahun 1999 dan 1998				
Modal ditempatkan dan disetor - 750.000.000 saham terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 749.999.999 saham seri B tahun 2000 dan 100.000 saham tahun 1999 dan 1998				
	24,33	375.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Saldo laba		-	-	-
Ditentukan penggunaannya	24,33,41 *	1.827.093.577	41.173.209.630	5.323.418.858
Tidak ditentukan penggunaannya	24,33,41 *	163.150.156.650	106.776.950.009	69.759.724.639
Jumlah Ekuitas		639.977.250.237	249.950.160.639	175.113.143.697
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		964.462.678.747	704.123.953.863	652.955.463.707

* Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 April 2001, ditentukan laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 masing-masing sebesar Rp 125.789.980.853 dan Rp 37.360.175.607 sebagai saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan dividen tahun buku 2000, serta saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 125.000.000.000 dikapitalisasi untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 2 April 2001.

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 LAPORAN LABA RUGI
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998

	Catatan	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
72.372 PENJUALAN BERSIH	2j,25,36	1.517.153.295.051	1.059.114.594.753	783.684.799.161
BEBAN POKOK PENJUALAN	2j,26,38	963.402.043.488	705.875.706.749	524.486.019.720
72.372 LABA KOTOR		553.751.251.563	353.238.888.004	259.198.779.441
BEBAN USAHA				
Penjualan	2j,27	184.885.980.515	141.615.841.818	99.968.127.553
Umum dan administrasi	2j,28	118.943.070.142	108.778.269.646	68.709.224.227
Jumlah Beban Usaha		303.829.050.757	250.394.111.464	168.677.351.780
72.372 LABA USAHA		249.922.200.806	102.844.776.540	90.521.427.661
72.372 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Beban bunga dan provisi bank	29	(18.344.934.426)	(29.192.053.463)	(31.652.921.567)
Hasil investasi	10,30	15.074.685.130	51.779.522.737	37.467.089.072
Penurunan nilai aktive tetap dan biaya eksplorasi dan pengembangan	2n,2i,11,14	(9.777.985.903)	(242.093.945)	(955.026.606)
Perubahan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	2b	752.329.666	1.933.352.339	(3.649.993.072)
Lain-lain - bersih		4.015.165.061	9.940.485.238	5.901.269.794
72.372 Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih		(8.250.719.270)	34.219.513.906	6.900.417.621
72.372 LABA SEBELUM PAJAK		241.671.481.536	137.064.290.446	97.421.845.282
BEBAN PAJAK	2m,31			
Pajak kini		72.034.764.700	38.047.620.500	25.598.883.000
Pajak tangguhan		(182.259.559)	770.513.928	953.376.914
Beban Pajak - Bersih		71.852.505.141	38.818.434.428	26.552.259.914
72.372 LABA BERSIH	41 *	169.818.976.395	98.245.856.018	70.869.585.368
72.372 LABA PER SAHAM DASAR	2n,32	33,96	19,65	14,17

* Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 April 2001, ditentukan laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 masing-masing sebesar Rp 125.789.980.853 dan Rp 37.360.175.807 sebagai saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan dividen tahun buku 2000, serta saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 125.000.000.000 dikapitalisasi untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 2 April 2001.

lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1. UMUM

Pendirian dan Informasi Umum

P.T. Kimia Farma (Persero) Tbk selanjutnya disebut "Perusahaan" didirikan berdasarkan akta No. 18 tanggal 16 Agustus 1971 dan diubah dengan akta perubahan No. 18 tanggal 11 Oktober 1971 keduanya dari Soelaeman Ardjasmita, notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/184/21 tanggal 14 Oktober 1971, dan didaftarkan pada buku registrasi di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2888 dan No. 2889 tanggal 20 Oktober 1971 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 9 Nopember 1971, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 508. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 22 tanggal 14 September 2000 dari Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian seluruh anggaran dasar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-20934/HT.01.01-TH.2000 tanggal 19 September 2000, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7759 tanggal 19 Desember 2000 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 101.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 6 (enam) unit produksi yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Semarang, Watudakon (Mojokerto) dan Tanjung Morawa - Medan. Perusahaan juga memiliki 1 (satu) unit Distribusi dan 1 (satu) unit Alat-alat Kesehatan dan Penyidikan (AAKP) yang berlokasi di Jakarta, 40 (empat puluh) Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan 210 (dua ratus sepuluh) Apotik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) wilayah. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jalan Budi Utomo No. 1 Jakarta.

Perusahaan (dengan nama-nama yang berbeda) mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1817, yang pada saat itu bergerak dalam bidang distribusi obat dan bahan baku obat. Pada tahun 1958, pada saat Pemerintah Indonesia menasionalisasikan semua Perusahaan Belanda, status Perusahaan tersebut diubah menjadi beberapa Perusahaan Negara. Pada tahun 1969, beberapa Perusahaan Negara tersebut diubah menjadi satu perusahaan yaitu Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma disingkat PN Farmasi Kimia Farma. Pada tahun 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1971 status Perusahaan Negara tersebut diubah menjadi Persero dengan nama P.T. Kimia Farma (Persero). Hasil produksi Perusahaan saat ini dipasarkan di dalam negeri dan di luar negeri, termasuk ke Eropa, Amerika dan Asia.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya kegiatan usaha dibidang industri kimia, farmasi, biologi dan kesehatan serta industri makanan dan minuman. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Mengadakan, menghasilkan, mengolah bahan kimia farmasi, biologi dan lainnya yang diperlukan guna pembuatan persediaan farmasi, kontrasepsi, kosmetika, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/minuman dan produk lainnya termasuk bidang perkebunan dan pertambangan yang ada hubungannya dengan produksi diatas;
- memproduksi pengemas dan bahan pengemas, mesin dan peralatan serta sarana pendukung lainnya, baik yang berkaitan dengan industri farmasi maupun industri lainnya;
- Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari hasil produksi seperti diatas, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak ketiga, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha Perusahaan;
- Berusaha dibidang jasa, baik yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha Perusahaan maupun jasa, upaya dan sarana pemeliharaan dan pelayanan kesehatan pada umumnya termasuk jasa konsultasi kesehatan;
- Jasa penunjang lainnya termasuk pendidikan, penelitian dan pengembangan sejalan dengan maksud dan tujuan Perusahaan, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

Perusahaan memberikan kompensasi kepada pengurus Perusahaan berupa gaji, tunjangan dan bonus. Jumlah kompensasi yang dibayarkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 sebesar Rp 4.323.256.819.

Jumlah karyawan Perusahaan rata-rata 5.150 karyawan pada tahun 2000, sebanyak 5.610 karyawan pada tahun 1999 dan sebanyak 5.604 karyawan pada tahun 1998. Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut :

	2000	1999	1998
Komisaris Utama	: Dr. E. Sutarto	Dr. E. Sutarto	Drs. Slamet Soesilo
Komisaris	: DR. Azrul Azwar DR. Ryas Rasjid	DR. Azrul Azwar DR. Ryas Rasjid Rudjito	Dr. Hidayat HardjoprawitoAzwar Dr. M.H. Widodo Soetopo, DPH Drs. Donesius Manalu Dr. Nyoman Kumara Rai, MPH
Direktur Utama	: Drs. Darodjatun, MBA	Drs. Darodjatun, MBA	Drs. Darodjatun, MBA
Direktur	: Drs. Nugroho Widjajanto Drs. Tatong Suryanto Drs. Syarif Bastaman Drs. Saleh Rasidi	Drs. Nugroho Widjajanto Drs. Tatong Suryanto Drs. Syarif Bastaman Drs. Saleh Rasidi	Drs. Nugroho Widjajanto Drs. Tatong Suryanto Drs. Syarif Bastaman Drs. Saleh Rasidi

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Investasi

Deposito berjangka

Deposito berjangka yang jatuh tempohnya kurang dari tiga bulan namun dijaminan dan deposito berjangka yang jatuh tempohnya lebih dari tiga bulan dinyatakan sebesar nilai nominal.

Investasi pada perusahaan asosiasi

Investasi dalam saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%, baik langsung maupun tidak langsung (perusahaan asosiasi), dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi sejak perolehan sebesar persentase kepemilikan dan dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas). Bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi disesuaikan dengan amortisasi goodwill dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Investasi lainnya

Investasi dalam saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

e. Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing akun piutang dan persentase tertentu dari saldo akun piutang pada akhir tahun.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan bahan baku dan bahan pembantu ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO), sedangkan barang dalam proses dan barang jadi ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

g. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Aktiva Tetap

Aktiva tetap, kecuali aktiva tertentu yang dinilai kembali, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap tertentu telah dinilai kembali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku. Peningkatan nilai aktiva tetap karena penilaian kembali dikreditkan pada selisih penilaian kembali aktiva tetap dalam akun ekuitas.

Aktiva tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan sebagai berikut :

	Metode penyusutan	Tarif Penyusutan
Bangunan dan prasarana	garis lurus (straight line)	5%
Mesin dan instalasi, perabot dan peralatan pabrik	saldo menurun ganda (double declining balance)	12,5% - 25%
Instalasi sumbu yodium dan instalasi limbah	saldo menurun ganda (double declining balance)	25%
Kendaraan, perabot dan peralatan kantor	saldo menurun ganda (double declining balance)	25% - 50%

Tanaman menghasilkan mengacu pada jangka waktu tanaman dapat menghasilkan yang ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen sebagai berikut :

Tahun pertama	2%
Tahun kedua	3%
Tahun ketiga	4%
Tahun keempat	6%
Tahun kelima	85%

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aktiva tetap yang belum digunakan dinyatakan sebesar jumlah terendah untuk jumlah tercatat atau nilai realisasi bersih.

Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan, kecuali aktiva tetap yang dijual secara cicilan.

Aktiva tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Biaya-biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan bagian biaya tidak langsung dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan dipindahkan ke tanaman menghasilkan pada saat tanaman menghasilkan (pada tahun kelima).

i. Biaya Tanggahan

Hak atas tanah

Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atas tanah karena umur hukum hak atas tanah lebih pendek dari umur ekonomiknya.

Eksplorasi dan pengembangan

Biaya yang terjadi berhubungan dengan penyelidikan umum, perijinan dan administrasi, geologi dan fisika, pengeboran, eksplorasi dan pengembangan yang meliputi biaya administrasi, pembersihan lahan dan pembukaan tambang ditangguhkan dan diamortisasi pada saat produksi dengan metode garis lurus sepanjang umur ekonomik yaitu 10 (sepuluh) tahun, karena umur ekonomiknya lebih pendek dari umur ijin kegiatan pertambangan.

Umur ekonomik atau cadangan terbukti didasarkan atas taksiran manajemen yang dievaluasi secara berkala. Jumlah penurunan (write down) akibat dilakukannya evaluasi terhadap biaya tanggahan - eksplorasi dan pengembangan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan, sedangkan penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

3. KAS DAN SETARA KAS

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
Kas			
Rupiah	5.547.719.813	3.074.993.369	1.694.081.434
Mata uang asing			
US\$ 594 tahun 2000 dan			
US\$ 7.916 tahun 1999	5.599.430	55.203.600	-
Jumlah	5.553.419.243	3.131.196.969	1.694.081.434
Bank			
Rupiah			
Pihak yang mempunyai hubungan			
istimewa (Catatan 36)			
Bank Negara Indonesia	10.404.080.187	4.230.012.602	1.323.819.638
Bank Mandiri	12.450.340.565	25.119.264.196	136.010.852.968
Lain-lain (masing-masing dengan			
saldo dibawah Rp 100.000.000)	6.056.001	3.210.911	24.348.446
	22.860.476.753	29.352.507.709	139.359.021.051
Pihak ketiga			
Bank Bukopin	57.137.590.116	-	248.653.075
Bank Pembangunan Daerah	31.945.306.257	-	229.215.391
Bank Central Asia	1.362.215.101	2.575.318.680	42.891.367
Lain-lain (masing-masing dengan			
saldo dibawah Rp 100.000.000)	179.298.820	304.443.654	21.227.457
	90.624.410.304	2.979.762.334	541.987.290
Mata uang asing			
Pihak yang mempunyai hubungan			
istimewa (Catatan 36)			
Bank Mandiri			
US\$ 132.511 tahun 2000,			
US\$ 1.046.680 tahun 1999 dan			
US\$ 187.080 tahun 1998	1.272.402.545	7.431.426.722	1.501.314.432
AUD 565.201 tahun 2000,			
AUD 971.649 tahun 1999 dan			
AUD 417.954 tahun 1998	3.006.038.475	4.491.077.906	2.057.739.431
Jumlah	117.753.328.077	44.254.774.671	143.460.062.204
Deposito berjangka			
Pihak yang mempunyai hubungan			
istimewa (Catatan 36)			
Rupiah			
Bank Mandiri	-	100.500.000.000	55.900.000.000
Bank Pembangunan Indonesia	-	23.500.000.000	53.500.000.000
Bank Negara Indonesia	-	151.000.000	-
Dollar Amerika Serikat			
Bank Mandiri			
US\$ 2.075.000 tahun 1999 dan			
US\$ 600.000 tahun 1998	-	14.732.500.000	4.815.000.000
Pihak ketiga			
Rupiah			
Bank Bukopin	52.000.000.000	-	-
Bank Niaga	-	-	3.000.000.000
Jumlah	52.000.000.000	138.883.500.000	117.215.000.000
Jumlah	170.316.747.320	160.269.471.640	262.369.143.636
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			
Rupiah	10,22% - 14%	9% - 12,55%	39% - 48%
Dollar Amerika Serikat	-	5,50%	15%

Pada tanggal 31 Desember 2000 kas diasuransikan terhadap risiko kehilangan kepada PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 5.850.000.000. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Perusahaan.

4. DEPOSITO BERJANGKA

	2000 Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 36)	
Rupiah	
Bank Mandiri	5.105.000.000
Dollar Amerika Serikat	
Bank Mandiri - US\$ 450.000	4.317.750.000
Pihak ketiga	
Rupiah	26.500.000.000
Bank Bukopin	35.922.750.000
Jumlah	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	10,75% - 12,69%
Rupiah	5,5% - 6,84%
Dollar Amerika Serikat	

Deposito berjangka pada Bank Bukopin dipergunakan sebagai jaminan atas hutang bank pada Bank Bukopin (Catatan 16) dan bank garansi sebagai jaminan uang muka dan pelaksanaan kontrak penjualan. Deposito berjangka pada Bank Mandiri, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dipergunakan sebagai jaminan letter of credit impor dan bank garansi pada Bank Mandiri sebagai jaminan uang muka dan pelaksanaan kontrak penjualan (Catatan 35).

5. PIUTANG USAHA

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 36)			
PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero)	3.913.177.193	2.582.805.893	2.328.016.105
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.076.492.923	4.449.204.951	3.831.065.334
PT Indofarma Global Medika	2.441.758.578	-	-
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2.047.082.422	-	-
PT Perkebunan Nusantara (Persero)	1.929.729.546	1.164.601.606	1.142.165.043
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.061.201.375	1.639.325.721	1.540.535.316
Lain-lain (masing-masing dengan saldo dibawah Rp 1.000.000.000)	4.023.144.179	4.375.644.253	3.639.782.381
Jumlah	18.492.586.216	14.211.582.434	12.479.564.180
Penyisihan piutang ragu-ragu	(369.851.724)	(284.231.648)	(249.591.283)
Jumlah - Bersih	18.122.734.492	13.927.350.786	12.229.972.897
Pihak ketiga			
Lokal			
Rayon Jatim	27.241.607.660	7.914.445.110	7.293.695.547
Rayon Jaya	22.523.505.050	47.337.513.939	71.519.904.425
Rayon Sumbagsel	17.073.682.914	7.055.138.539	4.693.910.523
Rayon Jaleng	15.494.674.136	5.627.441.896	3.720.312.232
Rayon Datim	14.342.698.761	9.782.508.383	6.265.079.369
Rayon Jabar	10.984.752.896	4.675.414.163	3.299.930.349
Rayon Sumbagut	7.058.232.148	4.308.148.769	2.558.079.856
Ekspor	4.584.384.800	3.768.261.100	1.076.152.500
Jumlah	119.303.539.365	90.478.871.899	100.427.064.801
Penyisihan piutang ragu-ragu	(5.623.815.448)	(4.539.480.045)	(4.093.832.969)
Jumlah - Bersih	113.679.723.917	85.939.391.854	96.333.231.832
Jumlah	131.602.458.409	99.866.742.640	108.563.204.729

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Jumlah piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Rupiah	133.211.740.781	100.922.193.233	111.830.476.481
Mata uang asing (Catatan 38)			
US\$ 407.240 tahun 2000,			
US\$ 530.741 tahun 1999 dan			
US\$ 134.100 tahun 1998	3.907.487.800	3.768.261.100	1.075.152.500
JPY 8.100.000 tahun 2000	676.917.000	-	-
Jumlah	137.796.125.581	104.690.454.333	112.906.628.981
Penyisihan piutang ragu-ragu - Rupiah	(6.193.667.172)	(4.823.711.693)	(4.343.424.252)
Jumlah	131.602.458.409	99.866.742.640	108.563.204.729

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Belum jatuh tempo	80.832.090.394	69.888.946.830	91.639.345.282
0 - 30 hari	33.785.007.648	17.466.651.099	12.400.443.760
31 - 60 hari	11.840.083.798	10.880.109.276	4.208.799.846
61 - 150 hari	6.557.141.056	2.761.354.776	1.919.580.647
> 150 hari	4.761.802.685	3.693.302.352	2.738.459.446
Jumlah	137.796.125.581	104.690.454.333	112.906.628.981
Penyisihan piutang ragu-ragu	(6.193.667.172)	(4.823.711.693)	(4.343.424.252)
Jumlah	131.602.458.409	99.866.742.640	108.563.204.729

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Saldo awal tahun	4.823.711.693	4.343.424.252	7.047.106.081
Penyisihan	2.035.108.008	834.916.000	1.045.943.171
Penghapusan	(665.152.529)	(354.628.559)	(3.749.625.000)
Saldo akhir tahun	6.193.667.172	4.823.711.693	4.343.424.252

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas hutang bank pada Bank Mandiri (Catatan 16).

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Piutang dana subsidi	21.365.894.314	14.177.983.866	-
Klaim asuransi	790.686.599	-	-
Bunga	325.837.088	892.938.588	9.052.096
Lain-lain	337.404.746	708.184.082	626.222.997
Jumlah	22.819.822.847	15.779.106.516	635.275.093

Perusahaan telah menerima piutang dana subsidi sebesar Rp 21.365.894.314 dan Rp 14.177.983.866 masing-masing tanggal 2 Januari 2001 dan 31 Januari 2000 serta 31 Maret 2000 (Catatan 21). Selanjutnya sebagian besar piutang klaim asuransi pengiriman barang sebesar Rp 754.087.994 telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 15 Mei 2001.

7. PERSEDIAAN

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Barang jadi			
Obat jadi	135.713.096.922	170.754.562.275	98.784.657.724
Pil KB	144.816.790	6.310.487.215	18.024.031
Alat kesehatan dan kosmetik	9.231.413.057	5.312.804.148	155.201.135
Barang dalam proses	26.091.236.978	16.869.807.712	11.821.643.504
Bahan baku dan bahan pembantu	64.826.516.691	51.031.656.922	56.153.652.176
Barang dalam perjalanan	11.532.340.849	4.208.237.132	3.658.402.575
Jumlah	247.539.221.287	265.296.555.404	180.591.671.145
Penylisihan persediaan usang	(1.113.882.464)	(492.516.339)	(863.842.221)
Jumlah - bersih	246.425.338.823	264.804.039.065	179.727.828.924

Mutasi penylisihan persediaan usang adalah sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Saldo awal tahun	492.516.339	863.842.221	1.200.991.049
Penambahan	793.456.759	160.867.682	206.769.932
Penghapusan	(172.090.534)	(532.193.564)	(543.918.760)
Saldo akhir tahun	1.113.882.464	492.516.339	863.842.221

Manajemen berpendapat bahwa penylisihan persediaan usang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari keusangan persediaan.

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank pada Bank Mandiri (Catatan 16).

Pada tanggal 31 Desember 2000 persediaan dengan nilai tercatat sebesar Rp 160.790.307.091 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan kebongkaran kepada PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 87.284.100.000. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Perusahaan.

8. UANG MUKA

Akun ini terutama merupakan uang muka pembelian bahan baku dan barang jadi serta iuran dana pensiun (Catatan 34).

9. PIUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Akun ini merupakan piutang kepada karyawan yang terdiri dari saldo pinjaman karyawan, pinjaman kredit kendaraan dan penjualan rumah dinas. Pelunasan atas piutang tersebut dilakukan Perusahaan dengan memotong gaji dari karyawan. Piutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

10. INVESTASI JANGKA PANJANG

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Investasi perusahaan asosiasi			
Metode ekuitas			
PT Riasima Abadi Farma			
Saldo awal	3.120.371.652	2.938.029.085	1.350.293.046
Perubahan tahun berjalan			
Penambahan investasi	-	-	500.000.000
Bagian laba (rugi) bersih setelah penyesuaian terhadap amortisasi goodwill (Catatan 30)	(63.286.128)	182.342.567	1.077.736.039
Jumlah	3.057.085.524	3.120.371.652	2.938.029.085
Uang muka investasi - PT Riasima Abadi Farma	783.750.000	783.750.000	783.750.000
Investasi lainnya			
Metode biaya			
PT Sinkona Indonesia Lestari	261.725.212	261.725.212	261.725.212
PT Dua Satu Tiga Puluh	-	-	2.300.000.000
Jumlah	261.725.212	261.725.212	2.561.725.212
Jumlah	4.102.560.736	4.165.846.864	6.283.504.297

Pada tahun 1996, Perusahaan melakukan investasi sebanyak 1.375 saham pada PT Riasima Abadi Farma (RAF), perusahaan asosiasi yang bergerak dibidang farmasi dan pengelolaan obat dan berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Persentase pemilikan Perusahaan pada tahun 1997 adalah sebesar 25%. Pada tahun 1998, Perusahaan mengambil bagian sebesar Rp 500.000.000 atau 500 saham atas peningkatan modal disetor RAF sehingga kepemilikan Perusahaan terdiluasi menjadi sebesar 23,44%. Pada tanggal 30 September 1998, Perusahaan melakukan pembelian 1.045 saham RAF dari pemegang saham lain sebesar Rp 783.750.000. Sampai dengan saat ini pembelian saham tersebut belum mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham RAF dan disajikan pada akun uang muka investasi. Manajemen berpendapat bahwa uang muka investasi sebesar Rp 783.750.000 dapat dipulihkan nilainya, apabila pembelian saham tersebut tidak mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham RAF. Pada saat ini persetujuan pembelian saham tersebut sedang dalam proses pembahasan para pemegang saham RAF.

Investasi saham pada PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL) terdiri dari 1.286 saham dengan persentase kepemilikan sebesar 15%. Perusahaan menerima dividen dari SIL sebesar Rp 419.866.140, Rp 1.446.740.000 dan Rp 55.941.000 masing-masing untuk tahun 2000, 1999 dan 1998 (Catatan 30).

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Investasi pada PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP) merupakan penyertaan Perusahaan sebanyak 1.000 saham dalam rangka proyek N-2130. Pada tahun 1999, DSTP telah dilikuidasi dan Perusahaan mendapat pembagian harta likuidasi sebesar Rp 4.068.740.000. Dividen pembagian harta likuidasi sebesar Rp 1.768.740.000 dicatat pada akun hasil investasi (Catatan 30).

Sesuai dengan persetujuan pemegang saham Perusahaan, yang dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-687/MK.016/1997 tanggal 29 Desember 1997, Perusahaan telah menjual seluruh kepemilikan sebesar 10% investasinya pada PT Sando Biochemi Farma Indonesia (SBFI) kepada pihak Novartis sebesar Rp 7.700.000.000 pada tahun 1998. Keuntungan penjualan investasi saham sebesar Rp 6.881.720.628 dicatat pada akun hasil investasi (Catatan 30).

11. AKTIVA TETAP

	1 Januari 2000	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2000
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan atau penilaian kembali :					
Tanah	21.937.303.818	172.066.900.331	-	-	194.004.204.149
Tanaman menghasilkan	1.322.280.470	-	-	140.051.961	1.462.332.431
Bangunan dan prasarana	42.994.698.172	15.220.541.446	-	1.577.795.221	59.793.034.839
Mesin dan instalasi	39.229.938.581	7.115.091.072	-	-	46.345.029.653
Instalasi limbah	1.773.877.300	203.001.063	-	59.450.546	2.046.328.909
Peralat dan peralatan	34.159.416.301	8.355.655.143	7.238.500	-	45.276.933.944
Kendaraan	17.273.552.564	10.343.254.474	657.022.160	-	26.959.784.878
Instalasi sumur yodium	2.504.684.833	-	-	-	2.504.684.833
Aktiva dalam penyelesaian	3.300.257.062	15.513.488.650	9.498.650.946	(1.647.245.757)	7.767.058.999
Tanaman belum menghasilkan	570.650.883	234.375.129	-	(140.051.961)	664.985.051
Jumlah	165.126.769.984	230.072.316.338	10.163.711.506	-	385.035.375.716
Akumulasi penyusutan :					
Tanaman menghasilkan	500.456.600	44.533.631	-	-	604.000.264
Bangunan dan prasarana	18.435.103.428	3.529.411.623	-	-	21.964.515.051
Mesin dan instalasi	24.362.140.166	3.325.690.327	-	-	27.687.830.493
Instalasi limbah	1.395.443.291	294.732.147	-	-	1.690.175.438
Peralat dan peralatan	23.673.516.500	4.056.740.289	5.959.056	-	27.724.297.733
Kendaraan	11.969.477.183	2.237.835.935	560.844.486	-	13.646.468.632
Instalasi sumur yodium	938.294.954	385.987.442	-	-	1.325.282.396
Jumlah	81.304.432.145	13.875.957.394	566.803.561	-	94.643.585.980
Jumlah Tercatat	83.792.337.839				290.391.780.728

	1 Januari 1999	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 1999
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan atau penilaian kembali :					
Tanah	22.056.131.500	649.081.810	707.819.551	-	21.997.393.818
Tanaman menghasilkan	1.010.903.874	-	-	311.376.596	1.322.280.470
Bangunan dan prasarana	40.404.745.509	2.649.597.293	380.932.514	324.287.794	42.994.698.172
Mesin dan instalasi	36.155.569.813	3.050.211.501	134.426.974	152.595.041	39.229.938.581
Instalasi limbah	1.773.877.300	-	-	-	1.773.877.300
Peralat dan peralatan	29.107.440.077	5.257.806.834	205.836.610	-	34.159.416.301
Kendaraan	14.220.623.224	3.182.963.500	130.024.160	-	17.273.552.564
Instalasi sumur yodium	1.206.350.940	1.104.274.447	-	105.059.445	2.504.684.833
Aktiva dalam penyelesaian	1.393.594.512	2.603.944.743	115.330.112	(581.933.081)	3.300.257.062
Tanaman belum menghasilkan	713.350.032	169.587.417	-	(311.376.596)	570.650.883
Jumlah	148.131.582.950	18.672.557.945	1.677.380.321	-	165.126.769.984

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

	1 Januari 1999	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 1999
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Akumulasi penyusutan :					
Tanaman menghasilkan	535.214.284	25.242.349	-	-	560.456.633
Bangunan dan prasarana	16.552.016.892	1.565.895.337	82.808.801	-	18.435.103.428
Mesin dan instalasi	21.593.097.749	2.788.033.904	18.991.497	-	24.382.140.156
Instalasi limbah	1.267.854.740	127.569.551	-	-	1.395.424.291
Perabot dan peralatan	21.284.772.946	2.545.213.915	156.470.361	-	23.673.516.500
Kendaraan	10.632.879.170	1.482.048.226	125.450.213	-	11.989.477.183
Instalasi sumur yodium	778.181.079	100.113.875	-	-	878.294.954
Jumlah	72.544.016.860	9.074.136.157	303.720.872	-	81.334.432.145
Jumlah Tercatat	75.487.576.100				83.792.337.839

	1 Januari 1998	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 1998
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan dan penilaian kembali :					
Tanah	19.585.961.505	2.470.170.054	-	-	22.056.131.559
Tanaman menghasilkan	717.304.687	-	-	290.599.187	1.010.903.874
Bangunan dan prasarana	35.548.717.966	1.880.532.263	82.422.914	3.057.818.204	40.404.745.599
Mesin dan instalasi	33.960.569.582	2.195.000.231	-	-	36.155.569.813
Instalasi limbah	1.467.513.169	306.364.131	-	-	1.773.877.300
Perabot dan peralatan	27.060.251.267	2.051.332.685	4.137.875	-	29.107.446.077
Kendaraan	13.012.458.822	1.286.749.002	78.585.400	-	14.220.623.224
Instalasi sumur yodium	1.061.240.940	234.110.000	-	-	1.295.350.940
Aktiva dalam penyelesaian	4.327.491.797	916.662.869	822.731.860	(3.057.818.204)	1.303.594.512
Tanaman belum menghasilkan	944.565.925	62.383.324	-	(293.999.157)	713.950.092
Jumlah	137.686.075.660	11.433.305.349	987.878.049	-	148.131.502.960
Akumulasi penyusutan :					
Tanaman menghasilkan	513.942.896	21.271.388	-	-	535.214.284
Bangunan dan prasarana	14.951.244.970	1.630.200.156	32.497.242	-	16.552.016.892
Mesin dan instalasi	19.158.704.296	2.434.393.453	-	-	21.593.097.749
Instalasi limbah	887.009.331	380.845.409	-	-	1.267.854.740
Perabot dan peralatan	18.495.244.976	2.793.625.007	4.097.037	-	21.284.772.946
Kendaraan	9.824.804.024	686.166.739	78.091.593	-	10.632.879.170
Instalasi sumur yodium	675.327.753	102.853.326	-	-	778.181.079
Jumlah	64.505.275.254	8.252.424.476	114.685.872	-	72.544.016.860
Jumlah Tercatat	73.179.797.405				75.487.576.100

Aktiva tertentu yang diperoleh sampai dengan tanggal 12 September 1986 telah dinilai kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 20 Oktober 1986, sedangkan pada tahun 2000, Perusahaan melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.42/1998 tanggal 7 September 1998. Aktiva tetap yang dinilai kembali adalah aktiva tetap berupa tanah dan bangunan yang berada di Bandung dan Jakarta per tanggal 31 Desember 1999. Berdasarkan laporan penilai dari PT Presta Penilai tanggal 25 Januari 2000 dan PT Superintending Company of Indonesia tanggal 6 Januari 2000, dasar yang digunakan dalam penilaian kembali aktiva mencakup metode perbandingan data pasar untuk penilaian tanah dan metode biaya reproduksi untuk penilaian bangunan. Pada tanggal 23 Juni 2000, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Kantor Pajak dalam Surat Keputusan No. KEP02/WPJ.05/KP.0104/2000. Selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 164.618.417.322 telah dikapitalisasi ke modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 22 Agustus 2000 (Catatan 24).

Rincian selisih penilaian kembali aktiva tetap yang termasuk didalam penambahan biaya perolehan aktiva tetap tahun 2000 adalah sebagai berikut :

	Rp
Tanah	172.028.482.776
Bangunan dan prasarana	10.762.751.710
Instalasi limbah	118.117.094
Jumlah	182.909.351.580

Aktiva dalam penyelesaian terdiri dari biaya pengembangan usaha berupa pembangunan apotik baru dan proyek pengeboran sumur yodium di unit produksi manufaktur Waludakon. Jangka waktu penyelesaian pembangunan apotik yang tersebar di wilayah Indonesia tersebut berkisar antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Pada akhir tahun 2000, manajemen telah mengevaluasi pengembangan 2 (dua) buah sumur yodium berikut instalasi sumur yodium yang terpasang dan memutuskan untuk menurunkan nilai instalasi sumur yodium sebesar Rp 9.498.650.946 karena cadangan terbukti tidak ekonomis. Rincian aktiva dalam penyelesaian terdiri dari :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Bangunan dan prasarana	7.767.858.999	3.300.267.062	1.173.195.954
Instalasi sumur yodium	-	-	220.398.558
Jumlah	7.767.858.999	3.300.267.062	1.393.594.512

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah seluas kurang lebih 548.704 m² yang tersebar di wilayah Indonesia dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 1995 dan 2029. Tanah seluas kurang lebih 4.426 m² yang terletak di Jatinegara (Jakarta), Cibeunying (Bandung), Sekayu dan Gajah Mungkur (Semarang), Sosromenduran (Yogyakarta) dan Tanjung Pinang Barat (Riau), sedang dalam proses perpanjangan HGB. Perusahaan juga mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 1.061 hektar di Cianjur, Jawa Barat yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun hingga tahun 2023. Lokasi tersebut dikembangkan Perusahaan untuk perkebunan kina. Luas lahan yang digunakan untuk tanaman menghasilkan adalah seluas kurang lebih 432,26 hektar. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan legal hak atas tanah disajikan secara terpisah sebagai biaya tangguhan dan diamortisasi antara 20 (dua puluh) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun (Catatan 13).

Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta No. 2208/-1.7115 tanggal 17 September 1997 dinyatakan bahwa lokasi tanah dan bangunan atas nama Perusahaan di Jalan Matraman Raya No. 187, Jakarta diperuntukkan untuk penggunaan jalur hijau. Tanah dan bangunan di Jalan Matraman Raya, Jakarta dan tanah di Jalan Nangkasuni, Bandung atas nama Perusahaan dikuasai oleh pihak ketiga. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, manajemen belum melakukan penurunan nilai aktiva tetap atas tanah tersebut, karena manajemen berpendapat bahwa ganti rugi atas digunakannya peruntukan tanah tersebut untuk jalur hijau adalah cukup menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dan manajemen juga berpendapat bahwa Perusahaan dapat menguasai kembali tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga karena tanah dan bangunan tersebut didukung oleh bukti-bukti legal yang sah (Catatan 42b).

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Beban pabrikasi	6.184.166.498	4.459.351.914	4.109.837.318
Beban usaha	7.691.800.895	4.614.784.243	4.142.587.160
Jumlah	13.875.967.394	9.074.136.157	8.252.424.478

Aktiva tetap tanah dengan HGB No. 5, No. 907, No. 275 dan No. 2341 berikut bangunan di atasnya digunakan sebagai jaminan atas hutang bank pada Bank Mandiri dan Bank Central Asia (Catatan 16, 23 dan 41).

Pada tanggal 31 Desember 2000, aktiva tetap kecuali tanah, dengan nilai tercatat sebesar Rp 77.808.768.293 telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan, kebakaran dan kebongkaran kepada PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 109.050.600.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan oleh Perusahaan.

12. AKTIVA YANG BELUM DIGUNAKAN

Akun ini merupakan tanah seluas kurang lebih 119.355 m2 yang terletak di Jalan Abadi Negara No. 32 dan Jalan Arif Rachman Way Halim, Lampung serta di Bekasi Industrial Estate, Cikarang yang belum digunakan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Tanah tersebut akan digunakan untuk pengembangan apotik dan lokasi pabrik.

13. BIAYA TANGGUHAN – HAK ATAS TANAH

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Biaya perolehan			
Hak guna bangunan	931.484.162	927.150.950	215.344.700
Hak guna usaha	230.000.000	230.000.000	-
Jumlah	1.161.484.162	1.157.150.950	215.344.700
Dikurangi akumulasi amortisasi	78.782.057	32.750.099	11.963.593
Jumlah Tercatat	1.082.702.105	1.124.400.851	203.381.107

Biaya amortisasi masing-masing sebesar Rp 46.031.958, Rp 20.786.506 dan Rp 7.178.156 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998.

14. BIAYA TANGGUHAN – EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Biaya eksplorasi dan pengembangan area	13.646.471.510	13.543.826.278	3.101.504.228
Akumulasi amortisasi	(3.287.325.165)	(2.135.354.583)	(1.757.567.115)
Bersih	10.359.146.345	11.408.271.695	1.343.937.113

Biaya amortisasi masing-masing sebesar Rp 1.151.970.582, Rp 377.787.468 dan Rp 289.627.666 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998.

Jumlah penurunan nilai akibat dilakukannya evaluasi terhadap biaya tangguhan eksplorasi dan pengembangan masing-masing sebesar Rp 279.314.957, Rp 126.754.833 dan Rp 132.294.746 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998.

15. PINJAMAN DANA DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Kewajiban lancar			
Rekening Dana Investasi No. 378/DP3/2000	65.000.000.000	-	-
Kewajiban tidak lancar			
Rekening Dana Investasi No. 375/DP3/1999	7.800.000.000	7.800.000.000	-
Rekening Dana Investasi No. 340/DP3/1998	-	111.500.000.000	111.500.000.000
Jumlah	7.800.000.000	119.300.000.000	111.500.000.000
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	111.500.000.000	-
Pinjaman Dana Dari Pemerintah Republik Indonesia Jangka Panjang - Bersih	7.800.000.000	7.800.000.000	111.500.000.000

Pada tanggal 28 Maret 2000, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dana untuk pengadaan obat generik tahap III dari Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Rekening Dana Investasi (RDI) No. 378/DP3/2000 sebesar Rp 65.000.000.000 dengan biaya administrasi 12% per tahun. Pinjaman ini dicairkan pada 3 Mei 2000 dan akan jatuh tempo satu tahun kemudian (Catatan 41).

Pada tanggal 8 Oktober 1998, Perusahaan memperoleh dana untuk membiayai eksplorasi 12 (dua belas) sumur yodium dari Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari RDI No. 375/DP3/1999 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kredit	Jumlah Maksimum Rp	Biaya Administrasi Per Tahun	Tanggal Jatuh Tempo
Modal kerja	8.249.233.000	16%	8 Oktober 2003
Investasi	47.480.767.000	16%	8 Oktober 2009

Pada tanggal 28 Agustus 1998, Perusahaan memperoleh pinjaman dana untuk modal kerja, pengadaan bahan baku obat dan peralatan unit gawat darurat dari Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari RDI No. 340/DP3/1998 sebesar Rp 111.500.000.000 dengan biaya administrasi 18% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2000. Perusahaan telah melunasi fasilitas tersebut dan bunga terhutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

16. HUTANG BANK

	2000 Rp	1998 Rp
Kredit modal kerja		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 36)		
Bank Mandiri	1.088.008.158	11.103.760.117
Bank Negara Indonesia	-	6.508.872.321
Pihak ketiga		
Bank Bukopin	3.750.000.000	-
Bank Central Asia	263.084.947	770.340.934
Jumlah	5.101.073.105	18.382.973.372
Tingkat bunga per tahun	11,5% - 26%	27% - 45,50%

Fasilitas kredit modal kerja yang dapat diperpanjang kembali (revolving) dari Bank Mandiri, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan jumlah kredit maksimum sebesar Rp 35.000.000.000, digunakan untuk produksi dan distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan. Fasilitas kredit ini dijamin dengan persediaan dan piutang usaha serta sertifikat HGB No. 5 atas nama Perusahaan seluas 35.000 m2 berikut bangunan pabrik di atasnya yang berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta. Perjanjian kredit ini telah berakhir pada tanggal 26 Nopember 2000, dan diperbaharui, pada tanggal 11 Desember 2000 serta akan berakhir pada tanggal 26 Februari 2001. Dalam perjanjian kredit yang diperbaharui, fasilitas kredit telah ditingkatkan menjadi terdiri dari fasilitas kredit modal kerja, bank garansi dan fasilitas Letter of Credit import masing-masing sebesar Rp 35.000.000.000, Rp 61.000.000.000 dan US\$ 3.000.000. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang dan persediaan senilai 150% dari jumlah fasilitas kredit serta sertifikat HGB No. 5/Pulogadung dengan hak tanggungan senilai Rp 35.000.000.000. Pada saat ini perpanjangan kembali perjanjian fasilitas kredit masih dalam proses pengurusan.

Fasilitas kredit modal kerja yang dapat diperbaharui (revolving) dari Bank Negara Indonesia, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan jumlah kredit maksimum sebesar Rp 20.000.000.000 telah dilunasi pada tahun 1999. Fasilitas kredit ini dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Perusahaan di Jalan Budi Utomo No. 1, Jakarta.

Fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas line bank garansi dari Bank Bukopin, dengan jumlah kredit maksimum masing-masing sebesar Rp 23.750.000.000 dan Rp 20.000.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000.000 dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perusahaan senilai Rp 25.000.000.000. Fasilitas line bank garansi dipergunakan untuk jaminan uang muka dan pelaksanaan kontrak yang di buat Perusahaan. Perjanjian kredit ini berakhir pada tanggal 26 September 2001 (Catatan 4).

Fasilitas pinjaman rekening koran yang dapat diperpanjang kembali (revolving) dari Bank Central Asia, dengan jumlah kredit maksimum sebesar Rp 4.000.000.000 dijamin dengan sertifikat HGB No. 907/Melawai atas nama Perusahaan seluas 812 m2 berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Perjanjian kredit ini berakhir pada tanggal 12 Agustus 2000, dan perpanjangan perjanjian kredit ini telah diperbaharui pada tanggal 16 Oktober 2000 dan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2001 (Catatan 41).

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman diatas, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu yang tercantum dalam perjanjian antara lain tidak boleh menggunakan kredit diluar tujuan pemberian kredit, tidak memenuhi syarat-syarat persetujuan kredit, harta kekayaan disita, mengikat diri sebagai penjamin hutang kepada pihak ketiga, mengajukan permohonan paillit, tidak memberitahu dalam hal memperoleh fasilitas kredit dari bank dan lembaga keuangan lainnya, mengadakan pengalihan / pengoperan usaha dan mengadakan perubahan anggaran dasar.

17. HUTANG USAHA

Akun ini merupakan hutang yang timbul dari pembelian barang jadi, bahan baku dan bahan pembantu, dengan rincian sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 36)			
PT Indofarma Global Medika	35.726.829.833	-	-
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	32.081.296.790	-	19.683.530.364
PT Biofarma (Persero)	8.057.510.802	-	-
PT Indofarma (Persero)	6.143.034.798	48.903.944.240	50.802.765.651
PT Pantja Niaga (Persero)	150.086.789	-	-
PT Phapros (Persero)	-	19.676.897.160	2.082.818.453
	<u>82.158.758.812</u>	<u>68.580.841.400</u>	<u>72.569.114.468</u>

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Pihak ketiga			
Pembelian lokal	92.305.290.100	48.179.186.133	143.014.757.777
Pembelian impor	7.376.244.273	4.487.654.292	5.781.314.844
	99.682.534.453	52.666.840.425	149.796.072.621
Jumlah	181.841.293.265	121.247.681.825	222.365.187.089

Jumlah hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Rupiah	174.465.048.992	116.760.027.533	215.583.872.245
Mata uang asing (Catatan 38)			
DM 737.174 tahun 2000, DM 873.988 tahun 1999 dan DM 488.277 tahun 1998	3.359.029.710	3.194.040.323	2.332.466.101
EUR 205.810 tahun 2000	1.834.147.938	-	-
JPY 18.469.425 tahun 2000, JPY 12.219.500 tahun 1999 dan JPY 1.870.425 tahun 1998	1.543.454.330	848.888.665	131.004.557
US\$ 66.681 tahun 2000, US\$ 13.017 tahun 1999 dan US\$ 12.148 tahun 1998	639.612.295	92.421.765	97.489.305
NLG 108.620 tahun 1999 dan NLG 990.415 tahun 1998	-	352.303.539	4.199.004.534
SGD 4.415 tahun 1998	-	-	21.350.347
Jumlah	181.841.293.265	121.247.681.825	222.365.187.089

18. HUTANG PAJAK

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Pajak kini (Catatan 31)	47.975.524.519	24.351.402.233	18.323.156.428
Pajak penghasilan			
Pasal 21	10.041.886.931	2.981.849.420	1.271.759.722
Pasal 23	128.284.489	19.805.923	11.750.319
Pasal 25	3.000.000.000	-	-
Pasal 29	4.258.554.500	4.258.554.500	-
Jumlah	65.404.250.439	31.611.612.076	19.606.666.469

19. UANG MUKA PENJUALAN

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Departemen Kesehatan Republik Indonesia	50.189.610.385	80.849.406.489	14.065.917.453
Lain-lain (masing-masing dengan saldo dibawah Rp 1.000.000.000)	1.239.500.106	433.064.130	353.680.070
Jumlah	51.429.110.491	81.282.470.619	14.419.597.523

20. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
Gaji dan kesejahteraan karyawan	33.438.850.367	51.650.285.053	28.499.089.391
Bunga dan provisi bank	2.329.956.458	10.035.000.000	4.944.221.070
Promosi dan pengiriman	2.146.863.833	2.811.289.352	2.316.053.645
Royalti dan lisensi	1.148.075.426	1.220.894.767	1.021.465.089
Lain-lain (masing-masing dengan saldo dibawah Rp 1.000.000.000)	3.854.425.727	2.047.439.977	2.882.134.267
Jumlah	42.918.171.811	67.764.909.149	39.662.963.462

Pada tahun 2000, Perusahaan telah membuat taksiran biaya jasa produksi bagi karyawan dan tantiem untuk pengurus Perusahaan sebesar Rp 32.636.605.491 dalam akun gaji dan kesejahteraan karyawan. Jumlah pembayaran biaya jasa produksi karyawan dan tantiem pengurus yang telah direalisasikan sampai dengan saat ini sebagai pembayaran tahap pertama adalah sebesar Rp 12.576.219.150.

Pada tahun 1999 Perusahaan merencanakan melaksanakan program rasionalisasi karyawan. Rencana tersebut disetujui oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dalam suratnya No.-139/D2.PBUMN/1999 tanggal 3 September 1999 dengan jumlah maksimum biaya sebesar Rp 25.000.000.000 yang dibebankan sekaligus dalam laporan laba rugi tahun 1999. Program rasionalisasi karyawan telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2000. Kekurangannya antara pembebanan biaya pensiun dini tahun 1999 dengan realisasi yang dibayarkan pada tahun 2000 dibebankan dalam laporan laba rugi tahun 2000.

21. DANA SUBSIDI

Sejak tahun anggaran 1998/1999, Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat melalui Perusahaan, berhubung dampak kondisi ekonomi yang memburuk yang mengakibatkan biaya produksi yang menggunakan sebagian besar bahan baku impor meningkat secara signifikan dalam mata uang Rupiah. Kenaikan biaya produksi tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual obat karena penurunan daya beli masyarakat. Subsidi yang diberikan digunakan untuk mengimpor bahan baku obat esensial generik dalam rangka pelayanan kesehatan dasar, bahan-bahan pelayanan gawat darurat rumah sakit dan keluarga berencana. Subsidi tersebut berasal dari perbedaan kurs pada saat penerimaan dana subsidi dengan kurs impor yang ditetapkan Pemerintah yang mengacu pada penetapan harga jual obat. Fasilitas dana subsidi terdiri dari :

- Fasilitas dana subsidi tahun anggaran 1998/1999 diberikan untuk pengadaan bahan senilai US\$ 22.300.000 di kurs impor Rp 5.000 per US\$ 1. Subsidi Pemerintah adalah selisih antara realisasi kurs pengadaan bahan baku dikurangi Rp 5.000. Perusahaan telah menerima dana subsidi ini masing-masing sebesar Rp 114.214.500.000 yang dibagi dalam 2 tahap sebesar Rp 65.854.500.000 tahun 1998 dan Rp 48.360.000.000 tahun 1999. Perusahaan telah melaksanakan pengadaan bahan senilai US\$ 22.302.771,38 masing-masing sebesar US\$ 5.469.847,69 pada tahun 1998 dan US\$ 16.832.923,69 pada tahun 1999. Dana subsidi tahun anggaran 1998/1999 yang telah digunakan masing-masing sebesar Rp 30.777.374.227, Rp 64.474.984.039 dan Rp 18.962.141.734 pada tahun 2000, 1999 dan 1998.

Pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998, saldo dana subsidi yang belum digunakan masing-masing sebesar Rp 30.777.374.227 dan Rp 46.892.358.266.

- Fasilitas dana subsidi tahun anggaran 1999/2000 berupa pemberian nilai kurs impor Rp 6.000 per US\$ 1. Subsidi Pemerintah adalah selisih antara realisasi kurs pengadaan bahan baku dikurangi Rp 6.000. Pada tanggal 31 Desember 1999, tagihan subsidi atas realisasi impor berjumlah Rp 14.177.983.866 dicatat sebagai bagian dari akun piutang lain-lain. Tagihan ini telah diterima dalam tahun 2000 dan merupakan penerimaan subsidi untuk tahun anggaran 1999/2000.

- Fasilitas dana subsidi tahun anggaran 2000 berupa pemberian nilai kurs impor Rp 6.000 per US\$ 1. Subsidi Pemerintah adalah selisih antara realisasi kurs pengadaan bahan baku dikurangi Rp 6.000. Pada 31 Desember 2000, tagihan subsidi atas realisasi impor berjumlah Rp 21.365.894.314 dicatat sebagai bagian dari akun piutang lain-lain. Tagihan ini telah diterima pada tanggal 2 Januari 2001 dan jumlah tersebut termasuk dalam penerimaan subsidi tahun anggaran 2000.

Jumlah dana subsidi yang telah digunakan (diadakan) dan dicatat sebagai pengurang biaya perolehan persediaan bahan baku masing-masing sebesar Rp 52.143.268.541, Rp 78.652.967.905 dan Rp 18.962.141.734 pada tahun 2000, 1999 dan 1998.

22. KEWAJIBAN LANCAR LAIN-LAIN

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Pembelian aktiva tetap	2.478.897.236	1.463.585.846	549.731.739
Pendapatan penjualan rumah cicilan yang ditangguhkan (Catatan 36)	1.121.804.636	240.503.543	1.546.734.983
Dividen (Catatan 33)	140.216.839	257.695.180	10.000
Lain-lain	1.250.610.688	227.941.759	153.270.618
Jumlah	4.991.529.399	2.189.726.328	2.349.755.340

23. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

	1998 Rp
Kredit modal kerja	
Bank Central Asia	5.477.833.334
Kredit investasi	
Bank Negara Indonesia, pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 36)	6.044.221.070
Bank Muamalat Indonesia	1.140.784.085
Jumlah	12.662.838.489
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	4.540.784.085
Hutang Bank Jangka Panjang - Bersih	8.122.054.404
Tingkat bunga per tahun	15,25% - 31,50%

Fasilitas kredit modal kerja dari Bank Central Asia dengan jumlah kredit maksimum sebesar Rp 16.000.000.000 merupakan kredit untuk pengembangan apotik, pengadaan mesin, relokasi pabrik, eksplorasi sumur yodium dan sarana operasi. Jangka waktu pinjaman adalah 5 (enam) tahun 6 (enam) bulan sejak 24 Juli 1997 dan telah dilunasi Perusahaan pada tahun 1999. Fasilitas kredit ini dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Perusahaan di Jalan Cikini Raya No. 2/B, Jakarta.

Fasilitas kredit investasi jangka panjang dari Bank Negara Indonesia, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan jumlah kredit maksimum sebesar Rp 11.000.000.000 digunakan untuk membiayai rehabilitasi sarana dan prasarana produksi. Jangka waktu pinjaman 6 (enam) tahun sejak tahun 1997, dan telah dilunasi oleh Perusahaan pada tahun 1999. Fasilitas kredit ini dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Perusahaan di Jalan Pasar Baru No. 7, Jakarta.

Fasilitas kredit investasi jangka panjang dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) digunakan untuk renovasi pabrik dan investasi rutin. Atas fasilitas tersebut BMI menetapkan harga beli sebesar Rp 20.000.000.000 dan harga jual dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 26.708.333.333 dengan cicilan per bulan selama 5 tahun. Pada tahun 1999 pinjaman tersebut telah dilunasi.

24. MODAL SAHAM

Modal disetor Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Agustus 2000, sebagaimana tercantum dalam akta No. 22 tanggal 14 September 2000 dari Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui :

- Peningkatan modal dasar dari Rp 400.000.000.000, terbagi atas 400.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 1.500.000.000.000 yang terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 2.999.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 500 per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000.000.000, terbagi atas 100.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 375.000.000.000, yang terbagi atas 1 saham seri A dan 749.999.999 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp 500 per saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 275.000.000.000 tersebut dilakukan melalui kapitalisasi :
 - Cadangan umum sebesar Rp 110.381.582.678 yang diambil dari cadangan umum sampai dengan tahun buku 1998 sebesar Rp 41.173.209.425 dan cadangan umum tahun 1999 sebesar Rp 69.208.373.253.
 - Selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 164.618.417.322.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-20934/HT.01.01-TH.2000 tanggal 19 September 2000.

b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Desember 1997, sebagaimana tercantum dalam akta No. 19 tanggal 16 Januari 1998 dari Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui :

- Peningkatan modal dasar dari Rp 35.000.000.000, terbagi atas 3.500 saham yang terdiri dari 700 saham prioritas dan 2.800 saham biasa dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 10.000.000 per saham menjadi Rp 400.000.000.000 yang terbagi atas 400.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 23.000.000.000, terbagi atas 700 saham prioritas dan 1.600 saham biasa dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 10.000.000 per saham menjadi Rp 100.000.000.000, terbagi atas 100.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 77.000.000.000 tersebut dilakukan melalui kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp 66.500.844.000 dan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 10.499.156.000.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut dicatat pada akun modal disetor lainnya pada tahun 1997, karena akta peningkatan modal dasar tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-2759/HT.01.04.Th'98 tanggal 30 Maret 1998.

25. PENJUALAN

Penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 berdasarkan produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Penjualan lokal			
Obat	1.413.678.970.002	1.011.919.542.276	728.736.594.976
Pil KB	41.263.436.951	3.048.462.402	8.171.180.772
Minyak dan lemak	24.246.026.438	23.691.526.712	10.510.739.900
Alat kesehatan	12.978.122.988	5.593.288.258	9.008.956.861
Yodium dan derivat	610.511.959	321.602.400	23.471.271
Penjualan ekspor			
Garam kina	14.341.380.048	9.264.291.406	17.816.081.763
Yodium dan derivat	10.034.846.585	5.275.881.299	9.090.597.180
Yohimbinic	-	-	327.196.436
Jumlah	1.517.153.295.051	1.059.114.594.753	783.684.799.161

Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih dilakukan dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, masing-masing sebesar Rp 759.912.172.141, Rp 216.574.240.057 dan Rp 170.128.952.522 pada tahun 2000, 1999 dan 1998 (Catatan 36).

26. BEBAN POKOK PENJUALAN

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Pertambangan			
Biaya produksi			
Pemakaian bahan	2.250.322.278	1.496.802.964	1.330.626.168
Biaya langsung	658.405.555	175.676.389	136.350.713
Biaya tak langsung	5.719.116.045	1.675.983.953	2.821.709.055
Biaya produksi pertambangan	8.627.843.879	3.348.463.306	4.288.685.936
Produksi, PBF, Apotik, AAKP dan Perkebunan			
Pemakaian bahan	192.830.718.639	190.722.044.968	138.402.494.777
Biaya langsung	22.684.358.319	16.929.890.015	10.184.514.565
Biaya pabrikasi			
Gaji dan kesejahteraan karyawan	8.981.404.685	6.330.440.234	5.099.565.110
Pemeliharaan dan peralatan	5.111.284.498	4.328.888.812	2.393.035.403
Listrik, air dan gas	7.592.907.470	7.858.521.955	4.736.303.297
Penyusutan	5.458.056.953	4.082.198.569	3.801.203.454
Lain-lain	2.654.672.566	1.769.964.157	1.873.545.186
Jumlah	253.941.247.008	235.370.412.016	170.779.347.728
Barang dalam proses			
Awal tahun	16.859.807.712	11.821.643.504	5.898.027.083
Akhir tahun	(26.091.236.978)	(16.859.807.712)	(11.821.643.504)
Biaya produksi	244.719.817.742	230.322.247.808	164.855.731.307
Barang Jadi			
Awal tahun	182.386.853.638	98.957.882.890	54.158.850.355
Pembelian	681.384.498.877	558.982.429.689	404.429.320.948
Akhir tahun	(145.089.126.769)	(182.386.853.638)	(98.957.882.890)
Beban Pokok Penjualan	963.402.043.488	705.875.706.749	524.486.019.720

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Berikut ini adalah rincian pembelian barang jadi yang melebihi 10% dari jumlah pembelian bersih masing-masing pada tahun 2000, 1999 dan 1998 :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
PT Indofarma (Persero)	168.053.459.452	136.845.070.041	82.511.518.021
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	73.928.773.265	-	-
PT Phapros (Persero)	-	77.315.556.680	-
Jumlah	241.982.232.717	214.160.627.521	82.511.518.021

27. BEBAN PENJUALAN

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Promosi, propaganda dan pemasaran	87.787.914.805	62.826.598.689	39.058.767.744
Gaji dan kesejahteraan karyawan	62.959.117.979	54.628.267.767	43.246.364.038
Royalti dan lisensi	13.411.118.617	10.228.622.803	7.624.203.754
Pengiriman barang	11.845.498.935	8.441.731.310	5.166.687.906
Komisi penjualan	3.637.135.071	2.574.074.558	2.015.082.351
Penyisihan piutang ragu-ragu	2.035.108.008	834.916.000	1.045.943.171
Lain-lain (masing-masing dengan saldo dibawah Rp 1.000.000.000)	3.210.087.200	2.081.630.691	1.810.278.689
Jumlah	184.885.980.615	141.615.841.818	99.968.127.553

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Gaji dan kesejahteraan karyawan	58.936.519.834	61.643.120.167	34.656.930.716
Pemeliharaan dan peralatan	11.782.919.627	13.572.447.677	6.790.626.832
Penyusutan	7.691.800.896	4.014.784.243	4.142.587.160
Representasi, jamuan dan sumbangan	6.893.771.950	5.085.283.631	3.569.292.214
Telepon, faksimile dan telegram	5.781.714.786	4.425.243.537	3.473.837.560
Perjalanan dinas	4.161.711.883	2.902.866.940	1.411.241.614
Alat kantor dan percetakan	4.114.921.006	4.596.675.889	3.569.592.596
Listrik, air dan gas	2.928.578.711	2.071.737.057	1.617.941.622
Jasa profesional	2.861.137.482	290.521.199	116.026.773
Penelitian dan pengembangan	2.009.386.710	1.357.526.464	1.056.881.949
Asuransi	1.106.964.644	926.872.716	476.430.420
Lain-lain (masing-masing dengan saldo dibawah Rp 1.000.000.000)	10.673.342.613	7.291.190.106	7.827.834.771
Jumlah	116.943.070.142	108.778.269.646	68.709.224.227

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

29. BEBAN BUNGA DAN PROVISI BANK

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
Beban bunga			
Pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia	17.123.997.360	11.158.198.314	16.145.433.286
Hutang bank	247.998.705	16.048.812.084	14.163.208.639
Jumlah	17.371.996.065	27.207.010.398	30.308.641.925
Provisi bank	972.938.361	1.985.043.065	1.374.279.642
Jumlah	18.344.934.426	29.192.053.463	31.682.921.567

30. HASIL INVESTASI

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
Bunga deposito berjangka	14.712.978.401	48.382.000.170	29.471.691.405
Pendapatan dividen (Catatan 10)	419.866.140	1.446.740.000	55.941.000
Bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi (Catatan 10)	(63.286.126)	182.342.567	1.077.736.039
Dividen pembagian harta likuidasi dan laba penjualan investasi saham (Catatan 10)	-	1.768.740.000	6.801.720.628
Lain-lain	5.126.717	-	-
Jumlah	15.074.685.130	51.779.822.737	37.487.069.072

31. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari :

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
Pajak kini	72.034.764.700	38.047.820.500	25.598.883.000
Pajak tangguhan	(182.259.559)	770.613.920	953.376.914
Jumlah	71.852.505.141	38.818.434.428	26.552.259.914

Pajak Kini *

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	241.671.481.536	137.064.290.446	97.421.845.282
Perbedaan temporer :			
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(1.178.849.802)	(2.038.578.219)	(232.815.736)
Beban (pemulihan) piutang ragu-ragu	1.369.955.479	480.287.441	(2.703.681.829)
Penyisihan persediaan usang	621.365.125	(371.325.882)	(337.148.828)
Amortisasi - biaya tangguhan eksplorasi dan pengembangan	(165.983.706)	(1.102.257.726)	107.686.999
Amortisasi - biaya tangguhan hak atas tanah	(8.138.836)	8.957.269	(5.439.697)
Rugi (laba) penjualan aktiva tetap	(30.817.398)	454.204.025	(5.523.955)
Jumlah	607.531.863	(2.568.713.092)	(3.177.923.046)

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :			
Tantien dan gratifikasi	-	23.336.491.253	18.334.028.659
Beban representasi dan jamuan	7.477.543.164	5.814.572.001	3.844.095.113
Kenikmatan karyawan	5.333.345.970	3.819.741.007	2.356.498.628
Sumbangan	301.819.963	46.031.268	24.775.113
Beban bunga	258.749.981	-	-
Bagian rugi (laba) bersih perusahaan asosiasi	63.286.128	(182.342.567)	(1.077.736.039)
Pendapatan bunga deposito berjangka dan jasa giro yang sudah dikenakan pajak final	(16.754.405.703)	(54.997.166.248)	(32.379.792.582)
Pendapatan sewa yang sudah dikenakan pajak final	(250.000.000)	(118.452.845)	(61.257.845)
Pendapatan dividen	(419.866.140)	(1.448.740.000)	(55.941.000)
Beban (pendapatan) pajak	134.339.046	580.433.263	(117.975.404)
Lain-lain	1.721.223.602	-	-
Jumlah	(2.133.963.989)	(23.147.432.788)	(9.133.305.357)
Laba kena pajak sebelum penyesuaian dengan SPT dan SKPKB	240.145.049.410	111.348.144.566	85.110.616.879
Penyesuaian SPT dan SKPKB	-	15.507.091.020	248.158.601
Laba Kena Pajak	<u>240.145.049.410</u>	<u>126.855.235.586</u>	<u>85.358.775.480</u>

Perhitungan beban dan hutang pajak kini adalah sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Tarif pajak yang berlaku :			
10% X Rp 25.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15% X Rp 25.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
30% X Rp 240.095.049.000	72.028.514.700	-	-
~ Rp 126.805.235.000	-	38.041.570.500	-
Rp 85.308.775.000	-	-	25.592.633.000
Jumlah pajak kini	<u>72.034.764.700</u>	<u>38.047.820.500</u>	<u>25.598.883.000</u>
Dikurangi pembayaran pajak dimuka			
Pajak penghasilan			
Pasal 22	11.817.260.181	8.854.813.367	5.949.433.322
Pasal 25	12.217.980.000	4.815.104.900	1.310.293.250
Fiskal luar negeri	24.000.000	25.500.000	8.000.000
Jumlah	<u>24.059.240.181</u>	<u>13.695.418.267</u>	<u>7.275.726.572</u>
Hutang pajak kini	<u>47.975.524.519</u>	<u>24.351.402.233</u>	<u>18.323.156.428</u>

Pada tanggal 20 Juni 2000, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00026/206/98/051/00 dari Direktorat Jenderal Pajak atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 1998 sebesar Rp 102.189.312. SKPKB tersebut dilunasi pada tanggal 30 Juni 2000.

Sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan tahun 1999 dan 1998 (Catatan 40) :

- Laba kena pajak tahun 1999 yang semula sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebesar Rp 126.855.235.586 menjadi sebesar Rp 111.348.144.566 yang merupakan laba kena pajak sebelum penyesuaian SPT. Sehubungan pada tanggal 31 Desember 2000 Perusahaan belum melakukan pembetulan SPT, Perusahaan mendasarkan perhitungan pajak penghasilan untuk laporan keuangan yang diterbitkan kembali berdasarkan laba kena pajak sesuai dengan SPT yang telah disampaikan.

Pada tanggal 3 April 2001, Perusahaan telah mengajukan pembetulan SPT Tahunan badan tahun pajak 1999 yang semula laba kena pajak sebesar Rp 126.855.235.586 menjadi sebesar Rp 111.348.144.566. Selanjutnya Perusahaan juga mengajukan restitusi pajak penghasilan lebih bayar sebesar Rp 4.652.127.300 sebagai konsekuensi pembetulan SPT tersebut dan pada tanggal 31 Mei 2001 Perusahaan telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tahun pajak 1999 sebesar Rp 4.299.203.400.

- Laba kena pajak tahun 1998 yang semula sesuai dengan SKPKB sebesar Rp 71.414.059.000 menjadi sebesar Rp 85.358.775.480 sesuai laporan keuangan yang disajikan kembali sehingga pajak penghasilan tahun 1998 menjadi terhutang sebesar Rp 4.258.554.500. Sampai dengan saat ini Perusahaan belum membayar pajak penghasilan terhutang tahun pajak 1998 dan manajemen merencanakan menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan tahun pajak 1998 dengan SKPLB tahun pajak 1999 tersebut diatas.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, fiskus berhak melakukan pemeriksaan kembali sebelum daluwarsa dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998, rincian aktiva pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut :

	1 Januari 1998	Dibebankan ke laporan laba rugi	31 Desember 1998	Dibebankan ke laporan laba rugi	31 Desember 1999	Dibebankan ke laporan laba rugi	31 Desember 2000
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aktiva pajak tangguhan							
Penyesuaian aktiva tetap	986.530.374	(71.501.808)	914.728.466	(475.312.259)	439.416.206	(362.906.106)	75.510.040
Penyisihan piutang usaha	2.114.131.524	(811.104.349)	1.303.027.175	(44.506.233)	1.447.113.508	(419.388.542)	1.955.190.151
Penyisihan persediaan usang	368.287.315	(181.144.549)	259.152.666	(111.357.756)	147.754.901	(86.408.838)	334.184.739
Biaya tangguhan - eksplorasi dan pengembangan	8.128.428	(32.306.101)	(46.432.529)	(40.432.529)	-	-	-
Jumlah	3.469.083.941	(985.745.005)	2.517.340.936	(483.058.319)	2.034.284.517	(234.496.321)	2.268.785.590
Kewajiban pajak tangguhan							
Biaya tangguhan - eksplorasi dan pengembangan	-	-	-	(200.244.790)	(200.244.790)	(49.795.111)	(348.039.971)
Biaya tangguhan - rak atas tanah	2.602.082	(1.631.909)	(4.233.991)	(2.687.181)	(1.545.810)	(2.461.551)	(3.688.451)
	2.602.082	(1.631.909)	(4.233.991)	(267.557.609)	(201.791.600)	(52.256.762)	(344.028.352)
Aktiva pajak tangguhan - bersih	3.466.481.859	(983.375.914)	2.513.106.945	(770.513.920)	1.742.493.017	(182.259.559)	1.924.752.575

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2000 Rp	1999 Rp	1998 Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi (laba akuntansi)	241.671.481.536	137.064.290.446	97.421.845.282
Tarif pajak yang berlaku	72.492.694.000	41.110.537.000	29.217.803.000
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :			
Tantiem dan gratifikasi	-	7.000.947.376	5.500.208.598
Beban representasi dan jamuan	2.243.262.949	1.744.371.583	1.153.229.476
Kenikmatan karyawan	1.600.003.791	1.145.922.302	705.949.568
Sumbangan	90.545.989	13.009.300	7.432.534
Beban bunga	77.624.994	-	-
Bagian rugi (laba) bersih perusahaan asosiasi	18.985.838	(54.702.770)	(323.320.812)
Pendapatan bunga deposito berjangka dan jasa giro yang sudah dikenakan pajak final	(5.026.321.711)	(16.499.149.874)	(9.713.937.775)
Pendapatan sewa yang sudah dikenakan pajak final	(76.000.000)	(35.535.854)	(18.377.354)
Pendapatan dividen	(125.959.842)	(434.022.000)	(16.782.300)
Beban (pendapatan) pajak	40.301.714	174.129.979	(35.392.621)
Lain-lain	516.367.419	-	-
Jumlah	(640.188.859)	(6.944.229.878)	(2.739.990.666)
Jumlah beban pajak sebelum penyesuaian dengan SPT dan SKPKB	71.852.505.141	34.166.307.122	26.477.812.334
Penyesuaian SPT dan SKPKB	-	4.652.127.306	74.447.580
Jumlah Beban Pajak	71.852.505.141	38.818.434.428	26.552.259.914

32. LABA PER SAHAM

Laba Bersih

Laba bersih residual untuk tujuan penghitungan laba per saham (pembilang) adalah Rp 169.818.976.395, Rp 98.245.856.018 dan Rp 70.869.585.368 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998.

Jumlah Saham

Pada tanggal 31 Desember 2000, jumlah saham beredar sebanyak 750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 dan pada 31 Desember 1999 dan 1998 jumlah saham beredar masing-masing 100.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Agustus 2000, sebagaimana tercantum dalam akta No. 22 tanggal 14 September 2000 dari Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 500 per saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor (Catatan 24). Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 April 2001, sebagaimana tercantum dalam akta No. 2 dan 47 masing-masing tanggal 2 April 2001, 23 April 2001 dan 27 April 2001, ketiganya dari Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 500 per saham menjadi Rp 100 per saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 125.000.000.000 yang berasal dari kapitalisasi saldo laba (Catatan 41).

P.T. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

Perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal disetor yang berasal dari kapitalisasi cadangan umum dan selisih penilaian kembali aktiva tetap merupakan penambahan jumlah saham dan jumlah modal disetor tanpa disertai perubahan sumber daya. Oleh karena itu, untuk tujuan penghitungan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, perubahan-perubahan tersebut dianggap sudah terjadi pada awal tahun dari laporan keuangan terawal disajikan.

Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut :

	2000	1999	1998
	Saham	Saham	Saham
Jumlah awal tahun, nilai nominal Rp 1.000.000 per saham	100.000	100.000	100.000
Pemecahan nilai nominal menjadi Rp 500 per saham tanggal 22 Agustus 2000	199.900.000	199.900.000	199.900.000
Kapitalisasi cadangan umum dan selisih penilaian kembali aktiva tetap tanggal 22 Agustus 2000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
Jumlah rata-rata tertimbang saham sebagaimana disajikan sebelumnya	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Pemecahan nilai nominal menjadi Rp 100 per saham tanggal 2 April 2001	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Kapitalisasi saldo laba tanggal 2 April 2001	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
Jumlah rata-rata tertimbang saham disajikan kembali	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

Laba Per Saham Dasar

Laba bersih residual per saham adalah Rp 33,96; Rp 19,65 dan Rp 14,17 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998.

Laba Per Saham Dilusian

Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian karena Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa bersifat ditulif untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2000, 1999 dan 1998.

33. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan, telah ditetapkan pembagian dividen dan cadangan umum sebagai berikut :

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
Dividen	44.410.333.119	23.408.810.076	2.886.420.000
Cadangan umum	71.035.466.625	35.849.790.772	3.784.625.504
Jumlah	115.445.799.744	59.258.600.848	6.671.045.504